

POLITIK KURIKULUM DI INDONESIA:

Studi tentang Transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968



Arina Izmi

4815131300

Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

Arina Izmi. Politik Kurikulum di Indonesia: Studi tentang Transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. Skripsi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana transisi Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dalam politik kurikulum di Indonesia serta bagaimana dinamika proses pembelajaran dari perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. Tujuan penelitian ini memiliki tiga hal penting yang ingin disampaikan. *Pertama*, menjelaskan dinamika perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. *Kedua*, menjelaskan motif di balik perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dan dinamika proses pembelajaran yang berlangsung pada Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dengan mengacu kepada guru dan peserta didik. *Ketiga*, menjelaskan konstelasi kebijakan politik pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Adapun sumber data primer berupa dokumen Kurikulum di jenjang SD, SMP, dan SMA tahun 1964 dan 1968, Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960, TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diakses di Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Wawancara juga dilakukan dengan orang-orang yang disebut pelaku sejarah atau orang yang cukup mengerti tentang seluk beluk dan kegiatan pemikiran sejarah.

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal penting. *Pertama*, dinamika Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 terjadi ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru mengambil alih kekuasaan negara. Dengan begitu, Kurikulum 1964 mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1968. *Kedua*, motif kebijakan politik pendidikan dibalik transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. Motif tersebut di antaranya adalah sosial, politik, dan ideologi. Dalam praktiknya di sekolah, gurulah yang menjalankan kurikulum. Selain itu, guru sebagai sumber belajar. Peserta didik sebagai objek belajar. Model pembelajaran yang digunakan adalah *teacher centered*. *Ketiga*, konstelasi kebijakan yang berubah dari Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 meliputi dinamika politik dan pergantian kekuasaan serta dinamika ideologi yang berkembang.

Kata Kunci: Kurikulum, Politik, Pendidikan, Transisi, Ideologi

ABSTRACT

Arina Izmi. Curriculum Politic in Indonesia: Study about Curriculum Transition 1964 to Curriculum 1968. Sociology Education Undergraduate Thesis, Faculty of Social, State University of Jakarta, 2017.

This research explains how the transition of Curriculum 1964 and Curriculum 1968 in curriculum politic in Indonesia and how learning process dynamics from the change of Curriculum 1964 to Curriculum 1968. Purpose of this research has 3 important things to be conveyed. First, to explain the dynamics of change Curriculum 1964 to Curriculum 1968. Second, to explain the aim behind the change of Curriculum 1964 to Curriculum 1968. Third, to explain constellation of education politic policy Curriculum 1964 to Curriculum 1968.

This research uses qualitative approach with historical method. The primary source is document Curriculum in Elementary School, Junior High School, and Senior High School in the year of 1964 and 1968, President Decision Number 145 year of 1965 about Name and Main Formula of National Education System, President Determination Number 19 year of 1965 about Basis of Pancasila National Education System, TAP MPRS Number II/MPRS/1960, TAP MPRS Number XXVII/MPRS/1966 about Religion, Education, and Culture. Laws Number 2 year of 1989 about National Education System and Laws Number 20 year of 2003 about National Education System that is accessed in National Archives of Indonesia, Center of Curriculum and Books, Ministry of Education and Culture, Departements of Indonesia Science and National Library. The interview is also conducted with people who are mentioned by historical actor or people who understand about the details and historical thought activity.

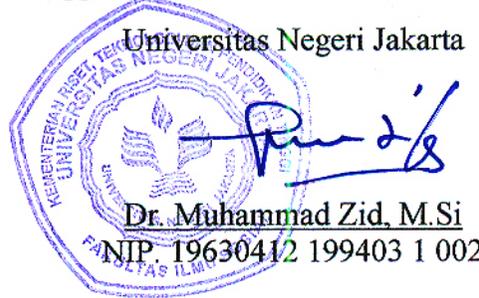
This research concludes 3 important things. First, dynamics of Curriculum 1964 to Curriculum 1968 that happened when the Old Order collapsed and the New Order took over the power. Therefore, Curriculum 1964 changed to be Curriculum 1968. Second, the aim of educational politic policy behind the transition of Curriculum 1964 to Curriculum 1968. The aim is social, politics, and ideology. In the application at school, the teacher who performs the curriculum. Moreover, the teacher as learning source. The student as object of learning. The learning model that is used is teacher centered. Third, constellation of policy that changes from Curriculum 1964 to Curriculum 1968 including the political dynamics and change of power also ideology dynamics that develops.

Key Words: Curriculum, Politic, Education, Transition, Ideology

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

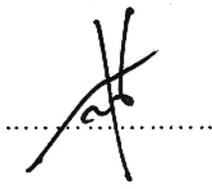
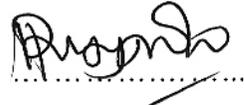
Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si

NIP. 19630412 199403 1 002

No	Nama	TTD	Tanggal
1.	<u>Abdul Rahman Hamid, SH., MH</u> NIP. 19740504 200501 1 002 Ketua Sidang		14-8-2017
2.	<u>Rusfadia Saktiyanti, M.Si</u> NIP. 19781001 200801 2 016 Sekretaris Sidang		15-8-2017
3.	<u>Dr. Robertus Robet, MA</u> NIP. 19710516 200604 1 001 Penguji Ahli		9-8-2017
4.	<u>Rakhmat Hidayat, PhD</u> NIP. 19800413 200501 1 001 Dosen Pembimbing I		11-08-2017
5.	<u>Ubedilah Badrun, M.Si</u> NIP. 19720315 200912 1 001 Dosen Pembimbing II		9-8-2017

Tanggal Lulus: 2 Agustus 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arina Izmi
Nomor Registrasi : 4815131300

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Politik Kurikulum di Indonesia: Studi tentang Transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968**” ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, Juli 2017



Arina Izmi

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Bapak Chairul Harahap dan Ibu Rr. Nefi Widiastuti serta kakak, Amirul Wiramuda, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta bapak ibu padaku.
2. Semua sanak-saudara, berkat doa dan kebaikan materinya saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Para dosen UNJ, terkhusus kepada dosen-dosen Sosiologi UNJ.

KATA PENGANTAR

Berucap syukur dan Alhamdulillah pada kesempatan ini penulis dapat mengakhiri pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta. Semoga usaha dan kerja keras tentu tidak luput dari karunia dan nikmat Allah swt. Memang, semua proses yang dijalani merupakan sesuatu yang telah digariskan oleh-Nya. Kita sebagai makhluk tidak dapat keluar dari ketentuan-ketentuan-Nya.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan pada panutan kita Baginda Nabi Besar kita, Muhammad saw. Berkat petunjuknya kita dapat berada—In Syaa Allah—di jalan yang benar dan kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir. Aaamiin Allahuma Aamiin.

Dalam rangka menjaga tali persaudaraan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah menjadi “tangan Tuhan” bagi penulis. Karena berkat mereka penulis dapat menjalani proses pembelajaran ini dengan lancar dan pada kesempatan ini penulis dapat mengakhiri pembelajaran S1 di Universitas Negeri Jakarta. namun mengakhiri pembelajaran S1 bukanlah akhir dari semuanya tetapi awal dari semua dunia nyata yang akan kita hadapi.

Sekali lagi, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada tangan-tangan Tuhan yang telah membantu penulis menjalani proses ini dengan baik. Mereka telah membantu penulis dalam berbagai segi. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis; Bapak Chairul Harahap dan Ibu Rr. Nefi Widiastuti yang senantiasa memberikan doa, dukungan, moril maupun spiritual, dan materil, beserta kakak penulis; Amirul Wiramuda kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Takkan habis kata untuk mengucapkan terima kasihku kepada mereka.
2. Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta dan Abdi Rahmat, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan kesempatan, dorongan, semangat, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Rakhmat Hidayat, PhD selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, saran, dan kritik yang berarti kepada penulis sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Ubedilah Badrun, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, saran, dan kritik yang berarti kepada penulis sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Dr. Robertus Robet, MA selaku penguji ahli yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam perbaikan skripsi ini.

6. Abdul Rahman Hamid, SH., MH selaku ketua sidang yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam perbaikan skripsi ini.
7. Rusfadia Saktiyanti, M.Si selaku pembimbing akademik dan sekretaris sidang yang terus memotivasi dan memberikan saran serta kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Syaifudin, M. Kesos yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen pengajar Sosiologi FIS UNJ (Pak Eman, Pak Asep, Pak Rahman, Pak Mughis, Pak Samadi, Pak Tarmiji, Pak Siswanto, Ibu Suriani, Ibu Evy, Ibu Dian, Ibu Rosita, Ibu Ika, Ibu Ciek, Ibu Dewi, Ibu Titi, Ibu Dini, Ibu Ajeng, dan Ibu Devi) yang selama empat tahun ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis serta Mbak Mega dan Mbak Tika yang selalu menjawab setiap pertanyaan penulis perihal informasi akademik dan administrasi skripsi.
10. Prof. H.A.R Tilaar, Dr. Abdul Syukur, M. Hum, Ubedilah Badrun, M.Si, Dr. Eman Surachman, MM, dan Dr. Umasih, M. Hum selaku informan yang telah memberikan ilmu, saran, dan kritik kepada penulis.
11. Semua sanak saudara, berkat doa, dukungan dan kebaikan dan kebaikan materinya saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terutama Ir. Drs. Sorimuda Harahap, MT selaku uwak penulis sekaligus dosen di Jurusan Teknik Mesin di Universitas Pancasila dan Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kawan-kawan kelas Pendidikan Sosiologi A 2013 yang telah menjadi bagian terpenting dalam memberi inspirasi kepada penulis selama empat tahun ini.
13. Ajeng, Fanny, Febri, dan Intan yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi dan kejar revisi.
14. Bandara Squad (Carla, Melisa, dan Novita) yang telah besabar menanti kehadiran dosen pembimbing dan saling tukar informasi mengenai skripsi.
15. Mimi dan Wita yang telah memotivasi satu sama lain selama penyusunan skripsi dan mengingatkan penulis untuk sesekali *me-refresh* diri.
16. Pustakawan dan Pustakawati Laboratorium Sosiologi, Workshop Sejarah, Perpustakaan UPT UNJ, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah (Perpusda), Perpustakaan Kementerian dan Kebudayaan (Perpus Mendikbud), Perpustakaan Pusat UI, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam membaca berbagai koleksi buku yang terkait dengan penelitian skripsi penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
18. Serta kepada seluruh pembaca yang budiman.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan ini, penulis hanya bisa berdoa semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan amal kebaikan yang berlipat. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan mahasiswa pada umumnya, khususnya penulis pribadi.

Jakarta, Juli 2017

Arina Izmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SKEMA	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan Penelitian	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Tinjauan Penelitian Sejenis	6
1.5 Kerangka Konseptual	12
1.5.1 Kajian tentang Kurikulum.....	12
1.5.2 Kurikulum dan Ideologi Michael W. Apple	14
1.5.3 Kajian tentang Politik Pendidikan.....	16
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Pendekatan Penelitian	19
1.6.2 Fokus Penelitian.....	22
1.6.3 Subjek Penelitian.....	22
1.6.4 Kerangka Kerja Penelitian	23
1.7 Keterbatasan Penelitian	24
1.8 Sistematika Penulisan.....	25

BAB II KURIKULUM 1964 DAN KURIKULUM 1968 DALAM POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA

2.1 Pengantar	26
2.2 Dinamika Pendidikan dari Orde Lama Menuju Orde Baru.....	27
2.3 Kurikulum 1964.....	30
2.3.1 Struktur Kurikulum 1964 Tingkat SD	35
2.3.2 Struktur Kurikulum 1964 Tingkat SMP.....	38
2.3.3 Struktur Kurikulum 1964 Tingkat SMA.....	40
2.4 Kurikulum 1968.....	46
2.4.1 Struktur Kurikulum 1968 Tingkat SD	49

2.4.2 Struktur Kurikulum 1968 Tingkat SMP.....	52
2.4.3 Struktur Kurikulum 1968 Tingkat SMA.....	54
2.5 Penutup.....	56
BAB III MOTIF DIBALIK PERUBAHAN KURIKULUM 1964 KE KURIKULUM 1968 DAN DINAMIKA PROSES PEMBELAJARAN	
3.1 Pengantar.....	57
3.2 Motif Kebijakan Politik Pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968.....	59
3.2.1 Motif Sosial.....	59
3.2.2 Motif Politik.....	63
3.2.3 Motif Ideologi.....	64
3.3 Sistem Pembelajaran.....	68
3.4 Model Pembelajaran <i>Teacher Centered</i>	69
3.5 Dinamika Guru Dalam Proses Pendidikan.....	72
3.6 Penutup.....	76
BAB IV KONSTELASI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN KURIKULUM 1964 KE KURIKULUM 1968	
4.1 Pengantar.....	77
4.2 Dinamika Politik dan Pergantian Kekuasaan.....	78
4.3 Dinamika Ideologi yang Berkembang.....	81
4.4 Kurikulum 1964 dan 1968 dalam Kerangka Michael W. Apple.....	85
4.5 Penutup.....	92
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penelitian Sejenis.....	11
Tabel I.2 Daftar Informan Wawancara	21
Tabel II.1 Gambaran Umum Tentang Kurikulum 1964.....	31
Tabel II.2 Susunan Mapel Rencana Pendidikan 1964 SD Pengantar Bhs Daerah.....	36
Tabel II.3 Susunan Mapel Rencana Pendidikan 1964 SD Pengantar Bhs Indonesia.....	37
Tabel II.4 Struktur Mapel Rencana Pendidikan 1964 SMP Gaya Baru.....	39
Tabel II.5 Struktur Mapel Rencana Pendidikan 1964 SMA	41
Tabel II.6 Gambaran Umum Tentang Kurikulum 1968.....	48
Tabel II.7 Susunan Mapel Rencana Pendidikan 1968 SD Pengantar Bhs Daerah.....	50
Tabel II.8 Susunan Mapel Rencana Pendidikan 1968 SD Pengantar Bhs Indonesia.....	51
Tabel II.9 Susunan Mapel Rencana Pendidikan 1968 SMP	53
Tabel II.10 Susunan Mapel Rencana Pendidikan 1968 SMA.....	55
Tabel III.1 Kekuatan-Kekuatan Politik Orde Baru	67
Tabel III.2 Proses Pembelajaran Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968.....	71
Tabel III.3 Daftar Nama Karyawan P & K yang Dipecat Menteri Prijono Tahun 1964	74
Tabel IV.1 Perbandingan Antara Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968.....	94

DAFTAR SKEMA

Skema I.1 Kerangka Kerja Penelitian	23
Skema III.1 Fase Perkembangan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968.....	60
Skema IV.1 Dinamika Ideologi.....	82
Skema IV.2 Alur Konstelasi Politik Pendidikan 1964-1968	84
Skema IV.3 Perbedaan Tujuan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai penelitian mengenai kurikulum sudah banyak dilakukan oleh beberapa tokoh. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu “*currere*” yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat, merambat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha untuk¹. Dalam hal ini, kurikulum mengandung jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Pelari, sebut saja peserta didik, harus menempuh sejumlah mata pelajaran untuk memperoleh ijazah. Peserta didik yang menguasai mata pelajaran berarti telah mencapai tujuan belajar dan memperoleh ijazah. Dengan kata lain, kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu pelajaran dan ditandai oleh perolehan ijazah tertentu².

Selanjutnya, Nasution menjelaskan bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu *rencana* yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya³. Sebagian lain ada yang menganggap bahwa kurikulum sebagai sebuah produk. Kurikulum sebagai suatu produk pemikiran sudah barang tentu tidak mungkin dapat diberlakukan sepanjang zaman. Hal ini juga ditegaskan oleh Lias Hasibuhan yang

¹ Benny Susetyo. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS. hlm. 24.

² Oemar Hamalik. 2009. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 16.

³ S.Nasution. 1995. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 5.

menyatakan bahwa kurikulum selalu mempunyai keterbatasan-keterbatasan menurut ukuran ruang dan waktu ketika kurikulum tersebut dimunculkan atau diberlakukan⁴. Artinya, kurikulum tidak dapat dapat diberlakukan sepanjang zaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya kurikulum menempati posisi sentral dalam pendidikan. Artinya, kurikulum mempunyai posisi yang strategis. Posisi yang strategis itu menyebabkan kurikulum bersifat politik atau sarat kepentingan penguasa. Dalam hal ini, kurikulum merupakan rangkaian agenda tersembunyi agar kurikulum disejajarkan dengan kepentingan penguasa. Di sini penulis ingin menekankan bahwa kurikulum bukan sekadar substansi dan teknis pembelajaran saja. Sebab, kurikulum tidak terlepas dari berbagai motif kebijakan politik pendidikan. Oleh karena itu, istilah ‘ganti menteri ganti kurikulum’ rasanya tepat untuk menggambarkan dinamika kurikulum yang terjadi sampai saat ini. Singkatnya, adanya pergantian kurikulum dalam sejarah pendidikan kita merupakan bagian dari dialektika politik kekuasaan dan kepentingan⁵.

Secara historis, problem tentang kurikulum sudah menjadi hal yang serius dalam bidang pendidikan saat itu. Namun dalam praksisnya, problematika itu menjadi sesuatu yang perlu dianalisis demi pengembangan pendidikan suatu bangsa⁶. Pada dasarnya, perkembangan kurikulum di Indonesia berpijak dari sejarah perkembangan pendidikan

⁴ Lias Hasibuhan. 2010. *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: GP Press. hlm. 15.

⁵ Moh. Yamin. 2012. *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press. hlm. 95.

⁶ Loeziana Uce. 2016. “Realitas Aktual Praksis Kurikulum: Analisis Terhadap KBK, KTSP, dan Kurikulum 2013”. *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Vol. 16 No. 2. hlm. 217 <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/596> (diakses tanggal 25 Januari 2017 pukul 06:44 WIB).

di Indonesia itu sendiri⁷. Lihat misalnya, kurikulum di zaman Belanda dan Jepang, kurikulum diwarnai oleh misi penjajahan. Belanda, misalnya, mencetak tenaga kerja pribumi yang loyal terhadap pemerintah Belanda, sementara itu, Jepang, memanfaatkan pribumi untuk membantu misinya dalam peperangan. Dengan demikian, kurikulum dicipta untuk memenuhi kepentingan penjajah saat itu.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah segera mmbenahi sistem pendidikan termasuk kurikulum. Tercatat satu kurikulum muncul pasca kemerdekaan atau dikenal dengan istilah Orde Lama yaitu Kurikulum 1964. Satu kurikulum lainnya lahir pasca Orde Lama atau disebut Orde Baru yaitu Kurikulum 1968. Kedua kurikulum ini menghadirkan semangat yang berbeda. Semangat yang dimaksud pada Kurikulum 1964 mengandung semangat *Nation and Character Building* sedangkan Kurikulum 1968 menghadirkan semangat *Nation Building* dalam proses pendidikan. Dua kurikulum tersebut diproduksi oleh Pusat Kurikulum. Kurikulum mengalami dinamika ketika transisi Orde Lama menuju Orde Baru. Orde Baru mengambil alih kekuasaan negara. Perubahan kurikulum selalu mendatangkan berbagai tanggapan antara pro dan kontra. Dibalik kurikulum selalu terjadi kontestasi kekuasaan. Kontestasi yang dimaksud yaitu sebuah bentuk perjuangan dan pertarungan berbagai pihak yang berkepentingan dengan produksi kurikulum⁸.

⁷ Abdullah Idi. 2011. *Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 13.

⁸ Rakhmat Hidayat. 2011. "Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 17 No. 2. hlm. 179.

Adapun fokus penelitian ini adalah berusaha menguraikan transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. Penelitian ini tidak fokus pada jenjang pendidikan baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan menggunakan konsep kurikulum dan ideologi dari Michael W. Apple. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti bagaimana transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 serta dinamika proses pembelajaran yang mengacu kepada guru dan peserta didik. Maka dari itu, pentingnya penelitian ini dilakukan. Sebab, kurikulum menjadi perbincangan yang menarik seiring pergantian kekuasaan dan perubahan kepentingan. Mengingat keberadaan kurikulum tidak lepas dari berbagai motif kebijakan politik pendidikan seperti sosial, politik, dan ideologi. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan dengan mengambil judul “Politik Kurikulum di Indonesia: Studi tentang Transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968”. Kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait dengan transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 serta dinamika proses pembelajaran yang berlangsung di tahun 1964 dan 1968.

1.2 Permasalahan Penelitian

Sejalan dengan perkembangan zaman, dinamika kurikulum terjadi karena kurikulum tidak terlepas dari arah perkembangan suatu masyarakat. Namun, apabila kita membicarakan kurikulum tentu tidak terlepas dari berbagai motif seperti sosial, politik, dan ideologi. Dalam konteks ini, dinamika kurikulum terjadi ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru mengambil alih kekuasaan negara. Masa ini adalah masa

transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. Dalam masa ini terjadi perdebatan di antara tokoh pendidikan mengenai tujuan pendidikan berdasarkan sosialisme atau Pancasila. Sebab, tujuan pendidikan berdasarkan sosialisme dianggap telah bergeser dari jiwa pancasila dan mengandung politik tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai:

1. Bagaimana dinamika perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?
2. Bagaimana motif dibalik perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dan dinamika proses pembelajaran yang berlangsung pada Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?
3. Bagaimana konstelasi kebijakan politik pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan tiga hal penting. *Pertama*, menjelaskan dinamika perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. *Kedua*, menjelaskan motif dibalik perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dan dinamika proses pembelajaran yang berlangsung pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dengan mengacu kepada guru dan peserta didik. *Ketiga*, menjelaskan konstelasi kebijakan politik pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dan dinamika proses pembelajaran yang berlangsung. Secara teoritis, kita akan memperoleh pengetahuan mengenai kajian kurikulum, politik pendidikan, dan proses pembelajaran. Secara praksis, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait dengan konstelasi kebijakan politik pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

1.4 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian mengenai kurikulum khususnya Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 bukan penelitian yang baru. Berdasarkan tinjauan penelitian sejenis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berbentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Dalam konteks ini, ada berbagai hal yang terjadi dalam transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji penelitian terkait. Beberapa penelitian itu antara lain seperti yang dijelaskan secara lebih lengkap di bawah ini.

Penelitian yang dilakukan Agus Suwignyo⁹, misalnya, yang berjudul *Kurikulum dan Politik (Kebijakan) Pendidikan dalam Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana

⁹ Lihat Agus Suwignyo. 2007. *Kurikulum dan Politik (Kebijakan) Pendidikan dalam Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikritik sebagai kurikulum yang sentralis dan reduktif. Dalam bukunya, Agus melihat bahwa pendidikan *mainstream* dijalankan ketika rezim Orde Baru. Sementara itu, gagasan-gagasan pendidikan dan model pembelajaran KTSP dan KBK termasuk “kategori” pendidikan alternatif. Juga Agus melihat bahwa kurikulum sebagai kontestasi kekuasaan, sehingga pemikiran *mainstream* dan pemikiran alternatif tentang suatu sistem pendidikan sering berkembang dengan semangat “saling mengeliminasi”.

Penelitian terhadap dinamika politik pendidikan pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dilakukan oleh Kenang Kelana¹⁰. Penelitian ini membahas tentang kebijakan pendidikan tahun 1959 sampai 1965. Dalam penelitian ini, Kenang melihat wacana yang berkembang adalah Panca Wardhana sebagai produk politik kebijakan dan produk gagasan untuk mengkomunikasikan dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kehadiran Panca Wardhana menjadi sebuah kebijakan pendidikan pada tahun 1960 melalui Kementerian, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat Hidayat¹¹, yang berjudul *Kurikulum sebagai Kontestasi Kekuasaan: Critical Discourse Analysis Terhadap Kurikulum Sosiologi dan Buku Pelajaran Sosiologi SMA Berdasarkan Kurikulum 2006 dan*

¹⁰ Lihat Kenang Kelana. 2014. *Kebijakan Pendidikan Panca Wardhana dan Politik Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

¹¹ Lihat Rakhmat Hidayat. 2008. *Kurikulum sebagai Kontestasi Kekuasaan: Critical Discourse Analysis Terhadap Kurikulum Sosiologi dan Buku Pelajaran Sosiologi SMA Berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 1984*. Tesis. Magister Sosiologi. Departemen Sosiologi. Universitas Indonesia, Depok

Kurikulum 1984. Penelitian ini menggunakan pendekatan Norman Fairclough dengan metode *critical discourse analysis* dalam menjelaskan wacana dominan dalam Kurikulum Sosiologi SMA dan buku pelajaran sosiologi berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 1984. Dalam tesisnya, Rakhmat mengambil salah satu materi dari buku sosiologi terbitan PT. Galaxy Mega Puspa. Materi sosiologi berdasarkan Kurikulum 2006 dengan tema perkembangan kelompok sosial. Sementara itu, materi sosiologi berdasarkan Kurikulum 1984 dengan tema Masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan Kurikulum 2006, Galaxy Mega Puspa memandang kelompok sosial sebagai entitas penting dalam masyarakat multikultural. Galaxy Mega Puspa menjelaskan bahwa keberadaan kelompok sosial dapat menciptakan solidaritas sosial. Misalnya, bencana yang terjadi di Indonesia dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan. Selain itu, muncul tindakan solidaritas sosial dari seluruh pelosok negeri. Paham-paham kesukuan mendadak hilang dan tidak ada lagi yang menghalangi tindakan solidaritas tersebut. Selanjutnya, Rakhmat menganalisis Kurikulum 1984 dengan tema Masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika sebagai refleksi dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari beranekaragamannya kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, dan bahasa. Konsep Bhineka Tunggal Ika direpresentasikan melalui Pancasila terutama sila ketiga dari Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”.

Berdasarkan uraian di atas, materi-materi yang terkandung dalam buku teks sosiologi SMA Kurikulum 2006 dan Kurikulum 1984 memiliki perbedaan wacana

yang cukup signifikan. Buku teks sosiologi SMA Kurikulum 2006 merupakan produk BSNP. Juga Kurikulum 2006 tidak lepas dari ranah kekuasaan. Kekuasaan negara direpresentasikan dalam terciptanya masyarakat yang harmonis, teratur, dan seimbang. Sementara Kurikulum 1984 menciptakan masyarakat yang harmonis berdasarkan *social equilibrium* dalam praktek pembangunan. Ideologi pembangunan menyebar melalui materi yang tertuang dalam buku pelajaran. Dalam tesis ini juga dijelaskan adanya pertarungan simbolik antara BSNP dan penerbit-penulis. BSNP menempati posisi obyektif dominan dalam ranah kekuasaan kurikulum, sedangkan penulis-penerbit menempati posisi obyektif marginal. Posisi obyektif tersebut mengindikasikan habitus yang berkembang diantara dua agen tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Syukur¹², yang berjudul *Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis*, mengkaji tentang penyusunan ruang lingkup, materi, dan narasi sejarah Indonesia pada Kurikulum 1964 hingga Kurikulum 2004. Dalam disertasinya, Syukur merasa prihatin terhadap pengajaran sejarah Indonesia diakibatkan kedudukan dan fungsi sejarah Indonesia yang semakin lama dianggap tidak penting dalam pendidikan nasional. Selain itu, kekacauan pengajaran sejarah Indonesia akibat keragaman ruang lingkup, materi, dan narasi pengajarannya. Syukur juga melihat bahwa ada keterkaitan antara kurikulum dan politik. Syukur juga menjelaskan bahwa kurikulum mengandung aspek

¹² Lihat Abdul Syukur. 2013. *Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis*. Disertasi. Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia, Depok

ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Aspek ideologi menyebabkan kurikulum pendidikan sejarah berfungsi sebagai alat legitimasi pemerintahan. Sedangkan aspek politik, ekonomi, masyarakat dan budaya berfungsi sebagai pelestari struktur sehingga memberikan keuntungan kepada kelas dominan di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan bahwa pendidikan sejarah pada masa Orde Lama dan Orde Baru berisi tentang sejarah masyarakat kelas dominan.

Kelas dominan diartikan secara ekonomis merupakan kelompok kaya dan secara politis merupakan kelompok yang berkuasa. Kelas dominan ini merupakan kelompok yang menentukan narasi, ruang lingkup, dan isi materi pengajaran sejarah di Indonesia. Oleh sebab itu, visi, misi, dan konten pendidikan sejarah merupakan sebuah produk kebijakan politik. Dalam hal ini, Soeharto memperoleh kemenangan narasi dan memperkuat legitimasinya. Sejarawan Indonesia memberikan bantuan kepada pemerintah Orde Baru untuk menyusun sebuah buku sejarah nasional yang dapat dijadikan sebagai standar konten pengajaran sejarah beserta narasinya. Memasuki era globalisasi, pemerintah, politisi maupun kelompok-kelompok sosial yang berpengaruh sudah tidak lagi menghargai pendidikan sejarah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap telah mereduksi fungsi pendidikan sejarah sebagai materi yang substantif untuk *national and character building*. Reduksi ini mengakibatkan generasi muda tidak dapat mengenal jati diri bangsa. Peserta didik tidak lagi dibentuk menjadi manusia yang memiliki rasa bangga terhadap tanah air.

Tabel I.1

Tabel Penelitian Sejenis

Nama & Judul Penelitian	Pendekatan	Teknik & Metode	Persamaan	Perbedaan
Agus Suwignyo. 2007. Kurikulum dan Politik (Kebijakan) Pendidikan dalam Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif.	Kualitatif	Studi Pustaka	Mengkaji kurikulum yang dilihat dari pendekatan kekuasaan.	Penelitian fokus pada Kurikulum Orde Lama dan Orde Baru.
Kenang Kelana. 2014. Kebijakan Pendidikan Panca Wardhana dan Politik Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Skripsi. Jakarta: Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta	Kualitatif	Metodologi Sejarah dan Deskripsi Analisis	Mengkaji kebijakan pendidikan dan politik pada masa Orde Lama.	Penelitian fokus pada kebijakan pendidikan dan politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru.
Rakmat Hidayat. 2008. Kurikulum sebagai Kontestasi Kekuasaan: <i>Critical Discourse Analysis</i> Terhadap Kurikulum Sosiologi dan Buku Pelajaran Sosiologi SMA Berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 1984. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Sosiologi. Departemen Sosiologi. Universitas Indonesia.	Kualitatif	Analisis Wacana Kritis	Mengkaji Kurikulum Orde Lama dan Orde Baru dilihat dari pendekatan kekuasaan.	Penelitian fokus pada transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 yang dilihat dari segi politik.
Abdul Syukur. 2013. Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis. Disertasi. Depok: Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia	Kualitatif	Studi Komparatif, Wawancara, dan Analisis Isi	Mengkaji aspek kurikulum dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya.	Penelitian fokus pada transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dilihat dari segi politik.

Sumber: Analisis Penulis (2016)

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Kajian tentang Kurikulum

Istilah kurikulum sudah dikenal sejak 1820. Sejarah keberadaan kurikulum dapat dilacak saat Plato menyusun aritmatika sebagai ringkasan belajar yang di dalamnya mencakup geometri, astronomi, solid geometri. Semua itu terkait dengan pelajaran matematika¹³. Dalam konteks ini, istilah kurikulum memiliki berbagai definisi yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang kurikulum. Definisi tersebut tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin “*curir*” yang artinya pelari dan “*curere*” yang artinya tempat berlari¹⁴. Dengan demikian, kurikulum mengandung jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis *start* sampai dengan *finish*. Dalam hal ini, pelari digambarkan sebagai peserta didik yang telah menempuh sejumlah pelajaran untuk memperoleh ijazah.

Definisi yang telah dijelaskan sebelumnya ditinjau dari kurikulum pandangan lama. Kurikulum ini mengandung pengertian yang sempit. Sebab, kurikulum hanya diterapkan di ruang kelas. Namun, kurikulum ini masih bisa dimaklumi karena kegiatan yang ada di ruang kelas masih sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Lain halnya dengan sekarang, definisi kurikulum seperti itu tidak memadai lagi. Mengingat, kurikulum dikembangkan sesuai dengan situasi zaman dan perkembangan masyarakat. Sementara itu, definisi lain mengenai kurikulum juga diungkapkan oleh Sholeh

¹³ Rakhmat Hidayat. 2013. *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1.

¹⁴ Suparlan. 2011. *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 34.

Hidayat yang menyebut kurikulum sebagai salah satu instrumental input dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat¹⁵.

Definisi ini dapat dipahami bahwa tidak ada kurikulum yang permanen. Dengan kata lain, kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan urgensinya dalam praktik pendidikan. Selain itu, kurikulum didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan kurikulum sebagai¹⁶;

“Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (pasal 1) yang disusun untuk mewujudkan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (pasal 37)”.

Definisi tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 19 yang mendefinisikan kurikulum sebagai¹⁷; “*seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu*”. Definisi tersebut mencakup materi (*content*), pengalaman siswa

¹⁵ Sholeh Hidayat. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 2.

¹⁶ Arsip Nasional Republik Indonesia. *Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005*. Jakarta: Arsip Nasional. hlm. 16.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pdf, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). hlm. 3.

(*experiences*), tujuan kegiatan belajar-mengajar (*objectives*), dan hasil kegiatan belajar-mengajar (*outcomes*)¹⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas, kurikulum sebenarnya bukanlah entitas yang tunggal. Dalam konteks ini, kurikulum dipengaruhi berbagai faktor baik sosial, politik, ideologi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masanya. Kurikulum juga tidak hanya dipahami sebagai perihal substansi dan instruksional pembelajaran saja, melainkan kurikulum tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan di dalamnya. Hal ini terkait dengan pertarungan antar aktor untuk memperjuangkan posisi dan pengaruhnya melalui kurikulum.

1.5.2 Kurikulum dan Ideologi Michael W. Apple

Apple memiliki keterkaitan pemikiran dengan beberapa tokoh *critical pedagogy* atau pedagogi kritis seperti Henry A. Giroux, Pierre Bourdieu, Basil Bernstein, Antonio Gramsci, Bowles dan Gintis, Louis Althusser, dan Paulo Freire yang menyatakan bahwa pendidikan bersifat politis. Artinya, kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah selalu mengandung kepentingan politis, yaitu untuk melanggengkan kekuasaan suatu rezim tertentu. Dalam hal ini, Apple memusatkan kajiannya pada kurikulum dan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan perspektif dari Michael W. Apple dalam melihat bagaimana lembaga pendidikan kita berfungsi menyebarkan nilai ideologis dan pengetahuan.

¹⁸ Suke Silverius. 2004. "Masa Depan Kurikulum Masa Depan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun ke-10 No. 46. hlm. 27.

Menurut Apple, sekolah tidak hanya mengontrol orang dalam berperilaku, tetapi juga sekolah mengontrol makna dari produksi pengetahuan yang tertuang dalam kurikulum. Proses kontrol makna tersebut dapat dilakukan oleh kelompok dominan maupun ideologi dominan di sekolah. Kelompok maupun ideologi dominan tersebut berupaya melestarikan dan mendistribusikan pengetahuan formal mereka. Oleh karena itu, kelompok dominan tersebut beranggapan bahwa semua murid dan individu yang ada di sekolah harus menerima pengetahuan yang disebarkan kelompok dominan tersebut¹⁹.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sekolah tidak hanya mengontrol individu, tetapi juga mengontrol makna. Makna di sini bisa berupa perilaku, ucapan, maupun praktik-praktik terselubung seperti ideologi²⁰. Apple mengatakan bahwa kurikulum menjadi ruang terjadinya transformasi ideologi dan kekuasaan kelompok dominan dalam masyarakat²¹;

“The study of the interconnections between ideology and curriculum and between ideology and educational argumentation has important implications for the curriculum field and for educational theory and policy in general”.

Apple juga menjelaskan dengan jelas bahwa kelompok dominan tersebut memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang lebih besar untuk menanamkan pengaruh kekuasaannya di sekolah²². Ironisnya, kelompok dominan menempatkan sekolah

¹⁹ Rakhmat Hidayat. *Pengantar Sosiologi...op. cit.*, hlm. 149.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

²¹ Michael W. Apple. 1990. *Ideology and Curriculum*. New York-London: Routledge. hlm. 14.

²² Rakhmat Hidayat. *Pengantar Sosiologi...loc. cit.*

melalui perannya sebagai “mesin besar demokrasi” yang mana mereka mengklaim telah melahirkan berbagai unsur kebenaran dalam praktik kurikulum di sekolah²³.

1.5.3 Kajian tentang Politik Pendidikan

Ada empat definisi mengenai politik pendidikan. *Pertama*, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. *Kedua*, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. *Ketiga*, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sebagainya. *Keempat*, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, dan pembentuk bangsa yang berkarakter²⁴.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa politik pendidikan salah satunya membicarakan mengenai kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Supandi dan Achmad Sanusi terkait dengan kebijakan yaitu merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut²⁵. Kebijakan diwujudkan dalam bentuk keputusan dan

²³ *Ibid.*, hlm. 155.

²⁴ Ali Mahmudi Amnur. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. hlm. 5.

²⁵ Supandi & Achmad Sanusi. 1988. *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK). hlm. 11.

tindakan baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Yang dilakukan itu bukanlah kebijakannya, melainkan programnya²⁶.

Program yang dilaksanakan tergantung pada bidang, perumus, dan pelaku. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Sementara itu, perumus dan pelaku kebijakan disebut dengan aktor kebijakan. Aktor kebijakan meliputi pemerintah, akademisi, organisasi massa, partai politik, *interest group*, dan tokoh perorangan. Pemerintah sebagai perumus dan pelaku kebijakan pendidikan nasional dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk. *Pertama*, yang terwujud dalam peraturan pemerintah seperti GBHN, TAP MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum dan peraturan lainnya. *Kedua*, yang terwujud dalam sikap pemerintah seperti SK Menteri, program, kegiatan, komentar dan *statement* atau lainnya yang diketahui via media massa²⁷.

Diakui maupun tidak sistem politik suatu negara mempengaruhi produk kebijakan. Hal ini yang menyebabkan kebijakan pendidikan di suatu negara tentu berbeda dengan kebijakan pendidikan di negara lain. Singkatnya, politik memiliki peranan untuk menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Lihat misalnya, pergantian menteri pada waktu tertentu turut mempengaruhi perbedaan, pembaharuan, perkembangan atau pergeseran suatu kebijakan pendidikan. Pada

²⁶ Abdul Rachman Assegaf. 2005. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam. hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

konteks ini, politik pendidikan di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan pergantian sistem kekuasaan²⁸.

Kondisi yang demikian mempermudah penguasa untuk menitipkan pesan-pesan politik dalam pendidikan khususnya kurikulum. Sederhananya, kurikulum yang selama ini berjalan memuat kepentingan politik. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Moh. Yamin bahwa sebuah kekuasaan—apabila ingin berhasil menjalankan masa kekuasaannya dalam waktu lama—harus mengendalikan pendidikan melalui kurikulum²⁹. Pendeknya, kurikulum disejalankan dengan kepentingan politik agar kekuasaan bisa dipertahankan dalam waktu yang lama.

²⁸ Muchlis R. Luddin. 2012. *Oligarki Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Bina Bangsa Nusantara. hlm. 5.

²⁹ Moh. Yamin. *Panduan Manajemen...op. cit.*, hlm. 93.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi, lensa penafsiran atau teoritis, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau manusia³⁰. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah seperangkat aturan yang sistematis digunakan dalam proses pengumpulan data, mengerti, dan menafsirkannya serta menyajikannya secara sintesis dalam bentuk sebuah cerita sejarah³¹. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik adalah aktivitas mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan sumber yang dilakukan penulis meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas kegiatan manusia di masa lampau baik yang berbentuk fisik dan non fisik. Dalam penelitian, observasi yang digunakan penulis berbentuk non fisik seperti buku-buku, dokumen, catatan harian, arsip pemerintahan, termasuk seni budaya, adat istiadat, peraturan (hukum) yang berlaku, sistem pemerintahan, sistem pengamanan, sistem informasi, kemajuan ilmu dan teknologi, seni bangunan, dan lain-lain³².

³⁰ John W. Creswell. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 87-88.

³¹ Basri. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Restu Agung. hlm. 35.

³² *Ibid.*, hlm. 59.

Dokumen yang berhasil penulis kumpulkan antara lain Kurikulum di jenjang SD, SMP, dan SMA tahun 1964 dan 1968, Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960, TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diakses di Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya, wawancara digunakan untuk mengumpulkan, menghimpun, melengkapi, dan memperkaya data sosial bukti-bukti historis dan sejenisnya. Dalam hal ini, jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin. Artinya, wawancara dilakukan dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Secara teknis pelaksanaannya, wawancara berjalan efektif, tidak kaku dan terarah sehingga target hasil dapat dicapai. Adapun kegiatan wawancara terdiri dari lima informan. Di antara lima informan yang dimaksud yaitu pelaku sejarah dan orang-orang intelektual (ilmuwan) seperti praktisi pendidikan, koordinator program studi Sejarah UNJ, dosen Sosiologi Politik UNJ, dosen Manajemen Pembelajaran Sosiologi UNJ, dan dosen Kurikulum Sejarah UNJ. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel I.2.

Tabel I.2

Daftar Informan Wawancara

Subjek Penelitian	Informan	Fokus Wawancara
Praktisi Pendidikan	Prof. H.A.R Tilaar	Mendapatkan informasi mengenai gambaran pendidikan di era Orde Lama dan era Orde Baru
Koordinator Program Studi Sejarah UNJ	Dr. Abdul Syukur, M.Hum	Mendapatkan informasi mengenai transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968
Dosen Sosiologi Politik UNJ	Ubedilah Badrun, M.Si	Mendapatkan informasi mengenai motif politik Kurikulum 1964 ke 1968
Dosen Manajemen Pembelajaran Sosiologi UNJ	Dr. Eman Surachman, MM	Mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968
Dosen Kurikulum Sejarah UNJ	Dr. Umasih, M.Hum	Mendapatkan informasi mengenai proses perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968

Sumber: Analisis Penulis (2017)

Setelah proses wawancara dilakukan tahap berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan teknik yang paling banyak menonjol digunakan oleh para peneliti sejarah. Istilah lain yang sering digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*. Ia meliputi penyusunan *outline* skripsi, *reading course*, hingga laporan hasil penelitian. Berbagai pustaka yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 serta artikel dan koran sejaman.

Setelah semua data terkumpul melalui heuristik, penulis melakukan verifikasi. Verifikasi lazimnya disebut kritik sumber. Kritik sumber adalah upaya memperoleh

data yang benar-benar akurat dan valid dengan melakukan kritik internal (kredibilitas) dan kritik eksternal (autentisitas). Kritik internal digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana isi kandungan sumber tersebut. Sedangkan kritik eksternal digunakan untuk menguji hal-hal yang bersifat fisik atau penampilan luar dari sumber-sumber tersebut seperti jenis kertas, jenis tinta, cap, bentuk tulisan, waktu, zaman, tempat, dan identifikasi pengarang yang sebenarnya³³. Tahap selanjutnya adalah interpretasi yaitu melakukan analisa dan sintesa terhadap fakta yang didapatkan. Terakhir adalah historiografis yaitu mendeskripsikan hasil analisis secara sistematis dan logis.

1.6.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dua kurikulum yaitu Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968. Selanjutnya, dinamika perubahan dilihat dari berbagai motif seperti sosial, politik, dan ideologi. Kemudian, diolah melalui dokumen atau arsip, artikel, koran sejaman, dan wawancara dengan informan. Selain itu, penulis juga melihat bagaimana dinamika proses pembelajaran yang mengacu pada guru dan peserta didik.

1.6.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini subjek penelitian terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah dua kurikulum yaitu Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968. Kedua kurikulum ini dapat diakses di Pusat Kurikulum dan

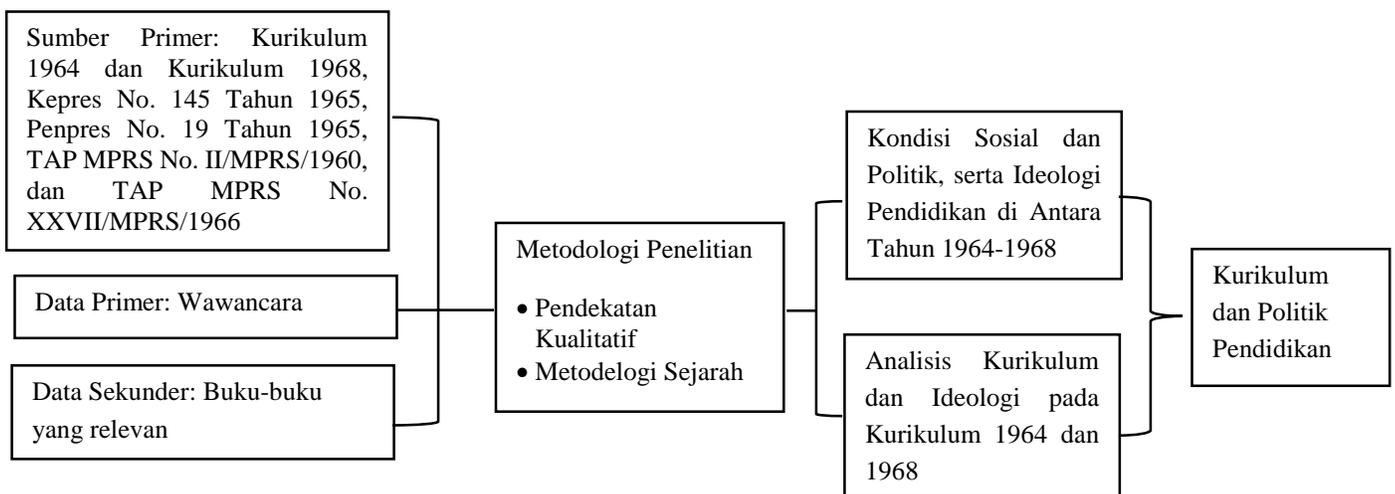
³³ *Ibid.*, hlm. 69-72.

Perbukuan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data primer yang digunakan adalah artikel dan koran-koran sejaman terkait kondisi sosial, politik, dan ideologi pendidikan khususnya pada tahun 1964 sampai 1968. Sementara itu, data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen atau arsip terkait yang berguna untuk melengkapi data primer.

1.6.4 Kerangka Kerja Penelitian

Di dalam penelitian ini ada kerangka kerja yang tersusun secara sistematis sehingga mudah bagi pembaca untuk memahami hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis akan memvisualisasi kerangka kerja penelitian di bawah ini:

Skema I.1
Kerangka Kerja Penelitian



Sumber: Analisis Penulis (2017)

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan beberapa data penting. *Pertama*, penulis mengumpulkan dokumen Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968. Kurikulum tersebut diakses dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. *Kedua*, penulis mengumpulkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965, Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965, TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960, dan TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. Dokumen tersebut diakses dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selanjutnya, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi penelitian sejarah kemudian dibantu wawancara. Terakhir, penulis menggunakan kerangka sosiologis kurikulum dan ideologi dari Michael W. Apple sebagai pisau analisis.

1.7 Keterbatasan Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis mengalami berbagai hambatan, namun setidaknya terdapat tiga hambatan yaitu: *pertama*, penulis menyadari bahwa penelitian ini lebih terfokus kepada konteks sejarah. Maka dari itu, data yang harus dicari erat kaitannya dengan konteks sejarah kurikulum tahun 1964 sampai 1968. *Kedua*, informan memiliki waktu yang terbatas. *Ketiga*, permasalahan biaya untuk melakukan penelitian ini tidaklah sedikit. Namun keterbatasan biaya tidak mengurangi semangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metode penelitian, keterbatasan penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 yaitu Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dalam politik pendidikan Indonesia. Bagian ini berisi dinamika pendidikan Orde Lama menuju Orde Baru dan struktur Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968. Bab 3 yaitu motif dibalik perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dan dinamika proses pembelajaran. Bagian ini berisi motif kebijakan politik pendidikan yaitu sosial, politik, dan ideologi. Selain motif, dibahas juga mengenai sistem pembelajaran yang mengacu pada guru dan peserta didik. Bab 4 berisi analisis kurikulum dan ideologi dari Michael W. Apple. Bagian ini berisi dinamika politik dan pergantian kekuasaan, dan dinamika ideologi yang berkembang, serta Kurikulum 1964 dan 1968 dalam kerangka Michael W. Apple. Bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Terakhir berisi daftar pustaka, dokumentasi, draft pertanyaan wawancara, transkrip wawancara, dan riwayat hidup penulis.

BAB II

KURIKULUM 1964 DAN KURIKULUM 1968 DALAM POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA

2.1 Pengantar

Di dalam telaah sejarah perjalanan bangsa ini, pendidikan mengalami banyak persoalan di dalamnya. Konsep pendidikan terus mengalami perubahan karena mengikuti kepentingan politik. Berbicara mengenai pendidikan maka tidak terlepas dari kajian kurikulum. Dalam hal ini, Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 mengalami perkembangan mengikuti situasi politik. Kurikulum 1964 misalnya, proses produksi kurikulum ini ‘terjebak’ dalam empat partai besar yang mendapatkan kursi di parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Keempat partai itu masing-masing mempunyai kekuatan dalam memperebutkan pengaruh politik. PKI misalnya, yang mempunyai modal sosial dan modal politik yang kuat, Angkatan Darat khususnya juga mempunyai kekuatan yang cukup untuk menandingi kekuatan PKI³⁴. Pada konteks ini, Kurikulum 1968 di bawah kekuasaan Orde Baru didukung oleh kekuatan partai politik, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam hal ini, Golkar berdiri untuk menandingi PKI oleh Angkatan Darat.

³⁴ Kenang Kelana. *op. cit.*, hlm. 58.

Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 berada di bawah pengaruh politik. Masing-masing partai politik melakukan kontestasi pengaruh politik. Kontestasi partai itulah yang menyebabkan kurikulum mengalami dinamika. Dinamika terjadi ketika Orde Lama mengalami keruntuhan di masanya. Orde Baru segera mengambil alih kekuasaan negara. Dinamika kurikulum membawa perubahan struktur kurikulum. Struktur Kurikulum 1964 dibagi menjadi lima, yaitu (1) Pengembangan Moral, (2) Pengembangan Kecerdasan, (3) Pengembangan Emosi (Artistik), (4) Perkembangan Keterampilan, dan (5) Pengembangan Jasmani. Sementara itu, struktur Kurikulum 1968 dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, (2) Kelompok Pembinaan Kecakapan Dasar, dan (3) Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus. Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 secara umum serta dinamika perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968.

2.2 Dinamika Pendidikan dari Orde Lama Menuju Orde Baru (1945-1968)

Pendidikan nasional di zaman Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno. Praktik pendidikan diarahkan pada penanaman jiwa nasionalisme dan membangun karakter bangsa atau dikenal dengan istilah *nation and character building*³⁵. Hal ini dapat kita lihat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 yang berbunyi³⁶;

³⁵ Syaifudin. 2012. *Tan Malaka: Merajut Masyarakat dan Pendidikan Indonesia yang Sosialis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 29.

³⁶ Arsip Nasional. *op. cit.*, hlm. 2.

“Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (*Nation dan Character Builing*) yang membina suatu bangsa yang mampu atas tanggung jawab sendiri menyelesaikan Revolusinya, tahap demi tahap, dengan pengertian bahwa Agama adalah unsur mutlak dalam rangka *Nation dan Character Building* sesuai dengan Ketetapan MPRS tahun 1960”.

Teguh Wiyono menambahkan bahwa pendidikan saat itu memiliki filosofi jelas, yakni untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia³⁷. Pada saat itu, bangsa ini masih di masa-masa pencarian sistem keamanan suatu negara. Dengan kata lain, bangsa ini sedang dalam proses pembinaan. Sebab, bangsa ini baru saja terlepas dari penjajahan. Lebih lanjut, H.A.R Tilaar menyatakan ketika diwawancarnya³⁸;

“Ya, kalo Orde Lama itu sih masih terlalu banyak politik di situ kan ya? Jadi, Orde Lama itu kan masih menghilangkan sisa-sisa daripada pendidikan kolonial. Jadi, masih pada masa pembinaan bangsa kita ini baru terlepas dari ya revolusi tahun 45. Itu masih kuat sehingga terasa kekuatan politik itu sangat keras pada waktu itu. Jadi, misalnya, sekolah-sekolah peninggalan Belanda itu masih hidup kemudian diganti menjadi sekolah-sekolah nasional”.

Pendidikan di zaman ini banyak dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Syaifudin bahwa politik menjadi pilar utama dan ekonomi menjadi subordinasi di dalamnya. Maka, Soekarno mengatakan bahwa “politik adalah panglima”³⁹. Konsep pemerintahan Soekarno yang mengusung sosialisme dijadikan rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dijalankan. Artinya, semua kelompok masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Pada konteks ini,

³⁷ Teguh Wiyono. 2010. *Rekonstruksi Pendidikan Indonesia: Selamatkan Pendidikan Kita dan Kembali ke Pendidikan Asli Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 49.

³⁸ Kutipan wawancara dengan Prof. H.A.R Tilaar sebagai Praktisi Pendidikan pada tanggal 27 Maret 2017.

³⁹ Syaifudin. *op. cit.*, hlm. 30.

pendidikan nasional mengikuti arus perkembangan politik yang dirumuskan dalam ‘Manifesto Politik’ atau Manipol dan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).

Manipol merupakan keseluruhan isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut merupakan penjelasan resmi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959⁴⁰. Dalam rangka mewujudkan Manipol, pendidikan nasional merupakan sarana yang penting. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, maka ditetapkan rumusan induk dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional tidak lain untuk melahirkan warga-negara-warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila⁴¹.

Pada konteks ini, tujuan pendidikan yang berlandaskan Manipol USDEK tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 ditinggalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian, era Soekarno (Orde Lama) tumbang dan digantikan dengan era Soeharto (Orde Baru). Gagasan cita-cita Orde Baru timbul disebabkan karena Orde Lama (di bawah pemerintahan Presiden Soekarno) penuh penyelewengan-penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945⁴². Dalam hal ini,

⁴⁰ H.A.R Tilaar. 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 93.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 101.

⁴² Burhanuddin Salam. 1988. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 224.

pemerintah segera mengadakan koreksi total di segala bidang, termasuk pendidikan. Kondisi yang demikian memerlukan usaha-usaha untuk meluruskan kembali arah pendidikan nasional sesuai cita-cita Orde Baru.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan melalui Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 diganti menjadi Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. Kondisi tersebut akan berdampak pula dengan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dan proses pergantiannya sangatlah cepat. Kurikulum seakan-akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh penguasa. Bila kurikulum sudah tidak dikehendaki maka akan diganti dengan kurikulum yang baru. Artinya, kurikulum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi dan diadakan penyempurnaan kembali.

2.3 Kurikulum 1964

Secara historis, Kurikulum 1964 di bawah kepemimpinan Soekarno yang mengusung konsep sosialisme dalam pendidikan. Dalam hal ini, konsep tersebut merujuk bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan. Singkatnya, konsep ini memberikan prinsip dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas apapun, apakah mereka berasal dari kelas atas, menengah, maupun bawah⁴³. Kurikulum 1964 disesuaikan dengan Keputusan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang dirumuskan; *“manusia sosialis Indonesia suatu bagian daripada sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta*

⁴³ Moh. Yamin. 2009. *Menggugat Pendidikan di Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 87.

berencana yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sesuai dengan Keputusan MPRS Nomor II/MPRS/1960 maka pendidikan berfungsi sebagai berikut: (1) Pendidikan sebagai pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi, (2) Pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan, (3) Pendidikan sebagai lembaga pengembangan kebudayaan nasional, (4) Pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik, dan fisik atau mental, dan (5) Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat⁴⁴.

Tabel II.1

Gambaran Umum Tentang Kurikulum 1964

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pendidikan “Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana” • Semangat <i>Nation and Character Building</i> dalam Pendidikan
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menciptakan manusia sosialisme Indonesia
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan MPRS Nomor II/MPRS/1960 • Instruksi Menteri Muda, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1 tanggal 17 Agustus 1959 tentang Sapta Usaha Tama • Instruksi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1960 • Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional • Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila

Sumber: Diolah dari beberapa sumber, Februari 2017

⁴⁴ Arsip Nasional. *op. cit.*, hlm. 3.

Di bawah Prijono, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tanggal 17 Agustus 1959 yang disebut Sapta Usaha Tama, berisikan hal-hal sebagai berikut: (1) Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. (2) Menggiatkan kesenian dan olahraga. (3) Mengharuskan “usaha halaman”. (4) Mengharuskan penabung. (5) Mewajibkan usaha-usaha koperasi. (6) Mengadakan kelas masyarakat. (7) Membentuk “regu kerja” di kalangan SLA dan Universitas. Satu tahun kemudian dikeluarkan Instruksi Nomor 2 Tahun 1960 yang berisi Lima Perkembangan atau Pancawardhana. Dalam konteks ini, Pancawardhana tercatat dalam UNESCO untuk Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “*The Five Principles of Education*” maka dirumuskan sebagai berikut; (1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional dan internasional, serta keagamaan, (2) Perkembangan intelegensi, (3) Perkembangan emosional—artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir dan batin, (4) Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan, dan (5) Perkembangan jasmani. Berdasarkan lampiran dokumen Kurikulum 1964, ada beberapa poin penjelasan mengenai lima pokok perkembangan dalam sistem pendidikan nasional yaitu sebagai berikut⁴⁵;

Pertama, perkembangan moral nasional, internasional, dan keagamaan. Dalam memupuk perkembangan ini kita harus mendidik anak-anak menjadi manusia Pancasila yang mencintai tanah air dan bangsanya, manusia yang berkepribadian

⁴⁵ Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. 1964. *Rencana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud. hlm. 77.

Indonesia, manusia yang bertanggung jawab terhadap tercapainya masyarakat adil dan makmur, manusia yang selalu berusaha memajukan kesejahteraan bersama, manusia yang suka bergotong-royong, manusia yang berusaha memajukan persahabatan antar bangsa dan perdamaian dunia dan manusia yang cinta dan taat kepada Tuhan.

Kedua, perkembangan intelegensi. Dalam aspek perkembangan ini harus kita pupuk sebaik-baiknya sehingga anak-anak menjadi manusia yang cerdas dan cakap serta bertanggung jawab, antara lain untuk mencapai tujuan Revolusi Nasional kita. Kita tidak menginginkan anak-anak kita menjadi manusia yang cakap untuk memakmurkan diri sendiri dengan merugikan atau memeras orang lain. Kecerdasan dan kecakapan yang kita perembangkan haruslah digunakan untuk memajukan kesejahteraan bersama dan menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan prinsip Pancasila dan Manipol Usdek. Inilah yang harus kita tanamkan dalam jiwa anak-anak.

Ketiga, perkembangan emosional—artistik (rasa keharuan dan keindahan lahir dan batin). Atas dasar perkembangan ini kita membimbing anak-anak untuk dapat menciptakan atau sekurang-kurangnya dapat menikmati kesenian dan keindahan dalam segala bentuknya. Khususnya, kita mendidik anak-anak untuk menghargai, mencintai, dan memajukan kebudayaan dan kesenian kita sendiri. Di samping itu juga mengenal dan menghargai kesenian bangsa-bangsa lain, yang indah dan bermutu tinggi. Keduanya dapat pula merupakan alat untuk mengembangkan cinta tanah air dan bangsa sendiri dan untuk memajukan persahabatan antar bangsa.

Keempat, perkembangan *keprigelan*. Dalam usaha menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur, kita membutuhkan bukan hanya manusia yang bermoral tinggi (bersusila dan berbudi luhur), yang hanya cerdas dan cakap dan yang hanya dapat menikmati kesenian saja tetapi juga yang dapat mempergunakan kecekatan tangan di dalam kehidupan sehari-hari. Haruslah diperkembangkan sikap menghargai pekerjaan yang membutuhkan *keprigelan* tangan sebagaimana mereka menghargai pekerjaan yang terutama menggunakan otak.

Kelima, perkembangan jasmaniah. Perkembangan rohaniah (moral, kecerdasan dan lain-lain) jalin-berjalin dengan perkembangan jasmaniah. Kebahagiaan hidup tidak dapat sedikit bergantung kepada kesehatan jasmaniah. Salah satu syarat penting untuk dapat menciptakan masyarakat adil dan makmur ialah warga negara-warga negara kita yang sehat jasmani dan rohaninya.

Selanjutnya, diselenggarakan hari Krida atau hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap hari Sabtu. Semua kegiatan sekolah baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas menyesuaikan dengan instruksi di atas. Kemudian, Pancawardhana disempurnakan melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tertanggal 25 Agustus 1965.

2.3.1 Struktur Kurikulum 1964 Tingkat SD

Kurikulum 1964 tingkat SD memiliki dua macam struktur program. *Pertama*, sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar diberlakukan sampai kelas III. *Kedua*, sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar diberlakukan mulai dari kelas I. Adapun susunan program pengajaran diuraikan menjadi beberapa bahan pelajaran yaitu (1) Program Perkembangan Moral meliputi Pendidikan Kemasyarakatan (Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewargaan Negara), dan Pendidikan Agama/Budi Pekerti, (2) Program Perkembangan Kecerdasan meliputi Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, Berhitung, dan Pengetahuan Alamiah, (3) Program Perkembangan Emosional/Artistik meliputi Pendidikan Kesenian (Seni Suara/Musik, Seni Lukis/Rupa, Seni Tari, dan Seni Sastra/Drama), (4) Program Keprigelan meliputi Pertanian, Peternakan, Industri Kecil, Pekerjaan Tangan, Koperasi/Tabungan, dan Keprigelan lain, (5) Program Perkembangan Jasmani, meliputi Pendidikan Jasmani/Kesehatan. Kemudian, satu jam pelajaran di kelas I dan II adalah 30 menit, sehingga dalam waktu seminggu siswa memperoleh lama jam pelajaran sekitar 25 atau 26 jam; sedangkan kelas III sampai VI satu jam pelajaran adalah 40 menit, sehingga dalam waktu seminggu siswa memperoleh lama jam pelajaran selama 36 jam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel II.2 dan Tabel II.3.

Tabel II.2
Susunan Mata Pelajaran Rencana Pendidikan 1964
Sekolah Rakyat yang Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah
Di Kelas I sampai Kelas III

No	Wardhana/Bidang Studi	Kelas						Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	
I	PERKEMBANGAN MORAL							Kelas I dan II, 1 jam pelajaran: 30 menit; kelas III s.d Kelas VI: 40 menit.
	1. Pendidikan Kemasyarakatan (1)	1	2	3	3	3	3	
	2. Pend Agama / Budi Pekerti	1	2	2	2	2	2	
II	PERKEMBANGAN KECERDASAN							
	3. Bahasa Daerah	9	8	5	3	3	3	
	4. Bahasa Indonesia	-	-	6	8	8	8	
	5. Berhitung	6	6	6	6	6	6	
	6. Pengetahuan Alamiah	1	1	2	2	2	2	
III	PERKEMBANGAN EMOSIONAL/ARTISTIK							
	7. Pendidikan Kesenian (2)	2	2	4	4	4	4	
IV	PERKEMBANGAN KEPRIGELAN							
	8. Pendidikan Keprigelan (3)	2	2	4	4	4	4	
V	PENDIDIKAN JASMANI							
	9. Pendidikan Jasmani/Kesehatan	3	3	4	4	4	4	
	Jumlah	25	26	36	36	36	36	

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996

Keterangan: 1) Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, Kewargaan Negara

2) Seni Suara/Musik, Seni Lukis/Rupa, Seni Tari, Seni Sastra/Drama

3) Pertanian, Peternakan, Industri Kecil, Pekerjaan Tangan, Koperasi, dan Keprigelan lain

Tabel II.3

Susunan Mata Pelajaran Rencana Pendidikan 1964

Sekolah Rakyat yang Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia Mulai Kelas I

No	Wardhana/Bidang Studi	Kelas						Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	
I	PERKEMBANGAN MORAL							Kelas I dan II, 1 jam pelajaran: 30 menit; kelas III s.d Kelas VI: 40 menit.
	1. Pendidikan Kemasyarakatan (1)	1	1	4	4	4	4	
	2. Pend Agama / Budi Pekerti	1	2	2	2	2	2	
II	PERKEMBANGAN KECERDASAN							
	3. Bahasa Indonesia	9	8	9	9	9	9	
	4. Berhitung	6	6	6	6	6	6	
	5. Pengetahuan Alamiah	1	1	2	2	2	2	
III	PERKEMBANGAN EMOSIONAL/ARTISTIK							
	6. Pendidikan Kesenian (2)	2	2	4	4	4	4	
IV	PERKEMBANGAN KEPRIGELAN							
	7. Pendidikan Keprigelan (3)	2	2	5	5	5	5	
V	PENDIDIKAN JASMANI							
	8. Pendidikan Jasmani/Kesehatan	3	3	4	4	4	4	
	Jumlah	25	26	36	36	36	36	

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996

Keterangan: 1) Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, Kewargaan Negara

2) Seni Suara/Musik, Seni Lukis/Rupa, Seni Tari, Seni Sastra/Drama

3) Pertanian, Peternakan, Industri Kecil, Pekerjaan Tangan, Koperasi/Tabungan, dan Keprigelan lain

2.3.2 Struktur Kurikulum 1964 Tingkat SMP

Adapun susunan program pengajaran diuraikan menjadi beberapa bahan pelajaran yaitu (1) Kelompok Dasar meliputi Civics (Kewargaan Negara), Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti, dan Pendidikan Jasmani/Kesehatan, (2) Kelompok Cipta meliputi Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi Dunia, Sejarah Dunia, dan Ilmu Administrasi, (3) Kelompok Rasa/Karsa meliputi Menggambar, Kesenian, Prakarya, dan Kesejahteraan Keluarga, dan (4) Krida. *Pertama*, kelompok dasar adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk melahirkan warga negara yang berjiwa Pancasila dan berjiwa patriot paripurna serta sehat, kuat jasmaniah dan rohaniyah, *Kedua*, kelompok cipta adalah kelompok yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sehingga dapat mewujudkan tenaga kejuruan yang ahli. *Ketiga*, kelompok rasa/karsa adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan membiasakan anak didik memenuhi tuntutan sosial masyarakat Indonesia, supaya anak didik cinta keindahan. *Keempat*, krida adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk memupuk minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Mata pelajaran ini tetap berada di bawah bimbingan guru dan selanjutnya untuk mengembangkan karya yang berguna bagi peserta didik kelak dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel II.4.

Tabel II.4
Struktur dan Mata Pelajaran
Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru

Kelompok	Mata Pelajaran	Kelas dan Jam Pelajaran		
		I	II	III
A KELOMPOK DASAR	Civics	2	2	5
	Bahasa Indonesia	5	5	2
	Sejarah Kebangsaan	1	1	1
	Ilmu Bumi Indonesia	1	1	1
	Pendidikan Agama/Budi Pekerti	2	2	2
	Pendidikan Jasmani/Kesehatan	2	2	2
	Sub Jumlah	13	13	13
B KELOMPOK CIPTA	Bahasa Daerah	2	2	2
	Bahasa Inggris	4	4	4
	Ilmu Aljabar	3	3	3
	Ilmu Ukur	3	3	3
	Ilmu Alam	2	2	2
	Ilmu Hayat	2	2	2
	Ilmu Bumi Dunia	1	1	1
	Sejarah Dunia	1	1	1
	Ilmu Administrasi	1	1	1
Sub Jumlah	19	19	19	
C KELOMPOK RASA/KARSA	Menggambar	2	2	2
	Kesenian	1	1	1
	Prakarya	2	2	2
	Kesejahteraan Keluarga	1	1	1
	Sub Jumlah	6	6	6
D KRIDA	Krida	2	2	2
Jumlah		40	40	40

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996

2.3.3 Struktur Kurikulum 1964 Tingkat SMA

Adapun susunan program pengajaran diuraikan menjadi beberapa pelajaran yaitu (1) Kelompok Dasar meliputi Kewargaan Negara, Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan, (2) Kelompok Khusus meliputi Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Hikat, Sejarah, Bahasa Inggris, Bahasa Asing, Ekonomi dan Koperasi serta Menggambar, (3) Prakarya, dan (4) Krida. Kemudian, penjurusan dimulai dari siswa duduk di kelas II. Penjurusan dibagi menjadi Kelompok Khusus Budaya, Kelompok Khusus Sosial, Kelompok Khusus Ilmu Pasti, dan Kelompok Khusus Ilmu Pengetahuan Alam. Lebih detail, pengelompokan mata pelajaran dalam penjurusan dibagi menjadi lima, yaitu (1) Kelompok Dasar, (2) Kelompok Khusus Budaya/Kelompok Khusus Sosial/Kelompok Khusus Ilmu Pasti/Kelompok Ilmu Pengetahuan Alam, Budaya, (3) Kelompok Penyerta, (4) Prakarya, dan (5) Krida. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel II.5.

Tabel II.5
Ikhtisar Mata Pelajaran dengan Pembagian Jumlah Jam dalam Satu Minggu
Kurikulum 1964

Kelas I

A	Kelompok Dasar	Tahun I
1	Kewargaan Negara	2
2	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia	4
3	Sejarah Indonesia	1
4	Ilmu Bumi Indonesia	1
5	Pendidikan Agama/Budi Pekerti *)	2
6	Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan	3
Jumlah		13

*) Murid yang tidak mengikuti pelajaran Agama, harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti.

B	Kelompok Khusus	Tahun I
7	Ilmu Pasti	4
8	Ilmu Alam	3
9	Ilmu Kimia	3
10	Ilmu Hajat	2
11	Sejarah	2
12	Bahasa Inggris	3
13	Salah satu bahasa Timur atau bahasa Asing lainnya	2
14	Ekonomi dan Koperasi	2
15	Menggambar	2
Jumlah		23

C	Prakarya	2
---	----------	---

D	Krida *)	2
---	----------	---

Jumlah		2
--------	--	---

*) Tiap jam pelajaran yang diberikan untuk tiap jenis kegiatan dalam rangka Prakarya atau

Krida diperhitungkan sebagai jam pelajaran resmi.

Kelas II & III

Kelompok Khusus Budaya (BUD)

A	Kelompok Dasar		Tahun II	Tahun III
	1	Kewargaan Negeraan	2	2
2	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia	4	4	
3	Sejarah Indonesia	1	1	
4	Ilmu Bumi Indonesia	1	1	
5	Pendidikan Agama/Budi Pekerti *)	2	2	
6	Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan	3	3	
Jumlah		13	13	

*) Murid yang tidak mengikuti pelajaran Agama, harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti.

B	Kelompok Khusus BUD		Tahun II	Tahun III
	7	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia	2	2
8	Sejarah	4	4	
9	Ilmu Bumi	2	2	
10	Antropologi Budaya	1	1	
11	Bahasa Kawi	2	3	
12	Bahasa Inggris	4	4	
13	Ekonomi dan Koperasi	2	2	
Jumlah		17	18	

C	Kelompok Penyerta		Tahun II	Tahun III
	14	Menggambar	2	2
15	Salah satu bahasa Timur atau bahasa Asing lain	2	3	
16	Bahasa Daerah *)	2	2	
17	Pengetahuan Alam *)	2	2	
Jumlah		8	9	

D	Prakarya	2	-
---	----------	---	---

E	Krida *)	2	2
---	----------	---	---

Jumlah		42	43
--------	--	----	----

*) Tiap jam pelajaran yang diberikan untuk tiap jenis kegiatan dalam rangka Prakarya atau

Krida diperhitungkan sebagai jam pelajaran resmi.

Kelompok Khusus Sosial (SOS)

A	Kelompok Dasar		Tahun II	Tahun III
	1	Kewargaan Negeraan	2	2
2	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia	4	4	
3	Sejarah Indonesia	1	1	
4	Ilmu Bumi Indonesia	1	1	
5	Pendidikan Agama/Budi Pekerti *)	2	2	
6	Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan	3	3	
Jumlah		13	13	

*) Murid yang tidak mengikuti pelajaran Agama, harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti.

B	Kelompok Khusus SOS		Tahun II	Tahun III
	7	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia II	1	1
8	Sejarah Dunia dan Sejarah Perekonomian	2	1	
9	Ilmu Bumi Alam	2	2	
10	Bahasa Inggris	2	3	
11	Ilmu Pasti	2	3	
12	Tata Buku	2	3	
13	Ekonomi dan Koperasi	2	3	
Jumlah		17	18	

C	Kelompok Penyerta		Tahun II	Tahun III
	14	Menggambar	2	2
15	Salah satu bahasa Timur atau bahasa Asing lain	2	3	
16	Bahasa Daerah *)	2	2	
17	Pengetahuan Alam *)	2	2	
Jumlah		8	9	

D	Prakarya	2	-
---	----------	---	---

E	Krida *)	2	2
---	----------	---	---

Jumlah		42	43
--------	--	----	----

*) Tiap jam pelajaran yang diberikan untuk tiap jenis kegiatan dalam rangka Prakarya atau

Krida diperhitungkan sebagai jam pelajaran resmi.

Kelompok Khusus Ilmu Pasti (PAS)

A	Kelompok Dasar		Tahun II	Tahun III
	1	Kewargaan Negeraan	2	2
2	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia	4	4	
3	Sejarah Indonesia	1	1	
4	Ilmu Bumi Indonesia	1	1	
5	Pendidikan Agama/Budi Pekerti *)	2	2	
6	Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan	3	3	
Jumlah		13	13	

*) Murid yang tidak mengikuti pelajaran Agama, harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti.

B	Kelompok Khusus PAS		Tahun II	Tahun III
	7	Aljabar & Ilmu Ukur Analitika	2	3
8	Ilmu Ukur Sudut	1	1	
9	Ilmu Ukur Ruang	2	2	
10	Mekanika	2	2	
11	Ilmu Alam	4	4	
12	Ilmu Kimia	3	3	
13	Ilmu Hayat dan Kesehatan	2	2	
Jumlah		17	18	

C	Kelompok Penyerta		Tahun II	Tahun III
	14	Bahasa Inggris	2	3
15	Menggambar	2	2	
16	Ekonomi dan Koperasi *)	2	2	
17	Ilmu Bumi dan Ilmu Falak *)	2	2	
Jumlah		8	9	

D	Prakarya	2	-
---	----------	---	---

E	Krida *)	2	2
---	----------	---	---

Jumlah		42	43
--------	--	----	----

*) Tiap jam pelajaran yang diberikan untuk tiap jenis kegiatan dalam rangka Prakarya atau

Krida diperhitungkan sebagai jam pelajaran resmi.

Kelompok Khusus Ilmu Pengetahuan Alam (PAL)

A	Kelompok Dasar		Tahun II	Tahun III
	1	Kewargaan Negara	2	2
2	Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia	4	4	
3	Sejarah Indonesia	1	1	
4	Ilmu Bumi Indonesia	1	1	
5	Pendidikan Agama/Budi Pekerti *)	2	2	
6	Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan	3	3	
Jumlah		13	13	

*) Murid yang tidak mengikuti pelajaran Agama, harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti.

B	Kelompok Khusus PAL		Tahun II	Tahun III
	7	Ilmu Kimia	4	5
8	Ilmu Hayat dan Ilmu Kesehatan	3	2	
9	Ilmu Alam	4	4	
10	Aljabar dan Ilmu Ukur Analitika	3	3	
11	Ilmu Ukur Sudut	1	1	
12	Ilmu Ukur Ruang	1	1	
13	Mekanika	1	2	
Jumlah		17	18	

C	Kelompok Penyerta		Tahun II	Tahun III
	14	Bahasa Inggris	2	3
15	Menggambar	2	2	
16	Ekonomi dan Koperasi *)	2	2	
17	Ilmu Bumi dan Ilmu Falak *)	2	2	
Jumlah		8	9	

D	Prakarya	2	-
---	----------	---	---

E	Krida *)	2	2
---	----------	---	---

Jumlah		42	43
--------	--	----	----

*) Tiap jam pelajaran yang diberikan untuk tiap jenis kegiatan dalam rangka Prakarya atau

Krida diperhitungkan sebagai jam pelajaran resmi.

2.4 Kurikulum 1968

Maret 1966 lahirlah Orde Baru yang memiliki pandangan berbeda dari Orde Lama. Masa transisi ini merupakan salah satu pemicu lahirnya Kurikulum 1968. Pada era Orde Baru, Kurikulum 1968 di bawah kepemimpinan Soeharto. Kurikulum disesuaikan dengan TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, maka dirumuskan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol USDEK pada era Orde Lama. Sementara itu, pemurnian semangat Pancasila dianggap sesuai dengan kehidupan Orde Baru.

Sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 maka landasan pendidikan berdasarkan falsafah negara Pancasila. Adapun uraian lengkapnya di bawah ini.

1. Dasar Pendidikan Nasional dinyatakan dalam TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 2 yaitu Falsafah Negara Pancasila.
2. Tujuan Pendidikan Nasional dinyatakan dalam TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3 yaitu membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isinya.
3. Isi Pendidikan Nasional yaitu (1) Memperingati Mental, Moral, Budi Pekerti dan Memperkuat Keyakinan Agama, (2) Mempertinggi Kecerdasan dan Keterampilan,

dan (3) Membina dan Memperkembangkan Fisik yang Kuat dan Sehat dinyatakan dalam TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 4.

Seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Ketetapan MPRS menjadi penanda berubahnya pendidikan nasional dari Orde Lama menuju Orde Baru. Menurut Muhammad Rifa'i setidaknya terdapat dua hal, yaitu pembentukan manusia Pancasila sejati yang jelas dikaitkan oleh peristiwa tragis pasca G-30-S/PKI, ketika Orde Baru menuduh PKI sebagai pengkhianat Pancasila karena ingin mengubah Dasar Negara Pancasila menjadi komunis. Kemudian, yang kedua adalah mengubah mental masyarakat yang penuh doktrin-doktrin Manipol USDEK, yang merupakan kebijakan Soekarno⁴⁶.

Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan dalam Kurikulum 1964 berlaku singkat. Kemudian, tujuan dan kebijakan ini ditinggalkan. Terlebih lagi setelah meletusnya peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965. Dengan demikian, Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 dan Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan tujuan pendidikan yang bergeser dari titik tekannya, dari membentuk manusia sosialis, atas pengaruh Manipol, menjadi manusia Pancasila sejati.

Hal ini mengakibatkan seluruh pembagian mata pelajaran ke dalam kelompok-kelompok yang menjabarkan ide Manipol, seperti Pancawardhana dan Sapta Usaha Tama, atau kelompok mata pelajaran Rasa atau Karya yang bertujuan membentuk

⁴⁶ Muhammad Rifa'i. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 194.

Sosialisme Indonesia, diganti menjadi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu (1) Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, (2) Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan (3) Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus⁴⁷.

Tabel II.6

Gambaran Umum Tentang Kurikulum 1968

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat <i>Nation Building</i> dalam setiap proses pendidikan • Mengedepankan motto yang berbunyi “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya”
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang 1945 dan isinya.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966

Sumber: Diolah dari beberapa sumber, Februari 2017

Kurikulum 1968 dapat dikategorikan sebagai *correlated subject curriculum*. Artinya, kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar lain⁴⁸. Hal ini supaya mendapat perhatian sepenuhnya dari pengajar mata pelajaran pokok dan pula dari pengajar mata pelajaran yang ada sangkut pautnya. Pada para pelajar dengan demikian dapat ditanamkan pengertian adanya secara nyata hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain⁴⁹. Selain itu, salah satu semangat yang dikembangkan yaitu *nation building* dalam proses pendidikan. Hal ini

⁴⁷ Abdul Rachman Assegaf. *op. cit.*, hlm. 140.

⁴⁸ Suparlan. *op. cit.*, hlm. 57.

⁴⁹ Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan, dan Kursus-Kursus. 1968. *Rencana Pendidikan dan Pelajaran SMA*. Jakarta: tanpa penerbit. hlm. 8.

dapat dilihat dari dilarangnya seluruh sekolah asing masuk ke dalam negeri. Sementara itu, lembaga pendidikan melakukan penyederhanaan, baik jumlah maupun struktur.

2.4.1 Struktur Kurikulum 1968 Tingkat SD

Kurikulum 1968 tingkat SD memiliki dua macam struktur program. *Pertama*, sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar diberlakukan sampai kelas III. *Kedua*, sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar diberlakukan mulai dari kelas I. Adapun susunan program pengajaran diuraikan menjadi beberapa bahan pelajaran yaitu (1) Program Pembinaan Jiwa Pancasila meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Pendidikan Olahraga, (2) Program Pengetahuan Dasar meliputi Berhitung, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kesenian dan Kesejahteraan Keluarga, dan (3) Program Kecakapan Khusus meliputi mata pelajaran Pendidikan Khusus. Kemudian, satu jam pelajaran di kelas I dan II adalah 30 menit, sehingga dalam waktu seminggu siswa memperoleh lama jam pelajaran selama 28 jam. Sementara itu, kelas III sampai VI satu jam pelajaran adalah 40 menit, sehingga dalam waktu seminggu siswa memperoleh lama jam pelajaran selama 40 jam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel II.7 dan Tabel II.8.

Tabel II.7
Susunan Mata Pelajaran Rencana Pendidikan 1968
Sekolah Rakyat yang Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah
Di Kelas I sampai Kelas III

No	Kelompok/Segi Pendidikan	Kelas						Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	
I	PENDIDIKAN JIWA PANCASILA							Di kelas I dan II, 1 jam pelajaran= 30 menit. Di kelas III s.d Kelas V= 40 menit.
	1. Pendidikan Agama	2	2	3	4	4	4	
	2. Pendidikan Kewargaan Negara (1)	2	2	4	4	4	4	
	3. Pendidikan Bahasa Indonesia	-	-	6	6	6	6	
	4. Bahasa Daerah	8	8	2	2	2	2	
II	5. Pendidikan Olahraga	2	2	3	3	3	3	
	PEMBINAAN PENGETAHUAN DASAR							
	6. Berhitung	7	7	7	6	6	6	
	7. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	4	4	4	4	
	8. Pendidikan Kesenian	2	2	4	4	4	4	
III	9. Pend Kesejahteraan Keluarga	1	1	2	2	2	2	
	PEMBINAAN KECAKAPAN KHUSUS							
	10. Pendidikan Kejuruan (2)	2	2	5	5	5	5	
	Jumlah	28	28	40	40	40	40	

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996

Keterangan: 1) Mencakup Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics

2) Agraria (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)

Teknik (Pekerjaan Tangan, Perbengkelan

Ketataklasanan / Jasa (Tabungan dan Koperasi)

Tabel II.8

Susunan Mata Pelajaran Rencana Pendidikan 1968

Sekolah Rakyat yang Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia Mulai Kelas I

No	Kelompok/Segi Pendidikan	Kelas						Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	
I	PENDIDIKAN JIWA PANCASILA							Di kelas I dan II, 1 jam pelajaran= 30 menit. Di kelas III s.d Kelas V= 40 menit.
	1. Pendidikan Agama	2	2	3	4	4	4	
	2. Pendidikan Kewargaan Negara (1)	2	2	4	4	4	4	
	3. Pendidikan Bahasa Indonesia	8	8	8	8	8	8	
	4. Pendidikan Olahraga	2	2	3	3	3	3	
II	PEMBINAAN PENGETAHUAN DASAR							
	5. Berhitung	7	7	7	7	7	7	
	6. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	4	4	4	4	
	7. Pendidikan Kesenian	2	2	4	4	4	4	
	8. Pend Kesejahteraan Keluarga	1	1	2	2	2	2	
III	PEMBINAAN KECAKAPAN KHUSUS							
	9. Pendidikan Kejuruan (2)	2	2	5	5	5	5	
	Jumlah	28	28	40	40	40	40	

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996

Keterangan: 1) Mencakup Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics

2) Agraria (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)

Teknik (Pekerjaan Tangan, Perbengkelan

Ketataklasananaan / Jasa (Tabungan dan Koperasi)

2.4.2 Struktur Kurikulum 1968 Tingkat SMP

Adapun susunan program pengajaran yaitu (1) Program Pembinaan Jiwa Pancasila meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Olahraga, (2) Program Pengetahuan Dasar meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, dan Menggambar, dan (3) Program Kecakapan Khusus meliputi Administrasi, Kesenian, Prakarya, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. *Pertama*, Program Pembinaan Jiwa Pancasila berfungsi untuk membina dan mempertinggi moral Pancasila, UUD 1945, dan membina jasmani yang sehat dan kuat. *Kedua*, Program Pengetahuan Dasar berfungsi memberikan berbagai pengetahuan dasar yang berguna bagi peserta didik untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. *Ketiga*, Program Kecakapan Khusus berfungsi memberikan keterampilan praktis yang berguna bagi peserta didik untuk bekal hidup dalam masyarakat. Kemudian, lama jam pelajaran dalam waktu seminggu adalah 41 jam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel II.9.

Tabel II.9
Struktur dan Mata Pelajaran
Tahun 1968

Kelompok	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
A PEMBINAAN JIWA PANCASILA	1. Pendidikan Agama	3	3	3
	2. Pendidikan Kewargaan Negara	3	3	3
	3. Bahasa Indonesia (I)	3	3	3
	4. Olahraga	2	2	2
Sub Jumlah		11	11	11
B PEMBINAAN PENGETAHUAN DASAR	1. Bahasa Indonesia (II)	2	2	2
	2. Bahasa Daerah	2	2	2
	3. Bahasa Inggris	3	3	3
	4. Ilmu Aljabar	3	3	3
	5. Ilmu Ukur	3	3	3
	6. Ilmu Alam	3	3	3
	7. Ilmu Hayat	2	2	2
	8. Ilmu Bumi	2	2	2
	9. Sejarah	2	2	2
	10. Menggambar	2	2	2
Sub Jumlah		24	24	24
C PEMBINAAN KECAKAPAN KHUSUS	1. Administrasi	1	1	1
	2. Kesenian	2	2	2
	3. Prakarya	2	2	2
	4. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1
Sub Jumlah		6	6	6
Jumlah		41	41	41

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996

2.4.3 Struktur Kurikulum 1968 Tingkat SMA

Adapun susunan program pengajaran yaitu (1) Program Pembinaan Jiwa Pancasila meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Olahraga, (2) Program Pengetahuan Dasar meliputi Sejarah, Geografi, Ilmu Pasti, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Menggambar, dan Bahasa Inggris dan, (3) Program Pembinaan Kecakapan Khusus meliputi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Prakarya. Prakarya meliputi Kesenian, Bahasa, Keterampilan dan lain-lain. Kemudian, penjurusan dimulai dari siswa duduk di kelas II. Penjurusan dibagi menjadi dua, yaitu Jurusan Sastra Sosial Budaya dan Jurusan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam.

Pertama, jurusan Sastra Sosial Budaya meliputi mata pelajaran Bahasa dan Kesenian Indonesia Mengarang, Sejarah, Geografi dan Antar Budaya, Ekonomi, dan Koperasi, Menggambar, Bahasa Inggris, Ilmu Pengantar Budaya. *Kedua*, jurusan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam meliputi mata pelajaran Aljabar dan Analit, Ilmu Ukur Sudut, Ilmu Ukur Ruang, Fisika, Matematika, Kimia, Biologi, Geografi, Menggambar, dan Bahasa Inggris. Tiap kelas memiliki lama jam pelajaran yang berbeda-beda dalam waktu seminggu. Kelas I siswa memperoleh lama jam pelajaran selama 43 jam. Kelas II siswa memperoleh lama jam pelajaran selama 42 jam. Kelas III siswa memperoleh lama jam pelajaran selama 41 jam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel II.10.

Tabel II.10
Susunan Mata Pelajaran SMA
Tahun 1968

	Kelas	Sastra Sosial Budaya	Kelas		Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam	Kelas	
	I		II	III		II	III
Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila							
1. Pendidikan Agama	3		3	3		3	3
2. Pendidikan KWN	2		2	2		2	2
3. Bahasa Indonesia	3		3	3		3	3
4. Pendidikan Olahraga	3		3	3		3	3
Sub Jumlah	11		11	11		11	11
Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar							
1. Sejarah	3	1. Bhs & Kes. Ind Mengarang	4	4	1. Aljabar & Analit	3	3
2. Geografi	2	2. Sejarah	3	3	2. Ilmu Ukur Sudut	1	1
3. Ilmu Pasti	5	3. Geografi & Ant Budaya	3	3	3. Ilmu Ukur Ruang	2	2
4. Fisika	4	4. Ekonomi & Koperasi	3	3	4. Fisika	4	4
5. Kimia	3	5. Menggambar	2	2	5. Matematika	2	2
6. Biologi	3	6. Bahasa Inggris	4	4	6. Kimia	3	5
7. Ekonomi & Koperasi	2	7. Ilmu Peng. Budaya	2	2	7. Biologi	3	3
8. Menggambar	3	Sastra Budaya Sastra Sosial			8. Geografi	2	2
9. Bahasa Inggris		8. Bhs. Kawi Daerah Ilmu Pasti	2	2	9. Menggambar	2	2
		9. Sej.Keb.& Kesenian Peng. Dagang	1	2	10. Bahasa Inggris	3	3
		10. Ilmu Pasti Tata Buku	2	3			
Sub Jumlah	27		26	28		25	27
Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus							
1. Pend.Kesejahteraan Keluarga	2		2	-		2	-
2. Prakarya Pilihan:			1	-		1	-
a. Kesenian	1						
b. Bahasa							
c. Keterampilan							
d. Lain-lain	2		2	3		2	3
Sub Jumlah	5		5	3		5	3
Jumlah jam seminggu	43		42	42		41	41

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999

2.5 Penutup

Secara historis, sejarah pendidikan kita khususnya kurikulum tidak terlepas dari berbagai kepentingan politik penguasa. Rancangan dan pembuatan kurikulum hanya menjadi proyek tahunan yang kemudian akan habis masa berlakunya ketika periode kepemimpinan juga berakhir⁵⁰. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kurikulum disejalkan dengan kepentingan politik. Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 memiliki cerita masing-masing. Kurikulum 1964 lahir dari semangat sosialisme. Kurikulum 1964 tidak terlepas dari partai politik. Kekuatan empat partai (PNI, Masyumi, NU, dan PKI) itulah yang berusaha untuk memperebutkan pengaruhnya dalam kurikulum. Kurikulum 1968 juga didukung oleh kekuatan partai politik, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Masing-masing partai melakukan perebutan pengaruh dalam kurikulum. Di tahun antara 1964 dan 1968 PKI dan Golkar memiliki kesamaan modal politik dan sosial. Ketika terjadi transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968, Orde Lama mengalami keruntuhan pasca peristiwa G-30-S/PKI. Orde Baru segera mengambil alih kekuasaan negara dan menetapkan segala kebijakan pendidikan yang tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Yang awalnya tujuan kurikulum membentuk manusia sosialisme Indonesia atas pengaruh Manipol, menjadi membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan UUD 1945 dan isinya.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

BAB III

MOTIF DIBALIK PERUBAHAN KURIKULUM 1964 KE KURIKULUM 1968 DAN DINAMIKA PROSES PEMBELAJARAN

3.1 Pengantar

Kurikulum yang dibuat dan dijalankan oleh penguasa selalu terkait motif di dalamnya. Motif tersebut yang mempengaruhi terciptanya suatu kurikulum sesuai kemauan penguasa saat itu. Motif yang dimaksud adalah sosial, politik, dan ideologi. Ketiga motif itu tentu mempengaruhi proses produksi Kurikulum 1964 maupun Kurikulum 1968. Tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum merupakan produk politik dari kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kurikulum sebagai suatu produk tentu tidak dapat diberlakukan sepanjang zaman. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lias Hasibuhan yaitu kurikulum selalu mempunyai keterbatasan-keterbatasan menurut ukuran ruang dan waktu ketika kurikulum tersebut dimunculkan atau diberlakukan⁵¹.

Kurikulum merupakan komponen penunjang dalam proses pendidikan. Proses pendidikan pada masa-masa awal dilakukan oleh keluarga dan oleh masyarakat⁵². Dalam proses pendidikan yang berlangsung terjadi pula proses pembelajaran. Pendidik

⁵¹ Lias Hasibuhan. *loc. cit.*

⁵² Hamid Hasan. *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)*. http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf (diakses tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:17 WIB).

pertama dan utama adalah orang tua sedangkan anak sebagai peserta didik. Merekalah yang pertama-tama mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah, pengalaman tentang pergaulan manusiawi, dan kewajiban perkembangan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain⁵³. Segala aspek kehidupan seperti sosial, budaya, kepercayaan, cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, dan cara berbicara diwariskan kepada anaknya.

Perkembangan selanjutnya, masyarakat berkembang ke arah yang lebih kompleks. Banyak hal baru yang dibutuhkan oleh masyarakat demi melangsungkan hidup. Namun, tugas orang tua untuk mendidik anak membutuhkan bantuan masyarakat, karena masyarakat perlu mengatur kebutuhan hidup di dunia ini. Kondisi itulah yang melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang kita kenal dengan sekolah. Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah melibatkan berbagai komponen. Proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila guru dan peserta didik bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada bab ini, penulis akan menyajikan motif dibalik perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dan dinamika proses pembelajaran yang berlangsung pada Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dengan mengacu pada guru dan peserta didik.

⁵³ J. Drost, SJ. 1999. *Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 2.

3.2 Motif Kebijakan Politik Pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motif adalah alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu⁵⁴. Pada konteks ini, di balik kurikulum terdapat motif. Motif tersebut adalah sosial, politik, dan ideologi. Motif sosial berbicara mengenai bagaimana kurikulum membentuk kehidupan masyarakat yang diinginkan. Sementara itu, motif politik berbicara mengenai bagaimana kurikulum yang dijalankan selalu memiliki keinginan-keinginan tersembunyi. Terakhir, motif ideologi berbicara mengenai bagaimana kurikulum dipengaruhi oleh empat partai politik yang masing-masing partai membawa ideologi yang berbeda. Berikut ini adalah uraian lengkapnya.

3.2.1 Motif Sosial

Sosial merupakan asal usul dari kata sosio yang artinya pergaulan. Sosial adalah hal ihwal tentang pergaulan, hubungan antara seseorang dengan masyarakat dan sebaliknya, atau permasyarakatan⁵⁵. Berbicara mengenai masyarakat pada saat itu digolongkan menjadi dua yakni komunis dan anti komunis, seperti yang diutarakan oleh Abdul Syukur ketika diwawancarainya; “*masyarakat kita kan berubah. Dari masyarakat yang pro komunis menjadi anti komunis. Kan 65 itu kan antara orang komunis dan anti komunis. Kebetulan yang menang orang yang anti komunis*⁵⁶”. Pada konteks ini, adanya pergeseran masyarakat dari komunis menjadi anti komunis terjadi

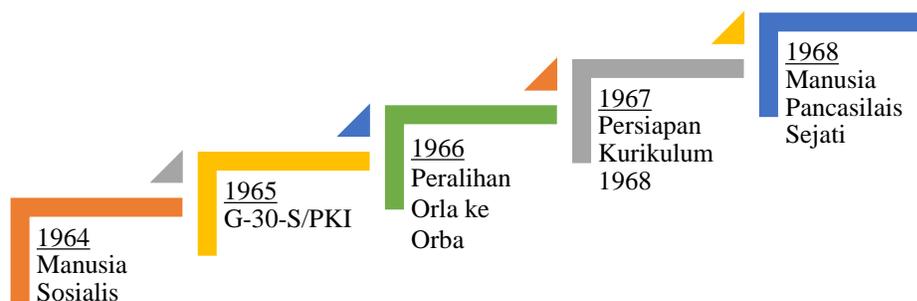
⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 593.

⁵⁵ Surjo Untoro. 1963. *Ensiklopedia Sosialisme*. Surabaya: Ksatria. hlm. 84.

⁵⁶ Kutipan wawancara dengan Dr. Abdul Syukur, M. Hum sebagai Koordinator Progam Studi Sejarah UNJ pada tanggal 7 Maret 2017.

dalam masa transisi 1966-1968. Pada perkembangannya, masyarakat anti komunis memperoleh kemenangan. Kemudian, ini yang kita sebut dengan masyarakat Orde Baru. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, masyarakat harus menerima segala bentuk kebijakan dan peraturan yang berlaku secara *taken for granted* pada tahun 1964 dan 1968. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat fase-fase perkembangan kurikulum sebagai salah satu kebijakan pendidikan yang berlaku pada tahun 1964 ke 1968 di dalam skema III.1.

Skema III.1
Fase Perkembangan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968



Sumber: Analisis Penulis (2015)

Dinamika proses perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dilihat secara historis ketika Prof. Dr. Prijono sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan tentang Sistem Pendidikan Pancawardhana. Sesuai dengan Keputusan TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 telah dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia sosialis Indonesia. Pada fase ini, Sistem pendidikan Pancawardhana bercorak politik tertentu dan telah bergeser dari

jiwa Pancasila. Sistem pendidikan Pancawardhana kemudian dianggap gagal dalam mencapai misinya karena telah membuahkan G 30 S/PKI⁵⁷. Dengan berakhirnya Orde Lama dan kegagalan pemberontakan G-30-S/PKI, hal ini menandakan adanya pergantian pemerintahan baru. Mulai tahun 1966 terjadilah peralihan masyarakat dari Orde Lama menuju masyarakat Orde Baru. Orde Baru selanjutnya berusaha membenahi sistem pendidikan termasuk kurikulum sesuai dengan TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, yakni merumuskan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan isinya.

Dengan demikian, perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 disebabkan oleh berubahnya rezim dari Orde Lama menuju Orde Baru dan berubahnya tujuan pendidikan nasional, seperti yang dinyatakan oleh Umasih ketika diwawancarainya⁵⁸;

“Pertama, rezimnya kan berubah. Yang kedua, tujuan pendidikannya juga berubah. Jadi, tujuan pendidikannya itu adalah membentuk warga negara yang Pancasila. Oleh karena itu, jelas semangat revolusioner seperti dalam 64 itu kan tidak ada. Sekarang harus berjiwa Pancasila”.

Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah baik Kurikulum 1964 maupun Kurikulum 1968 memiliki motif sosial di dalamnya. Motif sosial bertujuan untuk menciptakan kehidupan-kehidupan sosial yang diharapkan dari kurikulum. Pada Kurikulum 1964 motif sosial yang diharapkan adalah melahirkan warga negara sosialis

⁵⁷ Abrar. 2004. “Kurikulum Pendidikan Pancasila Sekolah Menengah Atas 1978-1993”. *Jurnal Sejarah Lontar*. Vol. 1 No. 1. hlm. 11.

⁵⁸ Kutipan wawancara dengan Dr. Umasih, M. Hum sebagai Dosen Kurikulum Sejarah UNJ pada tanggal 24 Mei 2017

Indonesia yang susila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia. Menurut Surjo Untoro, masyarakat sosialis Indonesia menggambarkan suatu masyarakat yang tertib, aman tenteram, dan sejahtera, dimana orang-orangnya ramah tamah, berjiwa kekeluargaan, bersemangat gotong royong serta kesadaran bekerja⁵⁹. Hal ini juga dijelaskan oleh Umasih ketika diwawancarai; *“dalam sistem pendidikan itu mendidik masyarakat punya jiwa patriotik dan revolusioner. Pokoknya membentuk manusia ke arah sosialismelah seperti itu karena waktu itu kan tren Indonesia ke arah komunisme⁶⁰”*.

Selanjutnya, pada Kurikulum 1968 motif sosial yang diharapkan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Pembukaan UUD Dasar 1945 dan isinya. Kurikulum 1968 didesain untuk melahirkan dan membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945⁶¹. Lebih lanjut, Umasih menambahkan ketika diwawancarai; *“proses dalam pendidikannya itu harus bisa mengamalkan butir-butir dalam Pancasila karena di situ jelas di Kurikulum 68 itu tujuan pendidikannya kan membentuk manusia*

⁵⁹ Surjo Untoro. *op. cit.*, hlm. 58.

⁶⁰ Kutipan wawancara dengan Dr. Umasih, M. Hum. *op. cit.*

⁶¹ Abrar. *op. cit.*, hlm. 11-12.

*Pancasilais bahkan bukan hanya Pancasila saja, Pancasila sejati*⁶². Dengan demikian, motif sosial pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 mengalami pergeseran dari yang awalnya membentuk manusia sosialis menjadi manusia Pancasila sejati.

3.2.2 Motif Politik

Kurikulum yang diciptakan penguasa sejak Orde Lama dan Orde Baru sebenarnya adalah rangkaian agenda tersembunyi agar kurikulum disejalankan dengan kepentingan politik. Artinya, di balik kurikulum terdapat keinginan-keinginan politik yang tersembunyi. Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu⁶³. Hal tersebut menjadi bukti politik bahwa kurikulum tidak pernah lepas dari cengkaman kepentingan politik⁶⁴. Sebuah kekuasaan—apabila ingin berhasil menjalankan masa kekuasaannya dalam waktu lama—harus mengendalikan pendidikan melalui kurikulum⁶⁵.

Pada konteks ini, Kurikulum 1964 maupun Kurikulum 1968 tentu memiliki motif politik. Pertarungan politik sangat mempengaruhi kemenangan kekuasaan suatu rezim tertentu. Dalam hal ini, Soekarno gagal memperoleh kemenangan sedangkan

⁶² Kutipan wawancara dengan Dr. Umasih, M. Hum. *op. cit.*

⁶³ M. Sirozi. 2007. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 37-38.

⁶⁴ Moh. Yamin. *Panduan Manajemen...op. cit.*, hlm. 17.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

Soeharto mencapai kemenangan dan meligitimasi kekuasaannya. Dengan demikian, sikap dan keyakinan politik masyarakat Indonesia sesuai dengan ideologi yang dibawa masing-masing setiap rezim. Dalam proses pembelajaran di sekolah, motif yang diinginkan oleh penguasa yakni agar seluruh *stakeholder* menjadi bagian dari kepentingan politik penguasa. Guru maupun peserta didik digiring untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam ideologi. Dengan demikian, penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya melalui kurikulum.

3.2.3 Motif Ideologi

Secara historis, negara ini telah mengalami pergantian kurikulum di era Soekarno dan Soeharto. Masing-masing kurikulum memiliki orientasi yang jelas berbeda. Dalam dunia politik, kurikulum tidak akan lepas dari sebuah ide besar yang akan dijalankan pada masanya. Ide besar bila dijelaskan secara mendalam dan mendetail akan terwujud dalam bentuk ideologi. Ideologi menentukan proses pelaksanaan sejumlah kebijakan dan program yang akan dijalankan. Sementara dalam pandangan Surjo Untoro bahwa ideologi yakni cita-cita bagaimana negara dan masyarakat diatur, yang sesuai dengan ideologinya⁶⁶. Bisa kita lihat kurikulum dari pasca kemerdekaan hingga saat ini banyak dipengaruhi oleh ideologi. Tentunya masing-masing ideologi dalam kurikulum yang dibawa setiap rezim jelas berbeda orientasinya.

⁶⁶ Surjo Untoro. *op. cit.*, hlm. 3

Orang-orang yang mempunyai persamaan cita-cita (ideologi) terhimpun dalam suatu organisasi, yang lazim disebut partai. Dalam hal ini yang dimaksud adalah partai politik⁶⁷. Di dalam internal parlemen terdapat empat partai politik besar. Keempat partai politik tersebut secara legal mendapat kursi di pemerintahan, yaitu (1) PNI, (2) Masyumi, (3) NU, dan (4) PKI. Seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing partai politik memiliki persamaan ideologi. Yang kemudian ideologi itu dimasukkan ke dalam ranah kurikulum, seperti yang diungkapkan oleh Ubedilah Badrun ketika diwawancarainya⁶⁸;

“Jadi, kontestasi politiknya berjalan, dinamika partai politik mempengaruhi kekuasaan juga cukup tinggi karena ada partai empat besar itu. Pada saat yang sama partai kan membawa ideologi. Makanya mereka berusaha untuk memasukkan ideologi mereka di dalam kurikulum”.

Wujud daripada golongan itu yakni aliran nasionalis, agama, dan komunis yang disebut dengan gagasan Nasakom. Beragam aliran tersebut kemudian disatukan oleh Soekarno sehingga keluarlah ideologi sosialis. Hal ini mengacu pada pidato Bung Karno yang berisi mempersatu seluruh daerah, seluruh lapisan bangsa, serta seluruh aliran ideologi⁶⁹. Dari sini jelas terlihat bahwa ideologi yang digunakan pada Kurikulum 1964 adalah ideologi sosialis. Dengan demikian, seluruh kebijakan pemerintah termasuk kurikulum harus mengacu pada sosialisme Indonesia. Istilah “sosialis” merupakan salah satu identitas pendidikan di zaman Orde Lama. Melalui

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

⁶⁸ Kutipan wawancara dengan Ubedilah Badrun, M.Si sebagai Dosen Sosiologi Politik UNJ pada tanggal 14 Maret 2017.

⁶⁹ Pidato tersebut pada tanggal...6 1945 dalam Surjo Untoro. *op. cit.*, hlm. 53.

istilah tersebut, kita bisa melihat bagaimana pertarungan politik dan ideologis saat itu dalam pemerintahan.

Hal tersebut menjadikan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh warna pertarungan politik dan ideologis saat itu, yaitu antara kubu kiri-sosialis-komunis, Soekarno sebagai kepala negara dan pemerintahan, kekuatan militer, serta kekuatan partai yang berhaluan agama, seperti NU-Masyumi⁷⁰, seperti yang dinyatakan oleh Ubedilah Badrun ketika diwawancarai⁷¹;

“Sehingga warna sosialisme di dalam kurikulum itu terlihat. Memang dinamika politiknya sangat kenceng pada tahun 64 itu, pertarungan dari empat ideologi politik itu, Nasionalis, Agama, NU, dan Komunis. Jadi, itu gambaran bahwa pada Kurikulum 64 itu dipengaruhi oleh dinamika politik yang sangat kuat”.

Lebih lanjut, salah satu partai terbesar di Orde Lama adalah PKI. PKI memiliki modal sosial dan politik yang cukup kuat. Sehingga PKI berusaha memasukkan ideologinya ke dalam Kurikulum 1964. Begitu juga dengan Kurikulum 1968 yang didukung oleh kekuatan partai politik di antaranya adalah Golkar, PDI, dan PPP. Dalam konteks ini, Golkar dibentuk untuk menandingi PKI. Golkar berdiri pada akhir pemerintahan Soekarno di tahun 1964 oleh Angkatan Darat. Pada Orde Baru Golkar berkembang menjadi partai politik yang besar dan memiliki banyak massa. Yang sebelumnya Golkar berdiri tanpa ada embel-embel partai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel III.1.

⁷⁰ Muhammad Rifa'i. *op. cit.*, hlm. 177.

⁷¹ Kutipan wawancara dengan Ubedilah Badrun, M.Si. *op. cit.*

Tabel III.1
Kekuatan-Kekuatan Politik Orde Baru

No.	Kekuatan Politik	Organ
1.	Golkar	1. Kooperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 4. Organisasi Profesi 5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 7. Gerakan Pembangunan
2.	PDI	1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 3. Partai Katolik 4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 5. Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
3.	PPP	1. Partai Nahdlatul Ulama (NU) 2. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) 3. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 4. Partai Islam Perti

Sumber: Analisis Penulis (2017)

PKI dan Golkar memiliki kekuatan sosial dan politik. Dalam hal ini, kurikulum menjadi ruang terjadinya kontestasi kekuasaan antara elite di dunia pendidikan dan politik. Perbedaan ideologi yang dibawa masing-masing partai mengakibatkan terpecahnya pengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Maka,

Kurikulum 1964 jelas terlihat warna sosialisme di dalamnya. Kondisi demikian dapat kita lihat juga pada Kurikulum 1968 yang orientasinya ke arah pembangunan dengan ideologi yang dikemas menggunakan istilah Pancasila. Dengan kata lain, strategi politik pendidikan yang dijalankan Soeharto menginternalisasikan ideologi Pancasila ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi dalam dunia pendidikan maka menjadi signifikan untuk memahami bagaimana ideologi ikut bermain dalam merumuskan kurikulum⁷².

3.3 Sistem Pembelajaran

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Wina Sanjaya mengenai karakteristik suatu sistem, yaitu 1) Setiap sistem pasti memiliki tujuan, 2) Sistem selalu mengandung suatu proses, 3) Proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai komponen⁷³. Sebut saja sistem pembelajaran yang memiliki komponen-komponen tertentu. Misalnya, subsistem pendekatan, subsistem strategi, subsistem metode, subsistem teknik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem? Sebab, pembelajaran adalah kegiatan yang memiliki tujuan dan kegiatan yang melibatkan

⁷² Moh Yamin. *Panduan Manajemen...op. cit.*, hlm. 110.

⁷³ Wina Sanjaya. 2009. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 47-48.

berbagai komponen. Oleh sebab itu, setiap komponen diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pembelajaran yang digunakan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 masih terbilang sederhana. Sebab, tidak ada subsistem pendekatan, subsistem strategi, subsistem metode, dan subsistem teknik. Keempat subsistem itu mulai berlaku di Kurikulum 1974 dan Kurikulum 1984. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Abdul Syukur ketika diwawancarai; “*kita belum pake ini. Kita tuh baru ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik di Kurikulum 1974 sama Kurikulum 1984 kayaknya. Kalo ini masih sederhana kurikulumnya yaitu nggak ada pendekatan, strategi, metode. Tidak rinci*⁷⁴”. Pada konteks ini, model pembelajaran yang digunakan oleh guru yakni *teacher centered*. Model pembelajaran ini berpusat pada guru sedangkan pola pembelajaran yang digunakan adalah ceramah.

3.4 Model Pembelajaran *Teacher Centered*

Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan peserta didik. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan pada aktivitas peserta didik⁷⁵. Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan⁷⁶. Pada

⁷⁴ Kutipan wawancara dengan Dr. Abdul Syukur, M.Hum. *op. cit.*

⁷⁵ Wina Sanjaya. *op. cit.*, hlm. 133.

⁷⁶ Roestiyah NK. 2008. *Startegi Belajar Mengajar: Salah Satu Unsur Pelaksanaan Strategi Belajar Mengajar: Teknik Penyajian*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 1.

Kurikulum 1964 maupun Kurikulum 1968, pola pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas adalah ceramah. Yang dimaksud dengan ceramah yaitu menyajikan materi pelajaran secara verbal dari guru kepada peserta didik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Abdul Syukur ketika diwawancarai; “*pola pembelajarannya ya monoton...ceramah*”⁷⁷”.

Dari kutipan wawancara di atas bahwa pola pembelajaran yang digunakan sejalan dengan model pembelajaran *teacher centered*. Proses pembelajaran dideskripsikan sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Eman Surachman ketika diwawancarainya; “*dalam proses pembelajaran peserta didik relatif pasif, karena dia hanya menerima transfer ilmu pengetahuan dari guru*”⁷⁸”. Namun, sesekali peserta didik diminta untuk mencatat materi pelajaran. Kondisi demikian disebabkan oleh sumber belajar yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, proses pembelajaran berlangsung satu arah yaitu dari guru sebagai pemberi materi pelajaran kepada peserta didik sebagai penerima materi pelajaran.

Dalam proses pembelajaran, peserta didik menempati posisi sebagai objek belajar. Artinya, peserta didik dianggap sebagai individu yang pasif. Peserta didik lebih banyak sebagai penerima pengaruh, sebagai pengikut, oleh karena itu disebutnya “peserta

⁷⁷ Kutipan wawancara dengan Dr. Abdul Syukur, M. Hum. *op. cit.*

⁷⁸ Kutipan wawancara dengan Dr. Eman Surachman, MM sebagai Dosen Manajemen Pembelajaran Sosiologi UNJ pada tanggal 10 Mei 2017.

didik” atau “terdidik” bukan pendidik (orang yang mendidik diri sendiri). Proses pembelajaran di kelas secara sederhana dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2
Proses Pembelajaran Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968

No	Unit Analisa	Keterangan
1.	Model Pembelajaran	<i>Teacher Centered</i>
2.	Pola Pembelajaran	Ceramah
3.	Guru	Sumber Belajar
4.	Peserta Didik	Objek Belajar
5.	Tujuan Pembelajaran	Tujuan akhir proses pembelajaran adalah memperoleh nilai-angka-angka

Sumber: Analisis Penulis (2017)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peserta didik hanya datang, duduk, mendengar, mencatat, dan menghafalkan materi pelajaran. Kondisi yang demikian akan mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Namun, dalam proses pembelajaran di kelas, aspek kognitif yang lebih dominan dibanding aspek yang lainnya. Maka dari itu, peserta didik dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Sebab, proses pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Menghafal tetap dianggap lebih penting daripada kemampuan memecahkan masalah⁷⁹, sehingga peserta didik pintar secara teoritis tetapi miskin aplikasi.

⁷⁹ Utomo Dananjaya. 2013. *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Nuansa Cendekia. hlm. 7.

3.5 Dinamika Guru Dalam Proses Pendidikan

Di dalam bab terdahulu telah dijelaskan terdapat empat partai politik besar yang masing-masing memiliki ideologi. Yang kemudian ideologi itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Tidak cukup dengan ‘mengobok-obok’ kurikulum tetapi bagaimana juga mendesain guru dan pemikirannya. Sebab, guru merupakan aktor penting dalam menjalankan kurikulum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ubedilah Badrun ketika diwawancarai; “*maka gurunya, pemikirannya, juga menjadi agenda penting, rebutan dari banyak ideologi itu. Banyak guru-guru dididik dengan cara komunis, dididik dengan cara sosialis, dididik dengan cara agama. Muncullah organisasi PGRI yang pro komunis dan tidak*⁸⁰”.

Secara historis, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan suatu organisasi persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. PGRI memiliki misi untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menegakkan pendidikan nasional, memperjuangkan kesejahteraan guru, dan mewujudkan profesionalisme guru. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945. Pada perkembangannya, PGRI diawali dengan Kongres Pendidik Bangsa pada tanggal 24-25 November bertempat di Sekolah Guru Puteri (SGP) Surakarta, Jawa Tengah. Dari kongres tersebut melahirkan PGRI. Di

⁸⁰ Kutipan wawancara dengan Ubedilah Badrun, M.Si. *op. cit.*

antara pendiri PGRI adalah Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali Marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono⁸¹.

Perjalanan PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) merupakan periode yang penuh dengan kepentingan dan intrik politik. Ketika itu, gejolak kehidupan politik sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Menurut H.A.R Tilaar bahwa PGRI telah disusupi oleh politik praktis dari PKI⁸². Pada konteks ini, PKI berusaha menanamkan pengaruhnya dalam organisasi ini pada Kongres VIII PGRI di Bandung tahun 1956. Perebutan pengaruh mencapai puncaknya pada Kongres X PGRI di Jakarta tahun 1962. Yang mengakibatkan terpecahnya PGRI menjadi dua kubu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abdul Syukur ketika diwawancarai; “*semua kelompok organisasi itu terbelah dua antara pro komunis dan anti komunis. Sebab, PGRI dikuasai oleh komunis makanya kurikulumnya jadi komunis*”⁸³.

PGRI yang dipimpin oleh Soebandinata yang anti terhadap komunis dikenal dengan PGRI Vak Sentral. Mereka mendukung sistem pendidikan berdasarkan Pancasila. Sementara itu, PGRI non Vak Sentral yang pro terhadap komunis di bawah pimpinan Prijono, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD & K) saat itu. Melalui PGRI non Vak Sentral sistem pendidikan akan dibelokkan arahnya berdasarkan komunisme dengan memperkenalkan konsep Pancacinta. Kemudian, pada tanggal 24 Agustus 1964, 27 orang karyawan P & K yang mempertahankan sistem

⁸¹ M. Rusli Yunus, dkk. 2003. *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 6-10 Juli 2003*. Jakarta: Pengurus Besar PGRI. hlm. 6.

⁸² H.A.R Tilaar. 2016. *Guru Kita: Artis Karakter dan Kecerdasan*. Yogyakarta: Lamalera. hlm. 62.

⁸³ Kutipan Wawancara dengan Dr. Abdul Syukur, M.Hum. *op. cit.*

pendidikan berdasarkan Pancasila dipecat. Rehabilitasi nama baik ke-27 karyawan tersebut barulah dilaksanakan di bulan Juni 1966 oleh Menteri P & K yaitu Ki Sarino Mangunpranoto. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel III.3.

Tabel III.3

Daftar Nama Karyawan P & K yang Dipecat Menteri Prijono Tahun 1964

No	Nama	Jabatan
1.	Tartib Prawirodiharjo	Pembantu Menteri Bidang Personel dan Organisasi
2.	Soejono Kromodimulyo	Pegawai Tinggi diperbantukan pada Biro Hubungan Luar Negeri
3.	Soeprapto Tjokrowiriono	Kepala Biro Perbelakan PDK
4.	Karim M. Duriat	Kabag Pembina Buku Pelajaran
5.	M.E. Subiandinata	Pengawas Pendidikan Guru
6.	Abdullah Zahri	Kepala Biro Urusan Sokongan
7.	Sutojo Mangunredjo	Kepala Biro Kesejahteraan Pegawai
8.	Sudiro Tjokrokusumo	Pegawai Tinggi, d/p Balai Pustaka
9.	R.M Sumodijono	Wakil Kepala Biro Urusan Sokongan
10.	Slamet I	Kadit Pend. Dasar dan Prasekolah
11.	Slamet II	Inspektorat Pend. Dasar/Prasekolah
12.	Ir. B. Hoo Kian Lam	Pegawai Tinggi d/p LAPIP
13.	Soetardjo Purwobroto	Direktur Yayasan Lektur
14.	P. Tirtopramono	Bekas Anggota Jawatan Pend. Umum
15.	Daniel Adnani	Pegawai Lembaga Bahasa Asing
16.	A.S Harahap	Inspektorat Pend. Dasar/Prasekolah
17.	Brotomuljono	Pengawas SMP pada Dikmenum
18.	Drs. Tarwotjo	Pegawai Direktorat Diknas
19.	A.H Harahap	Staf Menteri Bidang Pendidikan
20.	Ny. D. Titopranomo	Pengawas SMP pada Dikmenum
21.	Ny. Hajatoen Wasito	Kadit Pendidikan Kejuruan
22.	M.H Husein	Ka. Inspektorat Kewajiban Belajar
23.	Anisah Bekti	Pegawai Lembaga Bahasa Asing
24.	N. Kartini Prawirotenojo	Kaur pada Dit. Pendidikan Kejuruan
25.	Soebekti Dhirdjoseputro	Pegawai Lembaga Bahasa Asing
26.	Drs. Hamami Saaman	Ka. Lemb. Penyelidikan & Penelitian
27.	R.H.M Hidajat	Kepala Biro Pendidikan Asing

Sumber: M. Rusli Yunus, 2003: 38

Adanya penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guru secara keseluruhan, melainkan karena ambisi politik⁸⁴. Perpecahan dalam tubuh PGRI ini berakibat pada simpang siurnya proses pendidikan di sekolah⁸⁵. Sebab, masing-masing guru memiliki orientasi ideologi yang berbeda-beda. Kondisi demikian berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas. Guru memegang peranan yang sangat penting⁸⁶, sebagai sumber belajar (*learning resources*) bagi peserta didik. Peserta didik akan belajar dari apa yang keluar dari mulut guru yang dianggap baik dan bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa guru tahu segalanya dan peserta didik tidak tahu apa-apa. Artinya, guru memiliki kekuatan mutlak dan sumber dari segala sumber.

Oleh sebab itu, guru menjadi pusat segala-galanya, maka merupakan hal yang lumrah saja jika murid-murid kemudian mengidentifikasi diri seperti gurunya sebagai prototip manusia ideal yang harus ditiru dan digugu, harus diteladani dalam semua hal⁸⁷. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Abdul Syukur ketika diwawancarai; “*guru itu paling dominan di sekolah. Guru itu kalo sudah di kelas tidak ada lagi yang bisa mengatasi dia. Kan murid-murid semuanya patuh pada guru*⁸⁸”.

⁸⁴ M. Rusli Yunus, dkk. *op. cit.*, hlm. 34.

⁸⁵ H.A.R Tilaar. *Guru Kita...loc. cit.*

⁸⁶ Wina Sanjaya. *op. cit.*, hlm. 50.

⁸⁷ Paulo Freire. 1999. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. xi-xii.

⁸⁸ Kutipan Wawancara dengan Dr. Abdul Syukur, M.Hum. *op. cit.*

3.6 Penutup

Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 memiliki motif kebijakan politik pendidikan yaitu sosial, politik, dan ideologi. Ketiga motif itu menggambarkan sebuah rangkaian agenda tersembunyi agar kekuasaan bisa dipertahankan. Kurikulum dijadikan alat bagi penguasa untuk melancarkan segala program agendanya. Kurikulum merupakan salah satu komponen untuk menunjang proses pendidikan. Proses pendidikan awalnya disampaikan melalui orang tua dan masyarakat. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sedangkan anak sebagai peserta didik. Mereka yang mengajarkan segala aspek kehidupan. Dalam perkembangannya, masyarakat berkembang ke arah yang lebih kompleks. Tugas orang tua untuk mendidik anak membutuhkan bantuan masyarakat. Kondisi demikian melahirkan lembaga pendidikan yang disebut sekolah.

Perbedaan motif ideologi mengakibatkan terpecahnya pengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan pendidikan seperti pada Kongres X di Jakarta tahun 1962, PGRI terpecah menjadi dua kubu, PGRI Vak Sentral dan PGRI non Vak Sentral. Perpecahan tersebut berakibat pada simpang siurnya proses pendidikan di sekolah. Pada proses pembelajaran, guru memiliki peran sebagai sumber belajar. Peserta didik sebagai objek belajar. Sebagai objek belajar, kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya, bahkan untuk belajar sesuai dengan gayanya, sangat terbatas. Sebab, dalam proses pembelajaran segalanya diatur dan ditentukan oleh guru⁸⁹.

⁸⁹ Wina Sanjaya. *op. cit.*, hlm. 95.

BAB IV

KONSTELASI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN

KURIKULUM 1964 DAN KURIKULUM 1968

4.1 Pengantar

Bab sebelumnya sudah menjelaskan bahwa Kurikulum 1964 maupun Kurikulum 1968 memiliki motif kebijakan politik pendidikan di antaranya sosial, politik, dan ideologi. Berbagai motif itulah yang menyebabkan kurikulum mengalami perubahan silih berganti. Kurikulum yang berubah akan mengakibatkan pada simpang siurnya proses pembelajaran di sekolah. Pada konteks ini, peserta didik menjadi korban dari beragam kebijakan pendidikan melalui kurikulum yang tidak jelas arahnya. Selain motif, perubahan-perubahan kurikulum yang silih berganti disebabkan juga oleh kebijakan pendidikan yang mengalami perubahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kurikulum yang berubah erat kaitannya dengan kepentingan politik. Kebijakan politik di Indonesia selalu berpengaruh besar dan langsung bagi pendidikan nasional. Perubahan politik selalu menimbulkan perubahan kebijakan pendidikan⁹⁰.

Di bab ini, penulis akan membahas mengenai analisis konstelasi kebijakan politik pendidikan. Di dalamnya akan penulis ulas bagaimana alur kerangka konstelasi politik pendidikan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dengan menggunakan konsep

⁹⁰ Sunarso. 2012. "Perkembangan Politik Pendidikan di Indonesia (Kajian Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)". *Laporan Penelitian*. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. hlm. 2.

kurikulum dan ideologi dari Michael W. Apple. Kerangka konstelasi yang akan dianalisis dibagi menjadi tiga sub bab. Pertama, dinamika politik dan pergantian kekuasaan. Dalam sub bab ini akan dianalisis bagaimana konteks politik yang berlaku saat itu sehingga mempengaruhi kebijakan pendidikan melalui kurikulum. Kedua, dinamika ideologi yang berkembang. Pada sub bab ini akan dianalisis bagaimana sebuah ideologi turut mempengaruhi terciptanya kurikulum. Ketiga, Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dalam kerangka Michael W. Apple. Terakhir, penulis akan memberikan perbandingan secara umum pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968.

4.2 Dinamika Politik dan Pergantian Kekuasaan

Negara memiliki peran dalam pengaturan pendidikan melalui kurikulum. Dalam hal ini, telah lahir Kurikulum 1964 pada masa Orde Lama. Pasca Orde Lama tumbang, kurikulum mengalami perubahan dan ditetapkan Kurikulum 1968. Kurikulum 1964 maupun Kurikulum 1968 tidak terlepas dari dinamika politik yang ada. Secara historis, Kurikulum 1964 mengusung konsep sosialisme dalam pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia tahun 1964 dirumuskan melalui Penetapan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Bab I pasal 2 dari ketetapan ini berbunyi; “tujuan pendidikan nasional supaya melahirkan warga negara-warga negara sosialis Indonesia.” Hal ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang tertib, aman tenteram, dan sejahtera, dimana orang-orangnya ramah

tamah, berjiwa kekeluargaan, bersemangat gotong royong serta kesadaran bekerja⁹¹. Dengan meletusnya peristiwa G 30S/PKI menandakan berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Maka mulai tahun 1966 Indonesia memasuki masa pemerintahan yaitu Orde Baru untuk menuju ke kehidupan yang lebih menjanjikan dengan upaya pembangunan yang lebih realistis⁹². Dalam bidang pendidikan, tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966.

Peralihan Orde Lama menuju Orde Baru membawa berbagai macam dampak perubahan. *Pertama*, penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dan organisasi di bawahnya. Pada masa antara 1960 sampai 1965 memang merupakan kejayaan PKI dan pada masa itu banyak sekolah didirikan untuk menarik perhatian masyarakat dan untuk membina kader yang diperlukan⁹³. Tidak bisa dipungkiri, pendirian sekolah-sekolah itu tidak lepas dari upaya memperoleh kader-kader bagi PKI, atau setidaknya untuk memperluas pengaruh PKI⁹⁴. Ketika PKI gagal melakukan perebutan kekuasaan dan eksistensi PKI beserta segala ajaran komunis dinyatakan terlarang, maka sekolah yang didirikan juga dibubarkan.

Sekolah-sekolah di bawah naungan Badan Permuyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) seperti halnya sekolah Sadar Bakti (sekarang menjadi sekolah

⁹¹ Surjo Untoro. *loc.cit.* hlm. 58.

⁹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 110.

⁹³ *loc.cit*

⁹⁴ P. Swantoro. 2002. *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 345.

SMA Kartika IV-2) yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Jember diambil alih oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1965 karena dianggap sebagai sekolah yang dimiliki oleh partai terlarang⁹⁵. Lebih lanjut, mereka berhasil menyelenggarakan “Panti Pengetahuan Rakyat”, yang menyelenggarakan pendidikan setingkat SD di seluruh desa terutama di Jawa. Di tingkat kecamatan, mereka menyelenggarakan “Balai Pengetahuan Rakyat”, yang menyelenggarakan pendidikan setingkat SMP. Adapun di ibukota kabupaten dan provinsi, diselenggarakan “Mimbar Pengetahuan Rakyat”, yang menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Dan di level yang paling tinggi, PKI mendirikan beberapa universitas, yaitu Aliarchman Bachtarudin, Egom (Pertanian), Harjono (Perburuhan), dan IKIP (Keguruan) Kudjang di Bandung⁹⁶. Hal ini sama persis dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. M. Said bahwa kaum komunis telah mendirikan sekolah-sekolahnya sendiri, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi⁹⁷.

Kedua, tidak kurang dari 2000 guru Jawa Timur dan Jawa Tengah akhirnya menjadi anggota PKI, demikian pula kira-kira 580 orang guru SD dari Jawa Barat⁹⁸. Guru-guru yang terlibat menjadi anggota PKI dipecat oleh pemerintah. Pemerintah

⁹⁵ Nur Hidayah dan Retno Winarni. 2014. “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Pada Tahun 1998-2012”. *Publik Budaya*. Vol. 2 No. 2. hlm. 21 jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/download/1506/1235 (diakses tanggal 14 Juli 2017 pukul 12:55 WIB).

⁹⁶ Kenang Kelana, *op. cit.*, hlm. 64.

⁹⁷ M. Said. 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh Dengan Latar Belakang Kebudayaanannya*. Jakarta: Mutiara. hlm. 26.

⁹⁸ Umasih. 2014. “Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia”. *Jurnal Paramita*. Vol. 24 No. 1. hlm. 104.

segera merekrut kembali guru-guru baru yang mendukung Pancasila, seperti yang dituturkan oleh Abdul Syukur ketika diwawancarai⁹⁹;

“Kan PGRI banyak terlibat. Guru-guru banyak yang terlibat jadi komunis. Nanti guru-guru itu kan ada yang dibunuh ada yang ditangkap. Nah, nanti pemerintah bikin lagi kursus politik untuk para guru supaya mereka benar-bener pro pemerintah. Nanti guru-guru yang pro komunis itu langsung dipecat. Kan komunisnya kalah, guru-gurunya dipecat berarti pemerintah banyak kekurangan guru. Nah, nanti pemerintah merekrut guru-guru baru. Guru-guru lama juga dikursuskan. Nanti dipastikan guru-guru itu pro Pancasila.”

Ketiga, tujuan pendidikan bergeser dari penekanannya, yang semula membentuk manusia sosialis, atas pengaruh Manipol, sesuai Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia sosialis, menjadi manusia pancasilais sejati, sesuai TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Bab 1 pasal 3 menetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki seperti UUD 1945 dan isinya, sebagai upaya pemurniaan semangat Pancasila yang sesuai dengan kehidupan Orde Baru.

4.3 Dinamika Ideologi yang Berkembang

Ideologi merupakan kumpulan gagasan sebagai hasil refleksi pendapat kepentingan tertentu yang kemudian akan diwujudkan dalam sejumlah program atau kebijakan tertentu¹⁰⁰. Sejumlah kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pendidikan

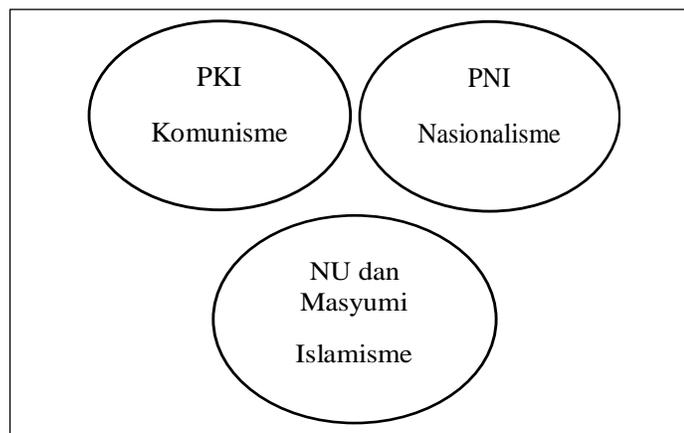
⁹⁹ Kutipan wawancara dengan Dr. Abdul Syukur, M. Hum. *op.cit.*

¹⁰⁰ Moh. Yamin. *Panduan Manajemen...op. cit.*, hlm. 106.

melalui kurikulum. Oleh sebab itu, bila kurikulum dikaitkan dengan ideologi maka tidak akan terlepas dari pesan-pesan yang disisipkan di dalamnya. Kurikulum 1964 menjadi ranah pertarungan dari banyaknya ideologi (lihat sub bab 3.2.3). Sebab, ideologi yang dibawa masing-masing partai jelas mempunyai orientasi yang berbeda. Partai-partai politik ketika itu alirannya dapat digolongkan atas ideologi-ideologi¹⁰¹. PNI misalnya, yang berhaluan Nasionalisme. Kemudian, Masyumi dan NU yang berhaluan Islamisme serta PKI yang berhaluan Komunisme.

Skema IV.1

Dinamika Ideologi



Sumber: Analisis Penulis (2017)

Dalam hal ini, kurikulum menjadi rebutan partai-partai politik saat itu. Pengaruh yang datang dari Barat seperti ideologi AS dan Uni Soviet juga berpengaruh pada terciptanya Kurikulum 1964. Sebab, saat itu Indonesia sedang mengalami perang dingin

¹⁰¹ Rusadi Kartaprawira. 1980. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 80.

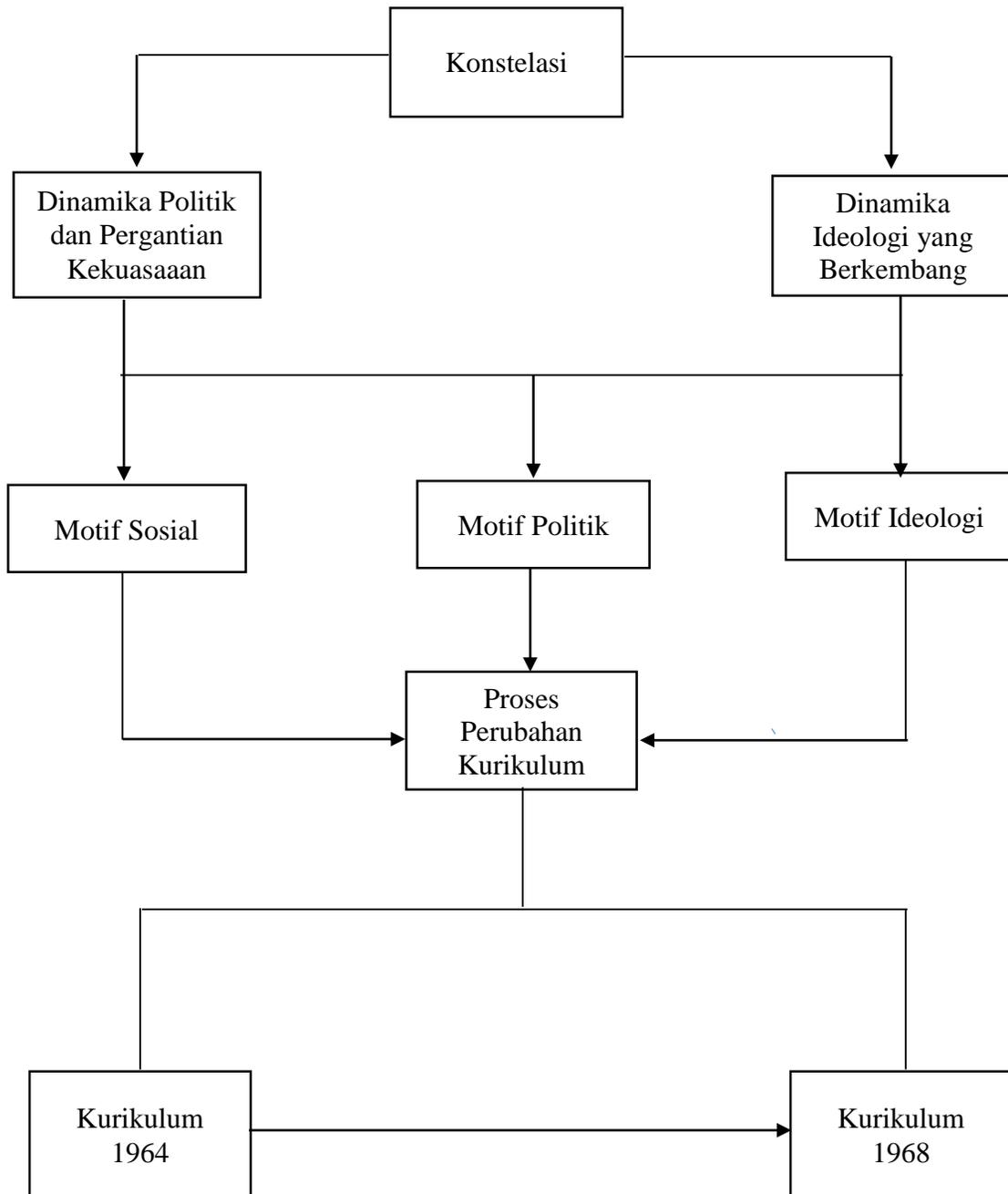
antara kedua negara tersebut. Yang masing-masing kedua negara mempunyai kepentingan terhadap Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Ubedilah Badrun ketika diwawancarai¹⁰²;

“Karena dunia sedang ngalami apa yang disebut dengan perang dingin antara kepentingan kekuatan global Uni Soviet dengan Amerika. Dan Uni Soviet punya kepentingan terhadap Indonesia, dan begitu juga Amerika. Maka kontestasi ideologi global yang kemudian masuk ke Indonesia itu menemukan momentumnya ketika tahun 60an itu. Maka warna kurikulum tahun 60an, terutama tahun 64 misalnya, itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan ideologi global yang menjadi perdebatan di antara elite politik termasuk di elite dunia pendidikan saat itu. Apa yang terjadi pada Kurikulum 64 itu refleksi dari pertarungan ideologi”.

Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia cenderung terbuka dengan berbagai ideologi baik ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Melalui dinamika ideologi yang beragam itulah masing-masing ideologi berupaya untuk memperluas pengaruhnya melalui kurikulum. Pertentangan ideologi mencapai puncaknya pada tahun 1965. Pendidikan nasional yang dikendalikan oleh pemerintah pusat tidak terlepas dari ombang-ambing pertentangan ideologi pada waktu itu. Proses indoktrinasi ideologi melalui pendidikan berjalan di semua tingkat dan jenis pendidikan pada waktu itu¹⁰³. Maka, warna Kurikulum 1964 yakni sosialis. Hal ini disebabkan pada masa pemerintahan Soekarno, seluruh ideologi yang ada disatukan kemudian timbullah ideologi sosialis sedangkan Kurikulum 1968 berideologi Pancasila dengan orientasiya ke arah pembangunan.

¹⁰² Kutipan wawancara dengan Ubedilah Badrun, M.Si. *op.cit.*

¹⁰³ H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 318.

Skema IV.2**Alur Konstelasi Politik Pendidikan 1964-1968**

Sumber: Analisis Penulis (2017)

4.4 Kurikulum 1964 dan 1968 dalam Kerangka Michael W. Apple

Apple mengatakan bahwa lembaga pendidikan berfungsi untuk menyebarkan nilai ideologis dan pengetahuan. Sebagai sistem lembaga, mereka membantu menghasilkan jenis pengetahuan (seperti barang dagangan) untuk mempertahankan dominasi ekonomi, politik, dan budaya yang ada. Ada tiga aspek program yang harus ditetapkan di awal sini: (1) sekolah sebagai lembaga, (2) bentuk-bentuk pengetahuan, dan (3) pendidik sebagai dirinya sendiri. Kenyataan di balik sekolah sebagai lembaga, bentuk-bentuk pengetahuan kita dilestarikan secara selektif, ditafsirkan ulang, dan didistribusikan, dan peran guru sebagai orang yang netral. Hal itu dijelaskan Apple¹⁰⁴;

“The reality behind schools as institutions, the knowledge forms we selectively preserve, reinterpret, and distribute, some of the categories we use to think about these things, and the role of the educator as ‘neutral’ participant in the large-scale results of schooling.”

Menurut pandangan Apple, kurikulum merupakan sebuah ruang di mana di dalamnya terjadi pertarungan antar kekuasaan dan antar aktor yang hidup dalam masyarakat untuk memproduksi, sekaligus memproduksi berbagai pengetahuan yang terkandung dalam bangunan kurikulum tersebut. Adanya pertarungan yang melibatkan berbagai aktor terjadi karena adanya aktor tertentu yang berkeinginan untuk mempertahankan dominasi dan pengaruhnya melalui kurikulum dalam sistem pendidikan¹⁰⁵.

Penulis menemukan bahwa pengetahuan yang diproduksi oleh Kurikulum 1964 dan 1968 merupakan pertarungan politik yang mempengaruhi ideologi suatu negara

¹⁰⁴ Apple. *op. cit.*, hlm. 11.

¹⁰⁵ Hidayat. *op. cit.*, hlm. 3.

dan memperkuat legitimasi kekuasaan suatu pemerintah. Pada konteks yang berbeda, Apple melihat banyak orang tampaknya setuju bahwa ideologi mengacu pada sistem gagasan, keyakinan, komitmen mendasar, atau nilai tentang realitas sosial. Interpretasi ruang lingkup ideologi sangat bervariasi. Secara fungsional, ideologi telah dievaluasi dalam sejarah sebagai bentuk kesadaran palsu yang mendistorsi citra realitas sosial seseorang dan menjalankan kepentingan kelompok dominan. Tradisi Marxist, menganggap peran utama ideologi sebagai dasar pembenaran kepentingan bagi pribadi, kelompok politik, kelompok ekonomi atau kelompok lain yang ada.

Kurikulum menjadi ruang terjadinya transformasi ideologi dan kekuasaan kelompok dominan dalam masyarakat¹⁰⁶;

“The study of the interconnections between ideology and curriculum and between ideology and educational argumentation has important implications for the curriculum field and for educational theory and policy in general”.

Dalam hasil penelitian bahwa Kurikulum 1964 banyak dipengaruhi oleh ideologi sosialis. Ideologi sosialis menekankan pada bagaimana negara dan masyarakat diatur sesuai dengan gagasan atau tumpuannya. Ciri khas Kurikulum 1964 ini yakni mengedepankan suatu gambaran manusia sosialis. Kurikulum ini dilansir pada saat Mendikbud diduduki oleh Prof. Dr. Prijono¹⁰⁷ pada kabinet Presiden Soekarno. Pada konteks ini, transformasi ideologi dilakukan oleh kelompok dominan. Yang dimaksud

¹⁰⁶ Apple. *op. cit.*, hlm 13.

¹⁰⁷ Prof. Dr. Prijono merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Presiden Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta pada Periode 14 Maret 1957—28 Maret 1966.

kelompok dominan yaitu kelompok yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar untuk menanamkan pengaruh kekuasaannya di sekolah.

Kelompok dominan—termasuk Presiden, golongan agama, nasional, dan komunis berusaha menyebarkan ideologinya melalui beberapa cara. *Pertama*, ideologi sosialis masuk melalui pengaruh partai politik ke dalam kalangan guru. Pada konteks ini, PGRI telah disusupi oleh PKI. PKI berusaha menanamkan pengaruhnya pada Kongres VIII PGRI di Bandung tahun 1956. Puncak perebutan pengaruh pada Kongres X PGRI di Jakarta tahun 1962. Kondisi demikian menyebabkan PGRI mengalami perpecahan menjadi dua kubu yaitu PGRI Vak Sentral dan PGRI non Vak Sentral (lihat sub bab 3.4). Artinya, negara menginginkan ada sebagian besar kalangan guru yang terlibat menjadi anggota PKI dan menyebarkan pengaruhnya di organisasi tersebut.

Kedua, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, tujuan ditetapkan sebagai berikut;

“Tujuan Pendidikan Nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara-warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, b) Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab, c) Kebangsaan, d) Kerakyatan, dan e) Keadilan Sosial seperti yang dijelaskan dalam Manipol Usdek.”

Pendeknya, tujuan pendidikan itu ialah membentuk manusia sosialis Indonesia. Dalam hal ini, sekolah tidak hanya mengontrol individu, tetapi juga membantu mengontrol makna. Makna dapat diartikan sebagai perilaku, ucapan, maupun praktik-praktik terselubung seperti ideologi. Pada konteks ini, sekolah melalui kurikulum mengharapkan peserta didik memiliki perilaku-perilaku sebagai berikut: (1)

Kepribadian dan Kebudayaan Indonesia, (2) Semangat Patriot Komplit, (3) Azas Pancasila, (4) Semangat Bergotong-Royong, (5) Jiwa Pelopor, (6) Susila dan Budi Luhur, (7) Kesadaran Bersahaja dan Mengutamakan Kejujuran, (8) Kesadaran Mendahulukan Kewajiban daripada Hak, (9) Kesadaran Mendahulukan Kepentingan Umum daripada Kepentingan Pribadi, (10) Kerelaan Berkorban dan Hidup Hemat, (11) Azas Demokrasi Terpimpin, (12) Azas Ekonomi Terpimpin, (13) Disiplin, (14) Kepandaian untuk Menghargai Waktu. (15) Cara Berfikir Rasional dan Ekonomis, dan (16) Kesadaran Bekerja untuk Membangun dengan Kerja Keras¹⁰⁸.

Ketiga, di bawah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Prof. Dr. Prijono mengeluarkan Instruksi Nomor 2 Tahun 1960 tentang Sistem Pendidikan Pancawardhana. Pancawardhana atau lima pokok perkembangan berisikan segi-segi sebagai berikut: (1) Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Kegamaan, (2) Perkembangan Intelegensi, (3) Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir dan Batin, (4) Perkembangan *Keprigelan* Tangan, serta (5) Perkembangan Jasmani¹⁰⁹ (lihat sub bab 2.3). Ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dalam pendidikan nasional yang sesuai dengan Manipol Usdek. Sistem pendidikan Pancawardhana juga dapat dilihat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 yang berbunyi¹¹⁰;

¹⁰⁸ Surjo Untoro. *op. cit.*, hlm. 57.

¹⁰⁹ Soeganda Poerbakawatja. 1970. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 420.

¹¹⁰ Arsip Nasional. *op.cit.*, hlm. 2.

“Pancawardhana memang sistem pendidikan yang telah direstui. Adapun pengkhususan-pengkhususan dalam melaksanakan sistem itu, ada pengkhususan Pancadarma, ada pengkhususan Islam, ada pengkhususan Katolik, ada pengkhususan Protestan, ada pengkhususan Budha, ada pengkhususan Hindu Bali, ada pengkhususan Pancacinta, dan sebagainya, hal ini memang diperkenankan, asal dasarnya dan isi moralnya Pancasila-Manipol Usdek.”

Pancawardhana sebagai sebuah ikhtiar konsep untuk membangun Pendidikan Nasional Indonesia. Juga Pancawardhana merupakan dokumen politik terkait Pendidikan Nasional Indonesia yang pernah ada¹¹¹. Pancawardhana tercatat dalam UNESCO untuk Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “*The Five Principles of Education*”. Sistem pendidikan Pancawardhana pada hakikatnya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi, serta bercorak nasionalistik yang memenuhi tuntutan Revolusi Indonesia yang sedang berjalan¹¹².

Berdasarkan Instruksi Nomor 2 Tahun 1960 yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. Prijono menyatakan bahwa diselenggarakannya hari Krida. Krida artinya berlatih. Hari Krida adalah hari untuk berlatih melakukan kegiatan yang terkait dengan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Kegiatan ini tentunya berada di bawah bimbingan guru. Dengan demikian, peserta didik dapat mengembangkan bakatnya dengan leluasa. Namun, dalam perkembangannya, sistem pendidikan Pancawardhana ini disusupi oleh politik tertentu, Umasih menyatakan¹¹³;

¹¹¹ Kenang Kelana. *op. cit.*, hlm. 41.

¹¹² Umasih. *op. cit.*, hlm. 107.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 111.

“Satu kelemahan yang disadari atau tidak oleh pemerintah, bahwa sistem pendidikan nasional yang resmi yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai pelaksana Pendidikan Pancasila dalam sistem Pancawardhana, ternyata mengundang peluang untuk dapat disusupi unsur lain yang membahayakan Pancasila, seperti yang telah dimanfaatkan oleh PKI dengan Pancacinta dan Panca Tingginya.”

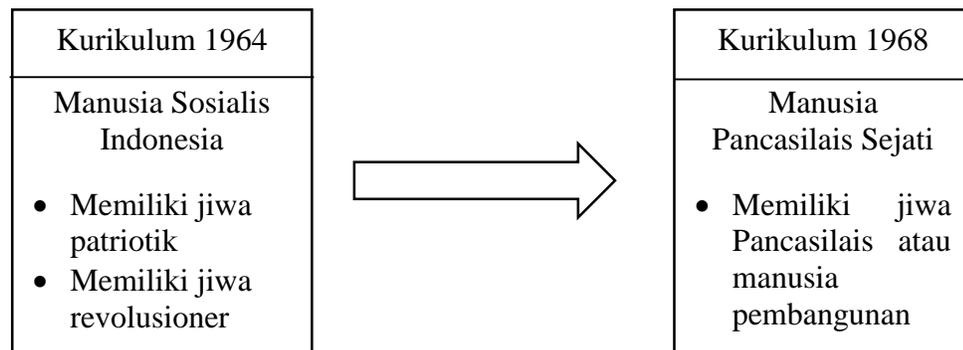
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Kurikulum 1964 banyak dipengaruhi oleh ideologi sosialis. Dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi termasuk di kalangan guru berupaya melahirkan manusia sosialis Indonesia. Pengetahuan dan kehidupan sehari-hari dikontrol oleh sekolah. Kelompok dominan—termasuk Presiden, golongan agama, nasional, dan komunis berupaya untuk melestarikan dan mendistribusikan pengetahuan formal mereka dengan cara menyebarkan ideologi sosialis dalam bentuk kurikulum sekolah. Pengetahuan yang benar-benar diajarkan di sekolah, seputar apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah secara sosial. Bentuk kontrolnya diberikan dalam prinsip, kode, dan terutama kesadaran dan praktik akal sehat yang mendasari hidup kita. Secara sederhananya, kelas dominan sebenarnya “mengontrol kesadaran” kelas terdominasi. Dengan demikian, individu yang ada di sekolah harus menerima pengetahuan yang disebarkan oleh kelompok dominan tersebut.

Pasca terjadinya peristiwa G 30S/PKI, pemerintah segera melakukan koreksi total di segala bidang termasuk pendidikan. Kondisi yang demikian memerlukan usaha-usaha agar pendidikan nasional sejalan dengan cita-cita Orde Baru. Kurikulum 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Kurikulum 1968. Ciri khas Kurikulum 1968 ini yakni mengedepankan suatu gambaran manusia Pancasila sejati. Pada konteks ini, pengetahuan yang telah diproduksi oleh Kurikulum 1964 mengalami

penafsiran ulang. Kurikulum 1968 tidak lagi menciptakan manusia sosialis Indonesia, tetapi menciptakan manusia Pancasilais sejati berdasarkan UUD 1945 dan isinya. Apple menyatakan bahwa, bahkan ketika kurikulum hanya digambarkan sebagai eksklusif pengetahuan teknis, netral, dan pragmatis, pengetahuan tetap inheren dengan politik¹¹⁴. Struktur kurikulumnya juga ikut mengalami perubahan. Struktur Kurikulum 1964 digambarkan dalam Tabel II.2, Tabel II.3, Tabel II.4, dan Tabel II.5. Struktur Kurikulum 1968 tercantum dalam Tabel II.7, Tabel II.8, Tabel II.9, dan Tabel II.10.

Skema IV.3

Perbedaan Tujuan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968



Sumber: Analisis Penulis (2017)

Melalui TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Bab 1 pasal 2 membicarakan tentang dasar pendidikan. Dinyatakan bahwa; “dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila”. Pasal 3 menetapkan bahwa; “tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan

¹¹⁴ Rakhmat Hidayat. 2013. *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 131.

ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945”. Pasal 4 membicarakan mengenai isi pendidikan, yaitu: *pertama*, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, *kedua*, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, dan *ketiga*, membina perkembangan fisik yang kuat dan sehat. Sedang pasal 5 membicarakan perlunya meninjau kembali peraturan pendidikan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 termasuk Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965¹¹⁵. Pada konteks yang berbeda, lahirnya undang-undang wajib mengajar karena saat itu jumlah tenaga pengajar sangat terbatas. Lebih tepatnya, ini ditujukan agar jumlah pengajar bisa bertambah banyak sehingga proses pendidikan dapat dilangsungkan dengan baik¹¹⁶.

4.5 Penutup

Sebagai bagian tak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan, maka dinamika perjalanan pembangunan atau pelaksanaan pendidikan nasional tidak pernah bebas dan dibebaskan dari “tarik menarik kekuatan dan kepentingan politik”. Bahkan boleh dikatakan selalu dalam suasana tarik-menarik kekuatan dan kepentingan politik¹¹⁷. Konstelasi kebijakan politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru mempengaruhi kurikulum. Kurikulum 1964 lahir ketika bangsa Indonesia sedang dalam suasana berevolusi. Kondisi yang demikian menyebabkan kurikulum menjadi alat untuk

¹¹⁵ Abdul Rachman Assegaf. *op. cit.*, hlm. 83.

¹¹⁶ Moh. Yamin. *Panduan Manajemen...op. cit.*, hlm. 124.

¹¹⁷ H.A.R Tilaar. 2012. *Pendidikan Nasional: Arah Ke Mana?* Jakarta: Kompas Media Nusantara. hlm. 3.

melaksanakan cita-cita revolusi nasional. Sebagai bangsa yang merdeka dan berkepribadian sudah tentu memiliki suatu gambaran manusia yang diinginkan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Slamet¹¹⁸ bahwa manusia yang kita cita-citakan ini dicari dalam ketentuan dasar kehidupan dan cita-cita kita sebagai bangsa yaitu: Pancasila dan Manipol Usdek serta perincian MPRS mengenai ciri-ciri manusia sosialis Indonesia.

Kurikulum 1968 lahir akibat sistem pendidikan Pancawardhana yang dianggap gagal dalam mencapai misinya dan membuahkan peristiwa G 30/S PKI. Pada konteks yang berbeda, Kurikulum 1968 menginginkan suatu gambaran manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dan isinya. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum mengalami perubahan seiring dinamika politik dan pergantian kekuasaan. Ini digambarkan ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru mengambil alih kekuasaan negara. Segala kebijakan pendidikan di masa Orde Lama segera diperbaharui sesuai dengan kepentingan Orde Baru. Kurikulum 1964 digantikan dengan Kurikulum 1968. Selain itu, beragam ideologi yang berkembang disebabkan oleh banyaknya partai politik pada tahun 1964-1968. Kekuatan partai politik di masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki ideologi yang berbeda-beda. Dengan demikian, ideologi itulah yang diperebutkan dan dimasukkan ke dalam ranah kurikulum. Berikut adalah perbandingan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dalam Tabel IV.1.

¹¹⁸ M. Slamet merupakan Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah di Kabinet Kerja Presiden Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta

Tabel IV.1
Perbandingan Antara Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968

Dasar Pendidikan	Kurikulum 1964	Pancasila sebagai dasar Pendidikan yang hanya dapat diinterpretasikan oleh Manipol Usdek.
	Kurikulum 1968	Mengacu pada falsafah negara Pancasila.
Tujuan Pendidikan	Kurikulum 1964	Membentuk manusia sosialis Indonesia.
	Kurikulum 1968	Membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isinya.
Struktur Mata Pelajaran	Kurikulum 1964	Struktur mata pelajaran dibagi menjadi lima, yaitu (1) Pengembangan Moral, (2) Pengembangan Kecerdasan, (3) Pengembangan Emosi (Artistik), (4) Pengembangan Keterampilan, dan (5) Pengembangan Jasmani.
	Kurikulum 1968	Struktur mata pelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, (2) Pembinaan Kecakapan Dasar, dan (3) Pembinaan Kecakapan Khusus.

Sumber: Analisis Penulis (2017)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 merupakan kebijakan politik pendidikan yang di dalamnya menghadirkan motif sosial, politik, dan ideologi. Kurikulum 1964 merupakan hasil revisi Kurikulum 1952. Kurikulum 1968 merupakan hasil revisi Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 merupakan transisi pada masa Orde Lama menuju Orde Baru. *Pertama*, motif sosial pada Kurikulum 1964 yaitu menghadirkan suatu gambaran manusia yang sosialis. Berbeda dengan Kurikulum 1968 yang ingin menciptakan manusia Pancasila sejati berdasarkan UUD 1945 dan isinya. *Kedua*, motif politik pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 menginginkan agar seluruh *stakeholder* menjadi bagian dari kepentingan politik. Pada konteks ini, guru maupun peserta didik digiring untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam ideologi. *Ketiga*, motif ideologi yang berkembang pada Kurikulum 1964 yakni nasionalis, agama, dan komunis. Gagasan ini disebut Nasakom. Melalui dinamika ideologi itulah timbul ideologi sosialis. Pada konteks yang berbeda, ideologi Pancasila berkembang pada Kurikulum 1968.

Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 melibatkan guru dan peserta didik dalam proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Ditinjau dari segi kalangan guru, pada

Kongres X di Jakarta tahun 1962, PGRI terpecah menjadi dua kubu. Pada konteks ini, PGRI yang dipimpin oleh Soebandinata anti terhadap komunis dikenal dengan PGRI Vak Sentral. Mereka mendukung sistem pendidikan berdasarkan Pancasila. Sementara itu, PGRI non Vak Sentral yang pro terhadap komunis di bawah kendali pimpinan Prijono, sistem pendidikan akan dibelokkan arahnya berdasarkan komunisme. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh PGRI mengakibatkan pada simpang siurnya proses pendidikan di sekolah. Ini disebabkan masing-masing guru memiliki orientasi ideologi yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran guru memiliki peranan yang penting. Guru berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Peserta didik menempati posisi sebagai objek belajar. Dalam hal ini, peserta didik lebih banyak menerima pengaruh dari guru dalam bentuk mendengarkan dan mencatat pelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah *teacher centered* dengan pola pembelajaran ceramah.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Kurikulum 1964 menuju Kurikulum 1968 dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, dinamika politik dan pergantian kekuasaan. *Kedua*, dinamika ideologi yang berkembang. Kedua hal ini ada pada masa transisi Kurikulum 1964 menuju Kurikulum 1968. Ketika Orde Lama tumbang, Orde Baru segera melakukan perbaikan di bidang pendidikan termasuk kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum menjadi ruang transformasi ideologi dan kekuasaan kelompok dominan. Ideologi sosialis pada Kurikulum 1964 yang telah disebarluaskan dan dilegitimasi kebenarannya oleh kelompok dominan melalui sekolah harus mengalami perubahan menjadi ideologi Pancasilais sejati. Sehingga, kurikulum

tidak hanya berfungsi sebagai instruksional pembelajaran saja tetapi juga menyebarkan pengetahuan dan ideologi yang dilegitimasi oleh kelompok dominan. Kelompok dominan ini termasuk Presiden, golongan agama, nasionalis, dan komunis. Kondisi yang demikian menyebabkan dasar pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, isi pendidikan, dan struktur mata pelajaran dan kurikulum pun mengalami perubahan.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk pemerintah agar secara terus-menerus mengkaji dan mengevaluasi kurikulum yang ada di Indonesia dengan membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini dapat dijadikan bahan pelajaran bagi kurikulum yang akan dirancang selanjutnya agar tidak terbau dari yang sifatnya non pendidikan seperti sosial, politik, dan ideologi. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Amnur, Ali Mahmudi. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima
- Apple, Michael W. 1990. *Ideology and Curriculum*. New York-London: Routledge
- Assegaf, Abdul Rachman. 2005. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Prapoklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Alam
- Basri. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Restu Agung
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dananjaya, Utomo. 2013. *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Freire, Paulo. 1999. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamalik, Oemar. 2009. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuhan, Lias. 2010. *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: GP Press
- Hidayat, Rakhmat. 2013. *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2013. *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hidayat, Sholeh. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Idi, Abdullah. 2011. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Kartaprawira, Rusadi. 1980. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru
- Luddin, R Muchlis. 2012. *Oligarki Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Bina Bangsa Nusantara
- Nasution, S. 1995. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

- NK, Roestiyah. 2008. *Strategi Belajar Mengajar: Salah Satu Unsur Pelaksanaan Strategi Belajar Mengajar: Teknik Penyajian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Salam, Burhanuddin. 1988. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara
- SJ, J Drost. 1999. *Proses Pembelajaran Sebagai Proses Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Said, M. 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh Dengan Latar Belakang Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara
- Sanjaya, Wina. 2009. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sirozi, M. 2007. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Supandi & Achmad Sanusi. 1988. *Kebijakan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK)
- Suparlan. 2011. *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Susetyo, Benny. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS
- Suwignyo, Agus. 2007. *Kurikulum dan Politik (Kebijakan) Pendidikan dalam Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Syaifudin. 2012. *Tan Malaka: Merajut Masyarakat dan Pendidikan Indonesia yang Sosialis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Swantoro, P. 2002. *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Poerbakawatja, Soeganda. 1970. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung
- Tilaar, H.A.R. 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- _____. 2016. *Guru Kita: Artis Karakter dan Kecerdasan*. Yogyakarta: Lamalera

- _____. 2012. *Pendidikan Nasional: Arah Ke Mana?* Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Untoro, Surjo. 1963. *Ensiklopedia Sosialisme*. Surabaya: Ksatria
- Wiyono, Teguh. 2010. *Rekonstruksi Pendidikan Indonesia: Selamatkan Pendidikan Kita dan Kembali ke Pendidikan Asli Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan di Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- _____. 2012. *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press
- Yunus, M Rusli, dkk. 2003. *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 6 Juli 2003*. Jakarta: Pengurus Besar PGRI

Jurnal dan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

- Abrar. 2004. "Kurikulum Pendidikan Pancasila Sekolah Menengah Atas 1978-1993". *Jurnal Sejarah Lontar*. Vol. 1 No. 1
- Hasan, Hamid. *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)*. http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf (diakses tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:17 WIB).
- Hidayat, Rakhmat. 2011. "Perspektif Sosiologi Tentang Kurikulum". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 17 No. 2
- _____. 2008. *Kurikulum Sebagai Kontestasi Kekuasaan: Critical Discourse Analysis Terhadap Kurikulum Sosiologi dan Buku Pelajaran Sosiologi SMA Berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 1984*. Tesis. Magister Sosiologi. Departemen Sosiologi. Universitas Indonesia, Depok (tidak dipublikasikan)
- Kelana, Kenang. 2014. *Kebijakan Pendidikan Panca Wardhana dan Politik Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Skripsi. Pendidikan Sejarah.

- Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta (tidak dipublikasikan)
- Silverius, Suke. 2004. "Masa Depan Kurikulum Masa Depan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun ke-10 No. 46
- Sunarso. 2012. *Perkembangan Politik Pendidikan di Indonesia (Kajian Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)*. Laporan Penelitian PKnH. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Syukur, Abdul. 2013. *Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis*. Disertasi. Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia, Depok (tidak dipublikasikan)
- Uce, Loeziana. 2016. "Realitas Aktual Praksis Kurikulum: Analisis Terhadap KBK, KTSP, dan Kurikulum 2013". *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Vol. 16 No. 2. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/596> (diakses tanggal 25 Januari 2017 pukul 06:44 WIB)
- Umasih. 2014. "Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia". *Jurnal Paramita*. Vol. 24 No. 1
- Winarni, Retno & Nur Hidayah. 2014. "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Pada Tahun 1998-2012". *Publik Budaya*. Vol. 2 No. 2 jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/download/1506/1235 (diakses tanggal 14 Juli 2017 pukul 12:55 WIB)

Dokumen-dokumen

- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. 1964. *Rencana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud
- Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan, dan Kursus-Kursus. 1968. *Rencana Pendidikan dan Pelajaran SMA*. Jakarta: tanpa penerbit

Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Penetapan Presiden

Republik Indonesia. 1989. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005

Republik Indonesia. 1965. Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005

Republik Indonesia. 1965. Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pdf, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Wawancara dan Diskusi

Dr. Abdul Syukur, M. Hum sebagai Koordinator Program Studi Sejarah UNJ (7 Maret 2017)

Ubedilah Badrun, M.Si sebagai Dosen Sosiologi Politik UNJ (14 Maret 2017)

Prof. H.A.R Tilaar sebagai Praktisi Pendidikan (27 Maret 2017)

Dr. Eman Surachman, MM sebagai Dosen Manajemen Pembelajaran Sosiologi UNJ (10 Mei 2017)

Dr. Umasih, M. Hum sebagai Dosen Kurikulum Sejarah UNJ (24 Mei 2017)

Draft Wawancara:

Ragam Konteks

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
2. Apa yang melatarbelakangi kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada saat transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?
3. Apa yang melatarbelakangi perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 dilihat dari motif sosial dan politik?

Kebijakan Pendidikan

1. Kebijakan pendidikan apa yang diambil pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
2. Apakah ada proses pro dan kontra terhadap kebijakan yang diajukan saat itu?
3. Apakah sebelum kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah diadakan uji publik yang memadai terlebih dahulu? (diuji/diusulkan/disahkan)
4. Bagaimana hasil setelah diadakan uji publik? (jika ada)
5. Apakah kebijakan pendidikan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 cenderung lebih elitis atau populis?
6. Bagaimana gambaran secara umum pendidikan Orde Lama dan Orde Baru?

Landasan Pendidikan

1. Apa landasan pendidikan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?

Ideologi

1. Ideologi apa yang menjadi landasan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?

Kelompok Organisasi Keguruan (PGRI)

1. Apa yang dimaksud PGRI Vak Sentral dan PGRI non Vak Sentral?

Produksi Kurikulum

1. Siapa saja agen yang terkait dalam proses produksi Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
2. Bagaimana berlangsungnya kontestasi kekuasaan dalam masa transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?

Orientasi Kurikulum

1. Apa kira-kira semangat yang dikembangkan dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968? Misalnya, Kurikulum 2004 mengungkap semangat demokrasi. Mohon penjelasan.

Kurikulum dan Politik Pendidikan

1. Seperti apa keterkaitan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dengan politik pendidikan?
2. Apakah benar Pendidikan Pancawardhana bergeser dari jiwa Pancasila dan digunakan sebagai alat politik tertentu? Mohon penjelasan.
3. Bagaimana dinamika politik dan ideologi yang terjadi pada masa transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?
4. Bagaimana isi jargon politis yang dikenal dengan trisakti revolusi Indonesia?

5. Bagaimana dinamika partai politik yang terjadi pada masa transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?
6. Bagaimana gambaran secara umum mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
7. Apa yang dimaksud Manggala Nasional dan Manggala Daerah?

Sistem Kebijakan, Rekrutmen, dan Peran Guru

1. Bagaimana kebijakan, sistem keguruan, dan rekrutmen guru dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
2. Bagaimana peran guru dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
3. Apakah ada panduan untuk guru dalam proses pembelajaran?

Sistem Pembelajaran

1. Bagaimana model pembelajaran yang diterapkan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
2. Bagaimana pola pembelajaran yang diterapkan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
3. Menitikberatkan pada konten/materi pelajaran apa dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
4. Bagaimana pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang digunakan dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?
5. Apa media dan sumber belajar yang dimanfaatkan oleh guru di kelas?
6. Di dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 terdapat dua struktur program yaitu sekolah yang menggunakan bahasa pengantar daerah di kelas I sampai kelas III, sedangkan sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Indonesia sejak kelas I. Apakah pada saat itu peserta didik memilih struktur mana yang ingin digunakan? Mohon Penjelasan.

Peran Siswa

1. Bagaimana peran siswa dalam Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?
2. Adakah panduan untuk siswa dalam proses pembelajaran?

Nilai yang Diteladani

1. Apa saja nilai-nilai pembelajaran yang dapat diteladani di zaman sekarang?

Kelebihan & Kekurangan

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?

Dampak Positif & Negatif

1. Apa dampak Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 terhadap kondisi sosial, politik, dan pendidikan?
2. Apa implikasi sosiologis dari Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?

Transkrip Wawancara

1. Wawancara dengan Dr. Abdul Syukur, M. Hum pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 14:00

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1.	Apa latar belakang kondisi sosial dan politik pada masa transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?	<p>Kurikulum itu dibuat pasti berpengaruh pada aspek sosial dan politik. Makanya kurikulum itu berbeda-beda tergantung situasinya. Nah, tahun 1964 kurikulum dibuat pada saat golongan komunis sedang kuat di Indonesia. Karena itu materi-materinya banyak yang dipengaruhi oleh komunis. Meskipun Kurikulum 1964 bukan kurikulum komunis ya tapi banyak dipengaruhi pas implementasinya. Kurikulum 1964 itu dibuat untuk menguatkan pemerintahan Soekarno. Nah, nanti tahun 1965 terjadi peristiwa politik. Kurikulum 1964 langsung dihentikan begitu ada peristiwa politik. Nah, trus ada kurikulum penyempurnaan. Itu yang disebut nanti Kurikulum 1968. Karena itu selalu dekatnya hubungan antara kurikulum dan politik. Pokoknya, ganti pemerintah pasti ganti kurikulum. Kemudian tahun 1965-1968 proses pergantian Soekarno ke Soeharto akhirnya diubahlah kurikulum. Ya, ada perubahan politik, kan ada perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Karena itu Kurikulum 1964 diganti dengan Kurikulum 1968. Karena kurikulumnya tidak cocok untuk pemerintahan Orde Baru. Nah, pemerintahan yang sah saat itu kan Pak Soeharto. Dimana-mana kurikulum itu kan berpihak kepada pemerintahan yang berkuasa karena kurikulum itu dibuat untuk menguatkan pemerintahan yang ada. Nggak boleh kurikulum dibuat untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada.</p> <p>Masyarakat kita kan berubah. Dari masyarakat yang pro komunis menjadi anti komunis. Kan 65 itu kan antara orang komunis dan anti komunis. Kebetulan yang menang orang yang anti komunis. Itu namanya alasan sosial politik. Kan nyampur, nggak usah ini politik</p>	Konteks sosial dan politik

		ini sosial. Nyampur jadi satu. Sudah tau kan tahun 65? Ada kudeta yang gagal. Kemudian terjadi pergantian pemerintahan. Selain pergantian pemerintahan juga masyarakat Indonesia yang tadinya masyarakat sosialis menjadi masyarakat yang anti komunis.	
2.	Apa latar belakang kondisi ekonomi dan budaya pada masa transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?	Ya, ekonomi kan kita menjadi ekonomi yang terbuka. Kita yang tadinya mau mandiri sekarang kita pinjam uang sama orang Barat tapi nggak ada kaitan langsung dengan kurikulum. Yang ada itu kalo kurikulum pengaruhnya politik sama sosial. Kalo budaya sama ekonomi hampir tidak ada. Ini pendapat para ahli kurikulum.	Konteks ekonomi dan budaya
3.	Kebijakan pendidikan apa yang diambil Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Kalo kebijakan kita lihat dari tujuan. Tujuan dari Kurikulum 1964 itu adalah membentuk masyarakat sosialis Indonesia. Sedangkan Kurikulum 1968 kan enggak, tujuannya kan membentuk masyarakat Pancasila. Jadi, tujuannya berbeda pasti berbeda kebijakan juga.	Kebijakan pendidikan
4.	Apakah ada proses pro dan kontra terhadap kebijakan yang diterapkan saat itu?	Kalo 1964 itu masyarakat terbelah dua. Ada yang Pancacinta ada yang Pancasila. Antara komunis dan non komunis. Kalo 1964 itu ada pro kontra karena memang situasinya memungkinkan ada muncul pro kontra. Tapi 1968 tidak ada karena kita baru saja ada trauma politik pemborontakan PKI. Jadi, siapapun yang menolak 1968 bisa dianggap pro PKI. Relatifnya 1968 tidak ada pro kontra.	Pro kontra kebijakan
5.	Apa kebijakan pendidikan yang akan diambil oleh pemerintah diadakan uji publik terlebih dahulu? (diuji/diusulkan/disahkan)	Pasti. Membuat kurikulum kan nggak hari ini selesai besok jadi. Kurikulum 1968 kan dibuat mulai dari 1966. Tiga tahun mereka buat. Baru nanti diperkenalkan Kurikulum 1968. Jadi, uji publik itu ada. Cuma yang menguji itu pejabat-pejabat. Nah, nanti penerapannya pasti ada uji coba. Dicoba di sekolah-sekolah. Itu yang dilakukan sama pemerintah Orde Baru. Orde Lama juga sama.	Uji publik kurikulum
6.	Apakah kedua kebijakan yang diambil cenderung lebih elitis atau populis?	Ya, dua-duanya buat populis. Dua-duanya kan buat masyarakat, buat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan kurikulum buat masyarakat bukan buat elit.	Dua kutub kebijakan

7.	<p>Apa landasan pendidikan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?</p>	<p>Landasannya pasti berbeda. Yang satu pake sosialisme yang satu pake pancasila, kan beda. Kalo yang Kurikulum 1964 kan pake sosialisme kalo yang Kurikulum 1968 pake Pancasila. Yang jelas landasannya berbeda.</p>	<p>Landasan pendidikan</p>
8.	<p>Apakah benar Pendidikan Pancawardhana bergeser dari jiwa Pancasila dan digunakan sebagai alat politik tertentu? Mohon penjelasan.</p>	<p>Ya, benar. Kalo 1964 benar ada perdebatan. Kenapa ada perdebatan? Karena kita masih menganut orang bebas bicara dan perdebatan itu mengarah menjadi pertarungan politik antara kekuatan komunis dan non komunis untuk membekali 64. Untuk sementara yang menang golongan komunis karena sangat kuat. Jadi, Kurikulum 1964 itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan golongan komunis. Karena mereka kuat secara politik dan sosial.</p>	<p>Kurikulum sebagai alat politik tertentu</p>
9.	<p>Ideologi apa yang dianut Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?</p>	<p>Ideologi Kurikulum 1968 Pancasila. Kalo yang satu lagi sosialisme.</p>	<p>Ideologi pendidikan</p>
10.	<p>Apa yang dimaksud PGRI Vak Sentral dan PGRI non Vak Sentral?</p>	<p>Semua kelompok organisasi itu terbelah dua antara pro komunis dan anti komunis. Yang pro komunis Vak Sentral itu. Yang non Vak Sentral itu anti komunis tapi yang paling kuat itu yang Vak Sentral. Sebab, PGRI dikuasai oleh komunis makanya kurikulumnya jadi komunis, kan PGRI pihak yang diundang pemerintah untuk legalitas sebuah kurikulum.</p>	<p>PGRI</p>
11.	<p>Siapa saja agen yang terkait dalam proses produksi Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?</p>	<p>Kurikulum itu kan pekerjaannya Menteri Pendidikan. Nanti dia akan melibatkan orang-orang kampus, orang-orang politik. Nah, nanti orang kampus kan pada saat itu berpolitik juga, dosen-dosennya. Banyak dosen-dosen yang pro komunis, yang anti komunis juga banyak. Unsur masyarakat juga dilibatkan. Masyarakat tuh masyarakat yang sudah terhimpun dalam sebuah organisasi. Kan nggak mungkin tukang becak suruh dengerin tentang kurikulum. Kalo profesi ya PGRI itu yang dilibatkan, masyarakat Muhammadiyah, masyarakat oganisasinya PKI atau NU yang di luar PKI. Itu yang disebut masyarakat.</p>	<p>Agen produksi kurikulum</p>
12.	<p>Bagaimana berlangsungnya kontestasi kekuasaan dalam masa</p>	<p>Awalnya itu kan PKI sangat kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Nah, kemudian terjadi peristiwa 1965. Itu kan kelompok komunis langsung hancur tahun</p>	<p>Kontestasi kekuasaan</p>

	transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?	1966. Nah, jadi konstelasinya begitu. Jadi, Kurikulum 1968 ini dibuat setelah golongan komunis mengalami kehancuran. Ada dua yang hancur, orang komunis dan golongan pro Soekarno. Nah, itu semuanya hancur tahun 1966-1967-lah muncul 1968.	
13.	Apa semangat yang dikembangkan dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Yang satu kan demokrasi dipimpin yang satu demokrasi pancasila. Kan sama-sama demokrasi.	Semangat yang diusung dalam kurikulum
14.	Seperti apa keterkaitan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dengan politik pendidikan?	Pastinya kurikulum itu instrumen, alat untuk mewujudkan politik pendidikan. Politik pendidikan itu ditentukan oleh pemerintah. Ya, memang kurikulum dibuat untuk kepentingan politik. Nggak ada kurikulum yang bertentangan dengan kepentingan politik pemerintah. Kurikulum 1964 dibuat untuk kepentingan politik Presiden Soekarno. Kurikulum 1968 juga sama untuk kepentingan politik Presiden Soeharto. Jadi, sama aja kurikulum di seluruh dunia dibuat untuk mendukung politik pemerintahan yang sah. Nah, makanya karena 1964 dan 1968 berbeda pemerintahannya politik pendidikannya juga berbeda. Siapa yang menciptakan politik pendidikan? Pemerintah. Pemerintah akan mewujudkan politik pendidikan itu lewat alat yang disebut kurikulum. Karena politiknya berbeda ya kurikulumnya juga harus berbeda. Politik pendidikan pemerintah Orde Baru tidak bisa diwujudkan dalam Kurikulum 1964. Karena itu harus diubah menjadi Kurikulum 1968.	Politik pendidikan
15.	Bagaimana kebijakan dan rekrutmen guru di dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Kan PGRI banyak terlibat. Guru-guru banyak yang terlibat jadi komunis. Nanti guru-guru itu kan ada yang dibunuh ada yang ditangkap. Nah, nanti pemerintah bikin lagi kursus politik untuk para guru supaya mereka bener-bener pro pemerintah. Nanti guru-guru yang pro komunis itu langsung dipecat. Karena guru-guru SD banyak terlibat komunis. Sebagian besar guru-guru itu masuk PGRI Vak Sentral. Nah, karena sudah ada komunis, kan komunisnya kalah, guru-gurunya dipecat	Sistem keguruan

		berarti pemerintah banyak kekurangan guru. Nah, nanti pemerintah merekrut guru-guru baru. Guru-guru lama juga dikursuskan. Ya, adalah namanya pelatihan tentang doktrin Pancasila. Pokoknya, siapa yang pro komunis akan hilang. Nanti dipastikan guru-guru itu pro Pancasila.	
16.	Bagaimana peran guru dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Guru itu paling dominan di sekolah. Guru itu kalo sudah di kelas tidak ada lagi yang bisa mengatasi dia. Kan murid-murid semuanya patuh pada guru. Makanya guru diperebutkan oleh politik karena posisinya strategis. Nah, guru kan sampai sekarang kan masih digunakan orang. Apalagi kalo pas mau pemilu. Paling nggak kan dia bisa mempengaruhi anak didiknya.	Peranan guru
17.	Apa model pembelajaran yang diterapkan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Modelnya sama masih <i>teacher centered</i> . Di sini guru masih pusat pengembangan. Pola pembelajarannya ya monoton, ceramah.	Model pembelajaran
18.	Menitikberatkan kepada konten/materi pelajaran apa dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Ya, tergantung. Kalo mata pelajarannya sejarah yang satu menekankan tentang keberhasilan Orde Baru dan memberantas komunis bahwa komunis itu salah. Itu dalam sejarah. Tapi kalo bidang lain saya nggak tau. Kalo bidang-bidang sosial pasti memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Kalo yang eksak saya nggak tau.	Materi pelajaran
19.	Bagaimana pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang digunakan dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Kita belum pake ini. Kita tuh baru ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik di Kurikulum 1974 sama Kurikulum 1984 kayaknya. Kalo ini masih sederhana kurikulumnya yaitu nggak ada pendekatan, strategi, metode. Tidak rinci.	Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran
20.	Di dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 terdapat dua struktur program yaitu sekolah yang menggunakan bahasa pengantar daerah di kelas I sampai kelas III, sedangkan sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Indonesia sejak	Iya, nanti di daerah-daerah tertentu yang bahasa Indonesiannya belum lancar pake bahasa daerah setempat. Kan bahasa Indonesia kan tidak semuanya bisa. Misal dari Papua. Makanya ada pake bahasa pengantar bahasa daerah itu sifatnya sementara. Biasanya di SD. Kalo di SMP sudah pake bahasa Indonesia. SD kan dibagi dua, ada SD kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah itu 1, 2, dan 3. Kelas tinggi itu 4, 5, dan 6. Nanti kelas 4 mereka	Sruktur kurikulum

	<p>kelas I. Apakah pada saat itu peserta didik memilih struktur mana yang ingin digunakan? Mohon penjelasan.</p>	<p>sudah harus pake bahasa Indonesia pengantarnya. Jadi, peserta didik tidak memilih. Pokoknya, pemerintah nih daerah sini nggak bisa bahasa Indonesia lalu pake bahasa setempat. Biar lebih <i>transfer of knowledge</i> bisa terjadi.</p>	
21.	<p>Bagaimana peran siswa dalam Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?</p>	<p>Siswa kan menganggap gurunya sumber ilmu pengetahuan baik 64 maupun 68. Yang disebut <i>teacher centered</i> kan itu. Apa kata guru itu yang benar. Kalo sekarang kan berusaha diubah nih. Apa kata buku, apa kata sumber. Jadi, guru bisa aja salah. Kalo dulu enggak, guru pasti benar.</p>	<p>Peranan siswa</p>
22.	<p>Adakah panduan untuk guru dan siswa dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?</p>	<p>Kalo untuk siswa nggak ada. Kalo untuk guru ada. Siswa baru Kurikulum 2013 aja tapi kurikulum sebelumnya panduannya hanya untuk guru.</p>	<p>Panduan siswa</p>
23.	<p>Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?</p>	<p>Ya, kalo kelebihan Kurikulum 1964 tujuannya jelas. Maksudnya lebih bagus daripada Kurikulum 1968 sebenarnya. Cuma karena memang orientasinya lebih banyak ke komunis. Tapi kalo Kurikulum 1968, ini kan kurikulum transisi jelas banyak kelemahannya. Sebenarnya Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 itu hampir sama. Materi-materinya sama cuma nanti kecenderungan komunisnya dihilangin jadi Pancasila.</p>	<p>Kelebihan kekurangan kurikulum</p>
24.	<p>Apa dampak Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 terhadap kondisi sosial, politik, dan pendidikan?</p>	<p>Ya, Kurikulum 1964 kan belum sempat diterapkan. Karena mau diterapkan sudah dilarang, Jadi, dampaknya belum keliatan terhadap siswa. Cuma konsep kan belum sempat diterapkan langsung ada perubahan politik. Kan 1964 baru uji coba. Tahun 1965 ada peristiwa politik. Tahun 1966 nggak jelas. Jadi kita selama 66-67-68 itu kurikulumnya sangat tidak jelas. Nanti kita baru jelas di 74. Kalo Kurikulum 1968 menghasilkan anak didik yang anti komunis dan pro terhadap pembangunan. Tidak mementingkan politik lagi. Lebih mementingkan pembangunan ekonomi. Itu dampak dari Kurikulum 1968.</p>	<p>Dampak kurikulum</p>

Transkrip Wawancara

2. Wawancara dengan Ubedilah Badrun, M.Si pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 12:45

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1.	Bagaimana dinamika politik dan ideologi yang terjadi pada masa transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?	<p>Jadi, episode tahun 60an itu adalah episode tidak hanya kontestasi politik. Itu sebagai kontestasi ideologi besar dunia. Karena dunia sedang ngalami apa yang disebut dengan perang dingin antara kepentingan kekuatan global Uni Soviet dengan Amerika. Dan Uni Soviet punya kepentingan terhadap Indonesia, dan begitu juga Amerika. Maka kontestasi ideologi global yang kemudian masuk ke Indonesia itu menemukan momentumnya ketika tahun 60an itu. Maka warna kurikulum tahun 60an, terutama tahun 64 misalnya, itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan ideologi global yang menjadi perdebatan di antara elite politik termasuk di elite dunia pendidikan saat itu. Apa yang terjadi pada Kurikulum 64 itu refleksi dari pertarungan ideologi.</p> <p>Latar belakang dinamika politik yang sangat ideologis, ya pertarungan kepentingan partai politik sehingga kurikulum yang diproduksi pada episode itu ya adalah kurikulum yang boleh saya sebut politis. Pada tahun 64 itu kan Soekarno ingin membuat keseimbangan ideologis di situ. Bagaimana dia menangkap komunis sebagian bagian dari bangsa ini, dan dia menangkap nasionalis sebagian dari bangsa, dan kelompok agama dari sebagian bangsa, lalu dia padukan. Sehingga warna sosialisme di dalam kurikulum itu terlihat. Memang dinamika politiknya sangat kenceng pada tahun 64 itu, pertarungan dari empat ideologi politik, Nasionalis, Agama, NU, dan Komunis. Jadi, itu gambaran bahwa pada Kurikulum 64 itu dipengaruhi oleh dinamika politik yang sangat kuat.</p> <p>Jadi, yang berpengaruh itu dinamika politik dan dinamika ideologi. Itu yang berperan besar di dalam konstruksi Kurikulum 64. Jadi, kontestasi politiknya berjalan, dinamika partai politik mempengaruhi kekuasaan juga cukup tinggi</p>	Dinamika politik dan ideologi

		<p>karena ada partai empat besar itu. Pada saat yang sama partai kan membawa ideologi. Makanya mereka berusaha untuk memasukkan ideologi mereka di dalam kurikulum. Karena itu menjadi sangat strategis kan. Dunia pendidikan pada saat itu tuh sangat dinamis, termasuk ada kebingungan <i>stakeholder</i> pendidikan baik guru, kepala sekolah, siswa karena kepentingan ideologis yang beragam itu. Puncaknya kemudian meletuslah peristiwa 30 September. Dan pendidikan menjadi korban dari kontestasi politik, pertarungan ideologi itu.</p> <p>Pasca G 30 September berubah kekuasaan, lalu muncullah rezim Baru, yang rezim baru itu anti rezim lama kemudian dengan keyakinan baru, cara pandang baru tentang Pancasila, maka kemudian kurikulum juga harus berubah. Jadi, perubahan kurikulum di Indonesia itu era tahun 64 dan 68 perubahan kurikulum yang sangat dengan kepentingan politik dan ideologi. Tahun 68 itu berarti ada dekontruksi ideologis yang selama itu dipraktekkan sejak Kurikulum 64. Dekonstruksi itu terjadi karena kemenangan Soeharto sebagai penguasa baru dan Soeharto itu dalam konstelasi politik global dia menjadi bagian dari kepentingan Amerika. Karena Soeharto menjadi kepentingan Amerika, maka seluruh praktek ekonomi, praktek politik, praktek pendidikan harus menggunakan <i>spirit</i> yang sama.</p>	
2.	<p>Bagaimana gambaran secara umum mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959?</p>	<p>Efek lanjut dari Pemilu 55 dan efek lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 59 yang menghadirkan demokrasi terpimpin. Dekrit Presiden 5 Juli 59 itu kan menunjukkan bahwa demokrasi liberal dihentikan oleh Soekarno karena demokrasi itu harus terpimpin. Terpimpin oleh siapa? Hanya oleh Soekarno dalam tanda petik.</p> <p>Meskipun Soekarno mengatakan terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi, episode demokrasi terpimpin dari 59 sampai munculnya Kurikulum 64 itu sentralisasi kekuasaan. Maka warna sentralisasi, model sosialisme pada Kurikulum 64 itu kuat. Jadi, pengaruh politiknya cukup kuat. Munculnya episode kontestasi partai, ideologi dan demokrasi terpimpin.</p>	<p>Dekrit Presiden 5 Juli 1959</p>

3.	Bagaimana dinamika partai politik saat itu?	<p>Pasca pemilu tahun 55 itu kan ada hegemoni politik pada empat partai penting yaitu Nasionalis, Masyumi, NU dan PKI. Dan mereka legal mendapatkan kursi di parlemen, resmi menjadi bagian dari pemerintahan. Karena ada juga menterinya yang berasal dari haluan komunis. Jadi gini, empat partai kan menguasai parlemen. Kemudian diakomodir oleh Bung Karno dari semua partai. Mengakomodir semua kepentingan partai itu dikerucutkan oleh Bung Karno dengan Nasakom.</p> <p>Menterjemahkan Naskom dalam praktek pendidikan itu dirangkum dalam bentuk masyarakat sosialisme Indonesia. Maka seluruh kebijakan yang terkait dengan kebijakan pemerintah itu harus merujuk pada sosialisme Indonesia, termasuk kurikulum. Sementara 68 yaitu rezim episode baru, rezim politik Orde Baru.</p>	Dinamika partai politik
4.	Bagaimana posisi guru dalam Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	<p>Nanti mereka juga menggarap guru-guru. Menggarap guru-guru yang revolusioner, guru-guru yang punya visi sosialisme. Kurikulum 64 yang merupakan produk politik dan pertarungan ideologi itu pada akhirnya kan kemudian mengalami dinamika yang luar biasa terkait dengan misalnya guru-guru yang beraliran komunis.</p> <p>Nanti ada itu serikat guru yang berafiliasi pada komunis. Itu derivasinya dari pertarungan dinamika politik dan ideologi yang berkembang di tingkat elite lalu mereka turunkan dalam kurikulum, mereka juga tidak cukup dengan mengobok-obok kurikulum, tapi juga bagaimana mendesain, karena aktor penting untuk menjalankan kurikulum itu adalah guru. Maka gurunya, pemikirannya, juga menjadi agenda penting, rebutan dari banyak ideologi itu.</p> <p>Banyak guru-guru didik dengan cara komunis, dididik dengan cara sosialis, dididik dengan cara agama. Muncullah organisasi PGRI yang pro komunis dan tidak. Memang mereka nanti afiliasi politik tuh. Ada afiliasinya ujung-ujungnya ke partai.</p>	PGRI

5.	Bagaimana konstruksi yang dibangun dalam Kurikulum 1964?	Mereka tidak menyebutkan bahwa Kurikulum 64 itu punya cita-cita komunisme tapi lebih menggunakan kata-kata ingin menciptakan manusia sosialis Indonesia, membangun sosialisme Indonesia dengan menciptakan sumber daya yang memahami apa yang dimaksud dengan masyarakat sosialis itu. Pada saat itu kan juga muncul perdebatan antara Nasional, Agama, Komunis (Nasakom) dan Bung Karno itu berpikir keras bagaimana menyatukan beragam ideologi itu dalam satu visi yang sama. Maka keluarlah visi sosialisme Indonesia itu. Jadi, visi sosialisme Indonesia itu sebetulnya produk berpikir kerasnya Bung Karno-lah karena dia merumuskan bagaimana sesungguhnya masyarakat Indonesia yang dicita-citakan dengan dasar Pancasila itu. Bagi Bung Karno ya masyarakat Pancasila adalah masyarakat sosialis. Masyarakat yang gotong-royong. Masyarakat yang peduli dengan sesama. Masyarakat yang ingin membangun Indonesia dalam soal ekonomi merata. Jadi, semangat sosialisme itu kemudian mempengaruhi konstruksi kurikulum tahun 64 itu. Karena itu pengaruh ideologi yang dikonstruksi oleh Bung Karno dengan menafsirkan Pancasila dengan konsep Nasakom dan konsep sosialisme Indonesia dikonstruksi dan diturunkan dalam kurikulum. Dan itu kan terlihat ya dalam kebijakan kurikulumnya. Oleh sebagian pengkritik Bung Karno itu dinilai ada ideologi komunis di dalam semangat Kurikulum 64.	Konstruksi kurikulum
6.	Bagaimana desain Kurikulum 1968?	Desain Kurikulum 68 melahirkan generasi pembangunan. Ideologi pembangunanisme ini kemudian diserap oleh penguasa. Konsep <i>developmentalism</i> itu kan konsep Amerika. Pasca perang dunia kedua muncul program Marshall Plan kan di Eropa? Di Asia muncullah pembangunanisme dengan ideologi yang dikemas dengan istilah Pancasila, menjalankan Pancasila dengan murni dan konsekuen meskipun prakteknya adalah untuk kepentingan kapitalisme global itu dikemas dengan cantik oleh Soeharto. Bagaimana memadukan antara implementasi	Desain kurikulum

		<p>Pancasila dan Orde Baru secara murni dan konsekuen dengan kapitalisme.</p> <p>Nah, di dunia pendidikan tidak ada jalan lain kecuali menciptakan generasi muda yang punya semangat pembangunan. Jadi, Kurikulum 68 itu kurikulum untuk memenuhi kebutuhan global, kebutuhan pembangunan bangsa, mengarah pada desain global. Maka di bidang ekonomi muncullah repelita. Kurikulum itu mengikuti repelita. Dunia pendidikan harus mengikuti repelita. Rencana pembangunan lima tahun pertama, kedua, ketiga sampai 25 tahun itu mau dibawa kemana Indonesia oleh Soeharto pada waktu itu. Maka Kurikulum sejak 1968 itu adalah orientasinya pembangunan. Nah, itu dalam tanda petik episode awal kemenangan Amerika di Indonesia.</p>	
--	--	--	--

Transkrip Wawancara

3. Wawancara dengan Prof. H.A.R Tilaar pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 16:00

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1.	Bagaimana jargon politis yang dikenal dengan trisakti revolusi Indonesia?	Trisakti yaitu berdaulat secara politik, jadi jangan kita didikte oleh bangsa lain, kita adalah bangsa merdeka. Kedua, berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Ketiga, mempunyai indentitas sebagai bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan trisakti ini menurut Bung Karno diperlukan revolusi mental.	Trisakti revolusi Indonesia
2.	Bagaimana gambaran umum pendidikan di Orde Lama dan Orde Baru?	Ya, kalo Orde Lama itu sih masih terlalu banyak politik di situ kan ya? Jadi, Orde Lama itu kan masih menghilangkan sisa-sisa daripada pendidikan kolonial. Jadi, masih pada masa pembinaan bangsa kita ini baru terlepas dari ya revolusi tahun 45. Itu masih kuat sehingga terasa kekuatan politik itu sangat keras pada waktu itu. Jadi, misalnya, sekolah-sekolah peninggalan Belanda itu masih hidup kemudian diganti menjadi sekolah-sekolah nasional. Nah, itu sih gapapa karena itu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tapi ketika Orde Lama itu berakhir ternyata buta huruf itu masih sangat tinggi karena tidak ada suatu program yang menyuruh mengenai bagaimana memberikan pendidikan kepada rakyat banyak, masih sangat terbatas. Nah, itulah yang menyebabkan lahirnya program-program Inpres. Ada Inpres SD, ada Inpres Kesehatan, ya macam-macam.	Gambaran pendidikan Orde Lama dan Orde Baru
3.	Apa yang dimaksud Manggala Nasional dan Manggala Daerah?	Dibentuk misalnya manggala-manggala. Manggala-manggala ini ada manggala nasional, ada manggala di daerah untuk memantapkan pancasila dan yang lain-lain dalam masyarakat terutama sekolah. Saya termasuk manggala nasional. Jadi, semacam indoktrinasi. Doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh Pak Harto itu disebarluaskan. Manggala nasional itu dilatih di Istana Bogor. Kemudian, di daerah dilakukan di daerah. Nah, sekarang	Manggala Nasional dan Daerah

		yang manggalanya sudah hilang kan? Karena itu terlalu politik, indoktrinasi.	
4.	Bagaimana orientasi Kurikulum 1964?	Orientasinya itu membangun nasionalisme.	Orientasi kurikulum
5.	Bagaimana keterhubungan politik pendidikan dengan kurikulum?	Saya nggak tau lah gimana hubungan antara politik dengan pendidikan. Tapi yang saya liat pendidikan itu terlalu banyak dicampuri oleh kepentingan politik praktis. Tidak terlepas pendidikan itu dari sosial politik dan ekonomi.	Politik pendidikan
6.	Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kedua Kurikulum?	Ini sulit karena pergantian kurikulum itu harus dimulai dengan evaluasi terhadap apa yang sedang berjalan. Ini tidak pernah kita lakukan, nggak pernah. Karena pergantian kurikulum itu merupakan suatu tindakan politik. Artinya, profesionalisme guru itu tidak dihargai. Jadi, yang menentukan adalah politikus. Dia yang menentukan jalan dan arahnya pendidikan. Tapi itulah yang terjadi, profesionalisme guru tidak dihargai. Kemudian penghargaan sosial masyarakat menurun.	Kelebihan kekurangan kurikulum

Transkrip Wawancara

4. Wawancara dengan Dr. Eman Surachman, MM pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 08:30

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1.	Bagaimana sistem keguruan yang diterapkan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	<p>Berkaitan dengan kebijakan politik Orde Baru dalam bidang pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuknya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum level pendidikan dasar dan menengah. 2. Masuknya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 3. Diterapkannya penataran P4 (Pedoman Pengayatan dan Pengamalan Pancasila), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik baru dari SD ke SMP diharuskan mengikuti penataran P4 satu minggu, yang dilakukan pada saat masa pengenalan sekolah. b. Peserta didik baru dari SMP ke SMA diharuskan mengikuti penataran P4 dua minggu pada saat masa pengenalan sekolah. c. Mahasiswa baru dari SLTA ke Perguruan Tinggi diwajibkan mengikuti P4 selama tiga minggu, pada saat pengenalan kampus. <p>Semua itu dilakukan dalam rangka membangun karakter semangat nasionalisme dan patriotisme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Di Perguruan Tinggi diadakan mata kuliah kewiraan sebagai mata kuliah pembentukan nasionalisme dan patriotisme. 5. Secara politis, guru melalui organisasi PGRI diwajibkan menjadi anggota Golongan Karya (Golkar). PGRI secara otomatis menjadi bagian dari partai Golkar, sehingga pada saat pemilihan umum guru-guru tidak punya pilihan lain kecuali memilih Golkar. 	Sistem keguruan
2.	Bagaimana dinamika guru dalam kegiatan proses pembelajaran?	Kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, aktivitas proses pembelajaran berada pada guru. Sementara peserta didik dalam posisi	Guru dalam proses pembelajaran

		pasif, hanya datang, duduk, dengar, catat, dan hapalkan.	
3.	Apakah ada panduan untuk guru dalam proses pembelajaran?	Panduan pembelajaran untuk guru tentu ada karena menjadi tugas dinas pendidikan untuk memberikan panduan pembelajaran bagi guru.	Panduan guru
4.	Bagaimana dinamika peserta didik dalam proses pembelajaran? Yang dilihat dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik?	Dalam proses pembelajaran, peserta didik relatif pasif, karena dia hanya menerima transfer ilmu pengetahuan dari guru.	Peserta didik dalam proses pembelajaran
5.	Bagaimana peran peserta didik dalam proses pembelajaran?	Peserta didik hanya berperan sebagai penerima transfer ilmu pengetahuan dari guru.	Peran peserta didik
6.	Apa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas?	Model pembelajaran lebih banyak didominasi oleh metode ceramah, sekali-kali peserta didik disuruh mencatat materi pelajaran karena sumber belajar sangat terbatas.	Model pembelajaran
7.	Apa pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas?	Pola pembelajaran berlangsung satu arah yaitu dari guru sebagai pemberi materi pelajaran kepada peserta didik sebagai penerima materi pelajaran.	Pola pembelajaran
8.	Apa media dan sumber belajar yang dimanfaatkan oleh guru di kelas?	Media pembelajaran yang digunakan guru hanyalah papan tulis hitam, kapur tulis, dan kalau ada gambar dari objek pembelajaran tertentu.	Media dan sumber belajar
9.	Apa saja nilai-nilai pembelajaran yang dapat diteladani di zaman sekarang?	Nilai-nilai karakter peserta didik pada saat itu, peserta didik lebih disiplin, lebih patuh pada guru, hampir tidak ada kenakalan remaja karena tidak ada faktor-faktor lingkungan yang sifatnya negatif, yang mempengaruhi peserta didik.	Nilai-nilai yang dapat diteladani
10.	Apa implikasi sosiologis dari Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?	Secara sosiologis, kontribusi masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang turut berperan serta dalam membangun gedung sekolah, dengan memberikan sumbangan lahan untuk gedung sekolah atau menyumbangkan material yang lain. Di sisi lain masyarakat juga menunjukkan tanggung jawabnya dalam membangun karakter anak yaitu antara lain dalam bentuk memberikan pelajaran agama di rumah-rumah atau di surau / masjid.	Implikasi sosiologis

Transkrip Wawancara

5. Wawancara dengan Dr. Umasih, M. Hum pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 12:15

No	Pertanyaan	Jawaban	Taksonomi
1.	Bagaimana dinamika proses perubahan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968?	Kenapa berubah dari 64 ke 68 itu? Pertama, rezimnya kan berubah. Yang kedua, tujuan pendidikannya juga berubah. Jadi, tujuan pendidikannya itu adalah membentuk warga negara yang Pancasila. Oleh karena itu, jelas semangat revolusioner seperti dalam 64 itu kan tidak ada. Sekarang harus berjiwa Pancasila.	Dinamika perubahan
2.	Apa yang melatarbelakangi perubahan Kurikulum 1964 dilihat dari motif sosial?	Karena adanya perubahan tujuan pendidikan nasional pasca peristiwa G 30 S/PKI. Kalo sebelumnya tujuan pendidikan nasionalnya itu mencetak manusia sosialis. Kemudian 68 itu nanti tujuan pendidikannya itu membentuk warga negara yang demokratis. Dalam sistem pendidikan itu mendidik masyarakat punya jiwa patriotik dan revolusioner. Pokoknya membentuk manusia ke arah sosialismelah seperti itu, karena waktu itu tren Indonesia ke arah komunisme.	Motif sosial Kurikulum 1964
3.	Apa yang melatarbelakangi perubahan Kurikulum 1968 dilihat dari motif sosial?	Proses dalam pendidikannya itu harus bisa mengamalkan butir-butir dalam Pancasila karena di situ jelas di Kurikulum 1968 itu tujuan pendidikannya kan membentuk manusia Pancasila bahkan bukan hanya Pancasila saja, Pancasila sejati. Jadi, manusia Indonesia yang Pancasila itu seperti apa sih? Manusia yang dalam praktik kehidupannya melaksanakan seperti dalam ideologi negara, Pancasila. Nanti kan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa itu apa saja? Selain bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, dan sebagainya, itu kan Pancasila.	Motif sosial Kurikulum 1968
4.	Apa yang melatarbelakangi perubahan Kurikulum 1968 dilihat dari motif politik?	Motif politik meluruskan kembali kepada tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, ya kaitannya dengan kehidupan politiknya ya itu segala pembangunan pendidikan itu ya harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang sebelumnya pada 64 itu kan disusupi komunisme. Semua pembangunan termasuk	Motif politik Kurikulum 1968

		pembangunan pendidikan itu kan ke arah Pancasila.	
5.	Kebijakan apa yang diambil pada Kurikulum 1964?	Kebijakan kan bisa peraturan perundang-undangan, bisa kebijakan tidak tertulis, bisa peraturan menteri atau bisa jadi kebijakan sekolah karena pada saat itu kan otonomi sekolah luar biasa. Sekolah kan bisa ngatur dirinya sendiri. Kebijakan sekolah digiring ke arah sosialisme.	Kebijakan pendidikan Kurikulum 1964
6.	Kebijakan apa yang diambil pada Kurikulum 1968?	Kebijakan sekolah digiring ke arah membentuk warga negara Pancasila sejati.	Kebijakan pendidikan Kurikulum 1968
7.	Siapa saja agen yang terkait proses produksi Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968?	Yang memfasilitasi bukan memproduksi. Yang memfasilitasi itu Pusat Kurikulum dan Perbukuan tapi sebelumnya itu namanya Pusat Kurikulum saja. Itu tuh yang memfasilitasi mereka tapi yang bekerja ya ahli kurikulum dan ahli pendidikan. Trus siapa sajanya ya tiap periode beda. Itu kan ada Keputusan Menterinya.	Agen produksi kurikulum
8.	Seperti apa keterhubungan antara kurikulum dengan politik pendidikan?	Iya memang harus begitu. Apa yang dilakukan dalam pendidikan itu kan merupakan hasil keputusan politik. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu nggak mungkin lepas dari produk politik karena keputusannya, SK Presidennya, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri. Nah, itu kan semuanya produk-produk politik. Jadi nggak bisa pendidikan jalan sendiri, sistem politiknya itu kemudian tidak mengayomi. Dalam penyelenggaraan pendidikan itu berbicara mengenai politik pendidikan.	Kurikulum dengan politik pendidikan

INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

No.	Urutan dan Judul Bab	Fokus Bab	Struktur Bab
1.	BAB I PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian tentang Kurikulum 2. Kurikulum dan Ideologi Michael W. Apple 3. Kajian tentang Politik Pendidikan 4. Metode Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Masalah 2. Permasalahan Penelitian 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4. Tinjauan Penelitian Sejenis 5. Kerangka Konseptual 6. Metode Penelitian 7. Keterbatasan Penelitian 8. Sistematika Penulisan
2.	BAB II KURIKULUM 1964 DAN KURIKULUM 1968 DALAM POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingin mengetahui dinamika pendidikan dari Orde Lama menuju Orde Baru (1945-1968) 2. Ingin mengetahui struktur Kurikulum 1964 & Kurikulum 1968 dari jenjang pendidikan baik SD, SMP hingga SMA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar 2. Dinamika Pendidikan dari Orde Lama menuju Orde Baru (1945-1968) 3. Kurikulum 1964 4. Kurikulum 1968 5. Penutup
3.	BAB III MOTIF DIBALIK PERUBAHAN KURIKULUM 1964 KE KURIKULUM 1968 DAN DINAMIKA PROSES PEMBELAJARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingin mengetahui motif kebijakan politik pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 2. Ingin mengetahui sistem pembelajaran yang digunakan pada Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 3. Ingin mengetahui dinamika guru dalam proses pendidikan pada Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar 2. Motif Kebijakan Politik Pendidikan Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968 3. Sistem Pembelajaran 4. Model Pembelajaran <i>Teacher Centered</i> 5. Dinamika Guru dalam Proses Pendidikan 6. Penutup
4.	BAB IV KONSTELASI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN KURIKULUM 1964 KE KURIKULUM 1968	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dinamika politik dan pergantian kekuasaan 2. Analisis dinamika ideologi yang berkembang 3. Analisis transisi Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dalam kerangka sosiologis Michael W. Apple 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar 2. Dinamika Politik dan Pergantian Kekuasaan 3. Dinamika Ideologi yang Berkembang 4. Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 dalam Kerangka Sosiologis Michael W. Apple 5. Penutup
5.	BAB V PENUTUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa poin dari BAB I sampai IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan 2. Saran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 19 TAHUN 1965

TENTANG

POKOK-POKOK SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL PANTJASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building;
b. bahwa perlu adanya Sistim Pendidikan Nasional yang sesuai dengan tuntutan Revolusi Indonesia;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 224 tahun 1964 pasal pertama dari Bagian Kedua mengenai Pembentukan dan Tugas Panitia Negara Penjempurnaan Sistim Pendidikan Pantjawardhana dan Keputusan Presiden No.145 tahun 1965 mengenai Nama dan Rumusan-Induk Sistim Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Pokok-Pokok Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila dalam satu Penetapan Presiden.

Mengingat : 1. Pidato P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1964;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.224 tahun 1964;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
4. Amanat Tertulis P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1965;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145 tahun 1965;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 146 tahun 1965;

Memperhatikan : Pertimbangan-pertimbangan daripada Panitia Negara Penjempurnaan Sistim Pendidikan Pantjawardhana.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PENETAPAN PERESIDEN TENTANG POKOK-POKOK SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL PANTJASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

MUKADIMAH

Bahwasanja dalam rangka menjelesaikan Revolusinja Bangsa Indonesia jang merdeka dan berdaulat merasa bertanggungjawab untuk mentjiptakan dan memiliki suatu Konsepsi Pendidikan Nasional jang revolusioner, djelas dan tegas ditudjukan kepada tertjapainja Ketiga Kerangka Tudjukan Revolusi Indonesia.

Dalam merealisasikan perasaan tanggungjawab itu Bangsa Indonesia dijakinkan oleh Manipol jang berbunji:

"Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia harus dipahami oleh tiap warganegara Indonesia sedjak ia dibangku sekolah dan apabila sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan setjara luas, disekolah-sekolah maupun diluar sekolah tentang Persoalah-persoalan Pokok Revolusi Indonesia.

Rakjat Indonesia harus bersatu fikiran mengenai revolusinja sendiri, karena hanya diika ada persatuan dalam fikiran Rakjat Indonesia...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dan selandjutnja dijakinkan oleh Amanat Negara P.J.M. Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi jang ber-
bunji :

"Mengenai masalah pendidikan, saja sudah meminta D.P.A. memberikan nasehatnja sesuai dengan alam fikiran saja. Pantjawardhana memang s tim pendidikan jang telah saja restui. Adapun pengchusususan-pengchusususan dalam melaksanakan sistim itu, ada pengchusususan Pantjadarma, ada pengchusususan Islam, ada pengchusususan Katholik, ada pengchusususan Protestan, ada pengchusususan Budha, ada pengchusususan Hindu Bali, ada pengchusususan Pantjatjinta, dan sebagainya, hal ini memang diperkenankan, asal dasarnja dan isi-moralnja Pantjasila-Manipol/Usdek. Tidak pertjuma bahwa lambang nasional kita Bhineka Tunggal Ika! Aku ingin bahwa dari ke-bhinneka-tunggal-ikaan itu lahir ide-ide, konsepsi-konsepsi, kreasi-kreasi jang hebat sehebat-hebatnja, dan lahir pula putera-putera, patriot-patriot, sardjana-sardjana, seniman-seniman, sastrawan-sastrawan, ahli-ahli, bahkan empu-empu, jang bisa kita banggakan." (TAVIP)

Berdasarkan Amanat P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu, disusunlah suatu Konsepsi Pendidikan Nasional. Konsepsi ini didasarkan pula atas Amanat P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia bahwa dasar dan isi-moral Pendidikan Nasional ialah Pantjasila-Manipol/Usdek jang telah dituangkan kedalam Keputusan Presiden No.180 tahun 1964.

Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation dan Character Building) jang membina suatu bangsa jang mampu atas tanggungjawab sendiri menjelesaikan Revolusinja, tahap demi tahap, dengan pengertian bahwa Agama adalah unsur mutlak dalam rangka Nation dan Character building sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. tahun 1960.

Pendidikan Nasional Indonesia, ialah Pendidikan jang baik materiil maupun spirituil membina Manusia dan Bangsa Sosialis Indonesia jang berdjiwa Pantjasila-Manipol/Usdek sanggup menjelesaikan Ketiga Kerangka Tudjuang Revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol, jaitu :

"Kesatu: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, jang demokratis, dengan wijayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke".

"Kedua : Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu."

"Ketiga: Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar kerdjasama membentuk satu Dunia yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna."

Suatu masalah yang sangat penting yang perlu pula diketengahkan disini ialah FUNGSI Pendidikan Nasional sebagai Alat Revolusi. Revolusi Indonesia yang mempunjai Tiga Kerangka Tujuan seperti yang tertjantum didalam Manipol dan bergerak dalam abad ke-XX memerlukan pembinaan:

1. Manusia Indonesia Baru yang berdjawa Pantjasila-Manipol/Usdek dan sanggup berdjombang untuk mentjapai tjita-tjita tersebut.
2. Manpower yang tjukup untuk melaksanakan pembangunan.
3. Kepribadian Kebudajaan Nasional yang luhur.
4. Ilmu dan teknologi yang tinggi.

5. Perggerakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pergerakan massa aksinja seluruh kekuatan rakjat dalam pembangunan dan Revolusi.

Untuk semuanya itu Pendidikan sebagai bagian jang integral dalam Revolusi jang menjeluruh dan merata dan sebagai landasan utama daripada pembangunan seperti jang ditegaskan dalam Ketetapan M.P.R. No.II/MPRS/1960 harus difungsikan sebagai berikut :

1. Pendidikan sebagai pembina Manusia Indonesia Baru jang berachlak tinggi.
2. Pendidikan sebagai produsen tenaga kerdja dalam semua bidang dan tingkatan.
3. Pendidikan sebagai lembaga pengembang Kebudayaan Nasional.
4. Pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik dan fisik/mental.
5. Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakjat.

Kelima Dharma Bhakti Pendidikan dalam segala djenis dan tingkatnja jaitu :

1. Membina Manusia Indonesia Baru jang berachlak tinggi.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga kerdja dalam segenap bidang dan tingkatan.
3. Memadjukan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional.
4. Memadjukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menggerakkan dan menjadarkan seluruh kekuatan rakjat untuk membangun Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru.

Kelima tugas tersebut tak dipisahkan dari pengembangan Olahraga sebagai Alat Revolusi untuk membangun Manusia Indonesia Baru jang kuat fisik dan mentalnja.

Kelima tugas tersebut ditambah dengan pengembangan Olahraga hendak nja didjadikan dasar program setiap lembaga Pendidikan serta didjadikan dasar pula bagi penjusunan tata-kerdja dan pembagian kerdja diantara lembaga-lembaga Pendidikan dan dalam lembaga-lembaga Pendidikan itu sendiri, dalam mengisi Ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 Bab II pasal 2.

Djuga dalam Amanat Politik "Berdikari" tertanggal 11 April 1965 ditetapkan sebagai berikut :

1. "Pendidikan sebagai alat Revolusi dalam suasana Berdikari mengharuskan pembantingan stir dalam segala bidang, chususnja dalam bidang Pendidikan.
2. "Memperiapkan Bangsa Indonesia setjara mental dan fisik untuk dengan ichlas memikul tanggung-djawab dalam melaksanakan Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi Indonesia.
- 2."Menindjau kembali dan menjesuaikan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dengan tuntutan perkembangan Revolusi kita sekarang ini. Dalam pelaksanaan tidak perlu diadakan perobahan dan meninggalkan kepribadian Bangsa Indonesia."

Dengan penegasan daripada tugas Pendidikan Nasional dalam Revolusi Indonesia maka djelaslah kedudukannja dalam keseluruhan slagorde Revolusi Indonesia jang menghimpun seluruh kekuatan progresif-revolusioner berporoskan NASAKOM.

Dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dengan demikian pula maka tugas Pendidikan Nasional yang bersifat makro-pedagogis menjadi jelas.

Pasal 1.

DASAR-AZAS PENDIDIKAN NASIONAL.

Pantjasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan jiwa sebagai Wel-tanschauung Bangsa Indonesia dalam penghidupan Nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan Pendidikan Nasional adalah Pantjasila-Manipol/Usdek.

Dengan demikian, Pantjasila-Manipol/Usdek harus mendjiwai semua segi Pendidikan Nasional.

Pasal 2.

TUDJUAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Tudjuan Pendidikan Nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai dengan Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-djawab atas terse-lenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pantjasila jaitu :

- a. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
- b. Perikemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Kebangsaan
- d. Kerakjatan
- e. Keadilan Sosial,

seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.

Pasal 3.

ISI MORAL PENDIDIKAN NASIONAL.

Isi Moral Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta adalah Pantjasila-Manipol/Usdek.

Pasal 4.

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL

Politik Pendidikan Nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan pada taraf Revolusi sekarang ini yang Nasional-Demokratis harus melahirkan patriot-patriot komplit, yang berdasarkan Pantjasila-Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, ialah :

- a. Imperialisme
- b. Kolonialisme dan Neo-kolonialisme
- c. Feodalisme
- d. Kapitalisme

dan yang berjuang dengan penuh kejakinan untuk membangun suatu Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur serta membangun Dunia Baru.

Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5.

PENGCHUSUSAN DALAM SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL

Pengchususian Sistim Pendidikan Nasional diperkenankan sesuai dengan "aliran" politik dan kejakinan Agama jang dianutnja masing-masing dalam rangka Pantjasila-Manipol/Usdek sebagai satu kesatuan.

Pasal 6.

PENJELENGGAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Penjelenggaraan Pendidikan Nasional ialah Negara/Pemerintah, Lembaga-lembaga Keagamaan, Lembaga-lembaga/Organisasi Kemasjarkatan, Orang Tua/Wali murid, menurut bidang, hak, kewadajiban dan wewenangnja masing-masing, dalam satu ikatan kerdjasama jang harmonis demi tertjapainja Tudjuan Pendidikan Nasional.

BAB II.

SUSUNAN PENDIDIKAN/PERSEKOLAHAN NASIONAL

Bagian I.

SUSUNAN PENDIDIKAN DALAM HUBUNGAN SEKOLAH.

Untuk dapat mentjapai Tudjuan Pendidikan Nasional Pantjasila dengan baik ditetapkan susunan Pendidikan dalam hubungan sekolah sebagai berikut:

A. PENDIDIKAN BIASA.

Pasal 7.

Pendidikan Prasekolah diberikan dilembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak disingkat T.K., jang masa-asuhannja ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai anak didik mentjapai umur 4 (empat) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada awal tahun peladjaran jang bersangkutan.

Pasal 8.

Pendidikan Dasar diberikan dilembaga Pendidikan Sekolah Dasar disingkat S.D., jang masa-beladjarnja ditetapkan 9 (sembilan) tahun terhitung mulai anak didik mentjapai umur 6 (enam) tahun pada awal tahun peladjaran jang bersangkutan.

Pasal 9.

Pendidikan Menengah baik Umum maupun Kedjuruan diberikan di-lembaga-lembaga Pendidikan Menengah jang diberi nama Sekolah Menengah disingkat S.M. jang masa-beladjarnja ditetapkan 3 (tiga) - 4 (empat) tahun, setelah anak didik menjelesaikan peladjarannja ditingkat Pendidikan Dasar atau jang dipandang memenuhi sjarat untuk diterima di Pendidikan Menengah.

Pasal 10.

Pendidikan Tinggi diberikan dilembaga-lembaga Pendidikan Tinggi jang berbentuk Akademi, Institut, Fakultas dalam hubungan Universitas, jang masa-beladjarnja ditetapkan 4 (empat) - 6 (enam) tahun setelah anak didik menjelesaikan peladjaran ditingkat Pendidikan Menengah atau jang dipandang memenuhi sjarat untuk diterima di Pendidikan Tinggi.

B. PENDIDIKAN CHUSUS ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. PENDIDIKAN CHUSUS.

Pasal 11.

Bagi warganegara jang tidak dapat menjelesaikan peladjarannja di Sekolah Dasar sampai 9 (sembilan) tahun/Sekolah Menengah atau bagi mereka jang dipandang memerlukannja diselenggarakan Pendidikan Chusus untuk menambah penge-tahuan dan kemampuan bekerdja.

C. PENDIDIKAN LUAR BIASA.

Pasal 12.

Bagi warganegara jang oleh karena keadaan djasmaniah atau rochaniah ti-dak dapat mengikuti lembaga-lembaga Pendidikan Biasa diselenggarakan Pendidika-Luar Biasa jang disesuaikan dengan keperluan.

Bagian II.

PENDIDIKAN KEMASJARAKATAN.

Pasal 13.

Bagi warganegara jang tidak sempat dididik pada salah satu djenis lem-baga Pendidikan jang tertera didalam Bab II Bagian I diselenggarakan lembaga-lembaga Pendidikan Kemasjarakatan, jang bertudjuan lebih mempertinggi keachli-an/ketrampilan Rakjat.

Bagian III.

PENDIDIKAN DILUAR HUBUNGAN SEKOLAH.

Pasal 14.

Kegiatan Pendidikan diluar hubungan sekolah sebagai bagian dari Pen-didikan untuk mentjapai Tudjuan Pendidikan Nasional diselenggarakan oleh para penjelenggara menurut bidang, hak, kewadjiban dan wewenang masing-masing da-lam suatu ikatan kerdjasama jang harmonis.

Pasal 15.

Pendidikan diluar hubungan sekolah ini dilakukan dilingkungan rumah tangga dan dilingkungan masjarakat.

BAB III.

KURIKULUM PENDIDIKAN/PERSEKOLAHAN NASIONAL

Pasal 16.

Semua kegiatan Pendidikan Nasional baik dalam hubungan sekolah menurut tingkatan dan djenisnja, maupun dalam hubungan lembaga-lembaga Pendidikan/Persekolahan untuk mentjapai Tudjuan Pendidikan Nasional;

Pasal 17.

Kurikulum Pendidikan/Persekolahan meliputi semua pengaruh jang didapat anak didik atas pimpinan lembaga Pendidikan/Sekolah.

Pasal 18.

Djiwa kurikulum Pendidikan/Persekolahan Nasional ialah :

1. Semangat mengemban Amanat Penderitaan Rakjat setjara Gotong-Rojong demi tertjapainja Masjarakat Adil - Makmur dan jang diridlai oleh Tuhan Jang Maha Esa.
2. Semangat Demokrasi Terpimpin jang mengutamakan Musjawarah untuk Mufakat.
3. Semangat tjinta Bangsa dan Tanah Air dan semangat kesatuan Bangsa jang ber-Bhinneka Tunggal Ika, berkepribadian dan berkebudajaan Nasional.

4. Rasa



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

4. Rasa Prikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh Bangsa-bangsa didunia atas semangat Nefo untuk membangun Dunia Baru jang bebas dari imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme.
5. Kepertjajaan dan rasa taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa setjara berkeadaban sebagai karakteristik Bangsa Indonesia, sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat 3 dan lampiran A § 338, dan semangat toleranci terhadap kejakinan masing-masing sebagai karakteristik jang lain Bangsa Indonesia dalam membentuk Manusia Indonesia Baru jang berdjiwa Nasakom.

B A B IV.

MASA-PERALIHAN

Pasal 19.

Pelaksanaan Pendidikan Nasional berpangkal pada keadaan sekarang melalui suatu masa-peralihan untuk mentjapai Masjarakat Sosialis Indonesia jang berkepribadian Pantjasila-Manipol/Usdek sesuai dengan tuntutan Revolusi Indonesia, dimana Madjelis Pendidikan Nasional setjara teratur dan berentjana melalui evaluasi berusaha mempersingkat masa peralihan.

B A B V.

PERATURAN CHUSUS

Pasal 20.

Penetapan Presiden ini dilengkapi dengan pendjelasan dan pedoman mengenai :

1. Susunan Pendidikan/Persekolahan Nasional,
2. Kurikulum Pendidikan/Persekolahan Nasional,
3. Pembiajaan,
4. Wadjib Beladjar,
5. Masa Peralihan,

jang didjadikan bahan pegangan bagi Madjelis Pendidikan Nasional untuk didjadian Peraturan-peraturan Pelaksanaan dalam rangka melaksanakan tugasnja.

B A B VI.

MADJELIS PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 21.

Madjelis Pendidikan Nasional sebagai Badan Tertinggi dalam bidang Pendidikan Nasional,menentukan kebidjaksanaan umum (policy), penelitian, perentjanaan, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila disegala bidang Pendidikan.

B A B VII.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 22.

Penetapan Presiden ini didjadikan titik-tolak untuk mendjabarkan semua segi pelaksanaan Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila.

Pasal 23.

Peraturan-peraturan tentang Pendidikan dan Pengadjaran jang ada, harus disesuaikan dengan Penetapan Presiden ini.

Pasal 24.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkannja.

Agar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 25 Agustus 1965.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965. NO. 81.

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG² AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 146 TAHUN 1965.

TENTANG

PEMBENTUKAN MADJELIS PENDIDIKAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila diperlukan suatu Madjelis Pendidikan Nasional, yang merentjanakan, membina dan mengawasi pelaksanaannya ;
 - c. bahwa sekarang sudah tiba waktunya untuk segera membentuk Madjelis Pendidikan Nasional tersebut ;
- Mengingat :
- 1. Ketetapan M.P.R.S.No. II/MPRS/1960 ;
 - 2. Pidato P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1964
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1964;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.224 tahun 1964;
 - 5. Ketetapan M.P.R.S.No. VI/MPRS/1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Madjelis Pendidikan Nasional yang merupakan Badan Tertinggi dalam bidang perentjanaan, pembinaan dan pengawasan Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila disegala bidang pendidikan.

- KETIGA** : Kepada Ketua Madjelis Pendidikan Nasional untuk menjusun tugas, wewenang, kedudukan, anggaran belandja, komposisi dan personalia daripada Madjelis Pendidikan Nasional tersebut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Arina Izmi dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 April 1995 dari Bapak Chairul Harahap dan Ibu RR. Nefi Widiastuti. Arina adalah putri kedua dari dua bersaudara. Pengalaman intelektual Arina dimulai dengan bersekolah di TK/ Raudatul Arifin Islam Tunas Kencana Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara. Setelah itu, Arina melanjutkan di SD Negeri Rawamangun 07 Pagi, SMP Negeri 118 Jakarta, dan SMA Negeri 30 Jakarta. Selepas lulus dari SMA, Arina diterima pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama mengikuti perkuliahan, Arina pernah mengikuti lomba yang diadakan oleh UPT MKU UNJ dengan prestasi yang pernah diraih ialah Juara Favorit *News Reading* pada Desember 2014. Selain itu, Arina pernah melakukan penelitian di antaranya: “Potret Kehidupan Buruh di Indonesia: Studi Kasus Muharram Salah Seorang Buruh di PT Mitshubishi Motors 2100, Kawasan Industri, Cibitung, Bekasi Timur”, “Pengemis Sebagai Fakta Sosial: Studi Kasus di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Kantin Blok M”, “Realitas Stratifikasi di Desa Cipayung, Serang, Banten”, “Dinamika Ekonomi Informal di Perkotaan: Studi Kasus Taman Ayodya, Jakarta Selatan”, “Partai Politik dan Problematikanya di Indonesia: Studi Kasus Dualisme di Tubuh Partai Golongan Karya (Golkar)”, “Gender dalam Dunia Pertelevisian Nasional: Studi Kasus Konstruksi Kecantikan Pada Televisi”, “Menelaah Pelaksanaan, Perencanaan, dan Evaluasi Pembelajaran Sosiologi Kelas XII IIS 2 di SMA Angkasa 1 Jakarta”, “Perkembangan Kurikulum 1968”, dan “Menyimak Kebijakan Pendidikan di Era Orde Baru”. Arina juga melakukan kegiatan praktek kegiatan mengajar di SMA Negeri 27 Jakarta pada tahun 2016. Untuk lebih lanjut, Arina bisa dihubungi lewat email: arinaizmihrp@gmail.com